



Katalog BPS : 3305007

INDIKATOR PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 2014

(Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, Modul Ketahanan Sosial)



BADAN PUSAT STATISTIK

INDIKATOR PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 2014

(Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, Modul Ketahanan Sosial)



INDIKATOR PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 2014

ISBN : 978-979-064-914-9

Nomor Publikasi : 04320-1504

Katalog BPS : 3305007

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 187 halaman

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014 merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Modul Ketahanan Sosial (Susenas Modul Hansos) 2014. Indikator perilaku lingkungan hidup yang disajikan adalah perilaku kepedulian rumah tangga terhadap kondisi lingkungan hidup. Indikator perilaku peduli lingkungan hidup terbagi dalam indikator perilaku rumah tangga terkait pengelolaan sumber daya air di rumah tangga, pengelolaan energi, penggunaan transportasi, pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan mitigasi bencana alam.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik untuk bahan perencanaan, monitoring maupun bahan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang lingkungan hidup. Beberapa indikator dalam publikasi ini juga mencerminkan implementasi dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti dalam hal penghematan energi listrik dan penghematan air.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian publikasi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik.....	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Metode Survei	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Profil Responden	7
Bab III Pengelolaan Air	19
3.1. Ketersediaan Fasilitas Air	21
3.2. Sumber Air Minum	24
3.3 Perilaku Penggunaan Air Saat Mencuci	25
3.4 Pemanfaatan Air Bekas	26
3.5 Keberadaan Tanaman di Rumah	27
3.6 Keberadaan Area Resapan Air	28
Bab IV Pengelolaan Energi.....	47
4.1. Pemanfaatan Cahaya Matahari	50
4.2. Pemanfaatan Energi Alternatif	51
4.3. Penggunaan Lampu Hemat Energi	52
4.4. Perilaku Rumah Tangga pada Penggunaan Alat Elektronik	54
Bab V Penggunaan Transportasi.....	65
5.1. Sarana Angkutan Utama Penunjang Kegiatan Utama	68
5.2. Bahan Bakar Utama	69
5.3. Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Kendaraan	71
5.4. Perawatan Mesin Kendaraan Bermotor	72

5.5. Penggunaan Kendaraan Bermotor	73
5.6. Usaha Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	72
 Bab VI Pengelolaan Sampah	101
6.1. Kebiasaan Membuang Sampah	103
6.2. Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk .	106
6.3. Perlakuan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai	109
 Bab VII Peduli Lingkungan Sekitar	125
7.1. Gangguan/Pencemaran Lingkungan	127
7.2. Upaya Penanggulangan Gangguan/Pencemaran Lingkungan	129
 Bab VIII Mitigasi Bencana Alam	135
8.1. Rumah Tangga yang Mengalami Bencana Alam	138
8.2. Desa Rawan Bencana	139
8.3. Pengetahuan Tanggap Darurat Bencana	142
 Lampiran.....	155
Lampiran 1 Relative Standard Error (RSE).....	157
Lampiran 2 Kuesioner Susenas Modul Hansos 2014.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Persentase Latar Belakang Responden Menurut Sosial, Demografi, dan Ekonomi	10
Tabel 2.2	Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	11
Tabel 2.3	Persentase Responden Berdasarkan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	12
Tabel 2.4	Persentase Responden Berdasarkan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	13
Tabel 2.5	Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan Menurut Provinsi ..	14
Tabel 2.6	Persentase Responden Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Provinsi ..	15
Tabel 2.7	Persentase Responden Berdasarkan Ijazah yang Dimiliki Menurut Provinsi ..	16
Tabel 2.8	Persentase Responden Berdasarkan Kegiatan Utama Menurut Provinsi ..	17
Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Keperluan Sehari-hari Rumah Tangga.....	24
Tabel 3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Membilas Pakaian dan Daerah Tempat Tinggal	26
Tabel 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Air untuk Minum/Masak/ Mandi/Cuci di Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	32
Tabel 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Air di Rumah dan Jarak ke Fasilitas Air Terdekat Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	33
Tabel 3.5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Instalasi Air Pipa/Selang di Rumah dan Perilaku Membiarakan Air Mengalir Tanpa Digunakan Menurut Provinsi	35
Tabel 3.6	Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Alat Makan/Minum Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal.....	36
Tabel 3.7	Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Sayuran dan Buah Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal	37
Tabel 3.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alat/Cara Membilas Cucian Pakaian.....	38
Tabel 3.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain.....	39

Tabel 3.10	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tanaman di Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	40
Tabel 3.11	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tanaman Keras/Tahunan yang langsung Ditanam di Tanah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	41
Tabel 3.12	Persentase Penduduk yang Mengetahui/Mendengar tentang Sumur Resapan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	42
Tabel 3.13	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Sumur Resapan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	43
Tabel 3.14	Persentase Penduduk yang Mengetahui/Mendengar tentang Lubang Resapan Biopori Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	44
Tabel 3.15	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lubang Resapan Biopori Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	45
Tabel 3.16	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Taman/Tanah Berumput di Pekarangan Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	46
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Penerangan di Siang Hari Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	56
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Alternatif Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	57
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	58
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki TV Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	59
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki TV dan Kebiasaan Membiarkan TV Tetap Menyalakan Meskipun Tidak Digunakan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	60
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	62
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC Menurut Provinsi dan Kebiasaan Menyalakan AC Pada Suhu di Bawah 24°C Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	63
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Bekerja Menurut Provinsi.....	77
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Sekolah Menurut Provinsi	79

Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal.....	81
Tabel 5.4	Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	82
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama Perahu Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	83
Tabel 5.6	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama Mobil Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	84
Tabel 5.7	Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Mobil Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal.....	85
Tabel 5.8	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	86
Tabel 5.9	Persentase Rumah Tangga yang Merawat Mesin Kendaraannya Secara Rutin Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki	89
Tabel 5.10	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Kendaraan Bermotor yang Dimiliki Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	90
Tabel 5.11	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi dan Jenis Usaha yang Dilakukan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	91
Tabel 5.12	Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi dengan Alasan Utamanya Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	94
Tabel 5.13	Persentase Rumah Tangga dengan Alasan Tidak Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dalam Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	97
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan Terhadap Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	110
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan Terhadap Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	113
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	116

Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk dengan Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	119
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal.....	122
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal dan Kejadian Gangguan Kondisi/Kualitas Lingkungan	131
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Upaya Menanggulangi Gangguan Kondisi/Kualitas Lingkungan ...	134
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam Dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	146
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rasa Trauma Akibat Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	147
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga yang Desa Tempat Tinggalnya termasuk Desa Rawan Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	148
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga dengan Ragam Jenis Bencana yang Pernah Terjadi di Desanya Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	149
Tabel 8.5	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Bagaimana Cara Menyelamatkan Diri Dari Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	150
Tabel 8.6	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui tentang Adanya Tanda-tanda atau Peringatan Tanggap Darurat Bencana Alam di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	151
Tabel 8.7	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Pernah Mengikuti Pelatihan atau Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	152
Tabel 8.8	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Simulasi Penyelamatan Bencana Alam Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Status Hubungan dengan KRT	153
Tabel 8.9	Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Memerlukan Pertolongan Jika Terjadi Bencana Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal	155

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Fasilitas Air untuk Minum/Masak/Mandi/Cuci di Rumah dan Jarak ke Fasilitas Air Terdekat	22
Grafik 3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Instalasi Air Pipa/Selang di Rumah dan Perilaku Membiarakan Air Mengalir Tanpa Digunakan	23
Grafik 3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Alat Makan/Minum	25
Grafik 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain Menurut Daerah Tempat Tinggal.....	27
Grafik 3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Area Resapan Air	28
Grafik 3.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Provinsi	29
Grafik 3.7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Jenis Area Resapan Air	30
Grafik 3.8	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui/Mendengar Mengenai Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori	31
Grafik 4.1	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Penerangan Ruang di Siang Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal	51
Grafik 4.2	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Alternatif Menurut Daerah Tempat Tinggal	52
Grafik 4.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Daerah Tempat Tinggal.....	53
Grafik 4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki TV dengan Kebiasaan Membiarakan TV Tetap Menyalakan Meskipun Tidak Ditonton Menurut Daerah Tempat Tinggal	54
Grafik 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC dan Kebiasaan Menyalakan AC Pada Suhu di Bawah 24°C Menurut Daerah Tempat Tinggal	55
Grafik 5.1	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan dan Jenis Kendaraan Bermotor	68
Grafik 5.2	Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Bekerja dan Sekolah	69
Grafik 5.3	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama dan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki	70

Grafik 5.4	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Menurut Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal.....	71
Grafik 5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Perawatan Mesin Secara Rutin pada Kendaraan Bermotor yang Dimiliki	72
Grafik 5.6	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Cara Penggunaan Kendaraan Bermotor	73
Grafik 5.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Usaha yang Dilakukan dalam Rangka Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	75
Grafik 5.8	Persentase Rumah Tangga dengan Alasan Tidak Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dalam Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Daerah Tempat Tinggal	76
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan Terhadap Sampah Menurut Daerah Tempat Tinggal	105
Grafik 6.2	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi	107
Grafik 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah	108
Grafik 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai	109
Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan/Pencemaran Lingkungan Menurut Jenis Gangguan/Pencemaran Lingkungan dan Daerah Tempat Tinggal	128
Grafik 7.2	Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan/Pencemaran Lingkungan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Pencemaran Lingkungan dan Daerah Tempat Tinggal.....	129
Grafik 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam Dalam Setahun Terakhir	139
Grafik 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Desa Tempat Tinggalnya termasuk Desa yang Rawan Bencana Alam Menurut Daerah Tempat Tinggal	140
Grafik 8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Ragam Jenis Bencana yang Pernah Terjadi di Desanya dan Daerah Tempat Tinggal	140
Grafik 8.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bencana yang Paling Dikhawatirkan Terjadi di Desanya	141

Grafik 8.5	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Gempa	142
Grafik 8.6	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Tanda-tanda atau Peringatan untuk Mengatasi Bencana Alam di Lingkungan Tempat Tinggal	143
Grafik 8.7	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Pernah Mengikuti Pelatihan Simulasi Penyelamatan Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Provinsi	145

1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Demikian juga sebaliknya, lingkungan dapat dipengaruhi oleh aktivitas dan perilaku manusia. Kehidupan yang saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya, menempatkan manusia sebagai subjek utama yang mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Posisi manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber daya alam, terkadang membuat manusia lupa diri karena didorong adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pembangunan seringkali dilakukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain proses pembangunan yang sering mengakibatkan degradasi lingkungan, perilaku konsumtif dan gaya hidup manusia juga mengakibatkan permasalahan lingkungan. Berdasarkan hasil kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2007, selain faktor alam, aktivitas manusia juga merupakan penyebab utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi, yang pada akhirnya turut menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa aktivitas manusia tersebut antara lain penggunaan transportasi, penggunaan energi, pembakaran hutan dan peternakan.

Pada dasarnya perilaku manusia tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterkaitan antara aktivitas manusia dan permasalahan lingkungan hidup sebenarnya tidak sesederhana pada boleh tidaknya suatu aktivitas dilakukan. Namun diharapkan setiap orang bisa bertanggung jawab atas kerusakan pada lingkungan yang diakibatkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan berperilaku baik yang merusak lingkungan maupun yang bermanfaat untuk lingkungan. Untuk mendukung perilaku kepedulian penduduk terhadap lingkungan, maka perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha membuat peraturan terkait perilaku penduduk untuk pembangunan berkelanjutan. Berbagai regulasi sudah diterbitkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga diatur bagaimana setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 yang mengatur kepedulian masyarakat terhadap penyediaan ruang terbuka hijau.
4. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air. Dalam inpres tersebut disebutkan bahwa para kepala pemerintahan (gubernur, bupati, dan walikota) agar melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air dengan target penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata penggunaan listrik dan penghematan air sebesar 10% dari rata-rata penggunaan air.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang penghematan pemakaian tenaga listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 penghematan pemakaian air tanah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011, masyarakat diharuskan untuk bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan minimal, memanfaatkan air hujan, dan memanfaatkan kembali air yang pernah dipakai untuk berbagai kegiatan.

Berbagai peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan untuk mengatur atau mendorong masyarakat supaya berperilaku ramah lingkungan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan data dan sebagai bentuk kepedulian BPS terhadap permasalahan lingkungan, pada tahun 2014 BPS melaksanakan survei terkait lingkungan hidup yang terdapat dalam kegiatan Modul Ketahanan Sosial (Modul Hansos). Kegiatan survei Modul Hansos diintegrasikan dengan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014 Triwulan III. Pada Modul Hansos selain mengumpulkan keterangan terkait lingkungan hidup juga

mencakup keterangan terkait sikap percaya dan toleransi dalam bermasyarakat, kelompok dan jejaring, sikap dan perilaku dalam keluarga serta keterangan terkait hak politik, gangguan keamanan dan kejadian tindak kejahatan di masyarakat. Keterangan lingkungan hidup yang dicakup dalam Modul Hansos 2014 meliputi perilaku rumah tangga yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak bagi lingkungan hidup. Perilaku rumah tangga yang diamati dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu perilaku dalam mengelola air, mengelola energi, penggunaan transportasi, pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mitigasi bencana alam Hasil pendataan Modul Hansos 2014 tersaji dalam publikasi ini yang berjudul “Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014”.

1.2. Tujuan

Secara umum publikasi ini bertujuan untuk menyajikan indikator perilaku kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan hidup, baik perilaku ramah lingkungan ataupun perilaku yang sifatnya merusak lingkungan hidup. Perilaku rumah tangga yang disajikan terbatas pada perilaku rumah tangga terkait tempat tinggal, pemanfaatan energi, pemanfaatan air, penggunaan transportasi, dan rasa kepedulian pada lingkungan sekitar. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk bahan evaluasi maupun sebagai bahan perencanaan yang melibatkan rumah tangga pada pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu.

1.3. Metode Survei

Susenas Modul Ketahanan Sosial 2014 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Sampel rumah tangga pada survei Modul Hansos merupakan rumah tangga sampel Susenas Triwulan III Tahun 2014. Hasil Modul Hansos dapat disajikan baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan dapat dibedakan menurut daerah yaitu perkotaan dan perdesaan.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung antara pencacah (PCL) dengan responden. Responden yang diwawancara adalah kepala rumah tangga (KRT) atau pasangannya. KRT atau pasangannya adalah pihak yang bertanggung jawab dan pengambil keputusan dalam rumah tangga dan juga yang paling mengetahui tentang karakteristik atau perilaku yang ditanyakan. Dari hasil pelaksanaan pendataan Modul Hansos 2014 pada bulan Oktober 2014, sebanyak 71.446

rumah tangga berhasil dicacah atau sekitar 95,26 persen dari target sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Rumah tangga yang nonrespon sebagian besar dikarenakan rumah tangga tersebut sudah pindah atau rumah tangga tidak dapat ditemui atau tidak dapat diwawancara hingga berakhirnya waktu pencacahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi “Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014” terdiri dari empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, metode survei, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan profil responden. Bab III menyajikan indikator perilaku pengelolaan air di rumah tangga. Bab IV menyajikan indikator perilaku pengelolaan energi. Bab V menyajikan indikator perilaku penggunaan transportasi. Bab VI menyajikan indikator perilaku pengelolaan sampah. Bab VII menyajikan indikator kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan bab VIII menyajikan indikator mitigasi bencana alam.

2

PROFIL RESPONDEN



BAB II

PROFIL RESPONDEN

Berbagai literatur menjelaskan bahwa karakteristik responden/narasumber baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun demografi terkait dengan jawaban dan perilaku peduli lingkungan hidup responden. Latar belakang responden yang dapat diperoleh dari pendataan Modul Hansos 2014 diantaranya adalah jenis kelamin, umur, hubungan dengan kepala rumah tangga (KRT), status perkawinan, tingkat pendidikan, dan kegiatan utama. Tabel 2.1 menyajikan profil responden Modul Hansos 2014.

Rumah tangga terpilih Modul Hansos 2014 yang tinggal di wilayah pedesaan maupun yang tinggal di wilayah perkotaan persentasenya relatif hampir sama yaitu 49,83 persen dan 50,17 persen. Namun bila menurut jenis kelamin, responden yang mewakili rumah tangganya dalam menjawab pertanyaan saat wawancara sebagian besar adalah perempuan, hal ini berlaku baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangganya, responden paling banyak sebagai kepala rumah tangga (59,76 persen) dimana kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 44,79 persen dan kepala rumah tangga perempuan sebanyak 14,97 persen. Sebagian besar responden berstatus kawin (81,39 persen), 2,81 persen berstatus belum kawin, dan 15,8 persen berstatus cerai hidup/mati.

Berdasarkan pendidikan atau ijazah yang dimiliki responden di wilayah perkotaan memiliki pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan responden di wilayah pedesaan. Sebanyak 12,74 persen responden di wilayah perkotaan berpendidikan Sarjana, 31,09 persen berpendidikan SMU, 17,51 persen berpendidikan SMP dan sisanya berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan di wilayah pedesaan sebanyak 27,72 persen responden tidak memiliki ijazah (tidak pernah sekolah atau tidak menamatkan pendidikan SD), sebanyak 40,37 persen responden berpendidikan SD, 15,70 persen berpendidikan SMP, hanya 12,65 yang berpendidikan SMU dan 3,56 persen berpendidikan Sarjana.

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan responden seminggu yang lalu, kegiatan utama responden paling banyak adalah bekerja (69,94 persen), urutan kedua adalah kegiatan

mengurus rumah tangga, hal ini berlaku baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Tingginya persentase kegiatan bekerja dan mengurus rumah tangga kemungkinan besar diakibatkan persyaratan responden yang mengharuskan KRT atau pasangannya. Persyaratan ini dilatarbelakangi agar responden yang menjadi narasumber survei memahami situasi perilaku anggota rumah tangga lainnya khususnya dalam perilaku peduli lingkungan hidup.

Tabel 2.1. Distribusi Persentase Latar Belakang Responden Menurut Sosial, Demografi, dan Ekonomi

Karakteristik	Perkotaan	Pedesaan	Total
Rumah tangga	49,83	50,17	100
Jenis Kelamin			
Laki-laki	41,61	48,04	44,84
Perempuan	58,39	51,96	55,16
Kelompok Umur (tahun)			
<20	0,60	0,25	0,43
20-24	3,14	2,34	2,74
25-39	29,60	30,50	30,05
40-49	27,94	25,53	26,73
50-59	21,54	20,94	21,24
60+	17,17	20,44	18,81
Hubungan dengan KRT			
KRT	57,21	62,28	59,76
Istri/suami	42,79	37,72	40,24
Status Perkawinan			
Belum Kawin	4,31	1,31	2,81
Kawin	79,81	82,96	81,39
Cerai hidup/mati	15,88	15,73	15,8
Ijazah yang dimiliki			
Tidak Punya	13,94	27,72	20,65
SD/sederajat	24,72	40,37	32,34
SMP/sederajat	17,51	15,70	16,63
SMU/sederajat	31,09	12,65	22,11
PT/sederajat	12,74	3,56	8,27
Kegiatan Utama			
Tidak ada kegiatan	3,36	2,78	3,07
Bekerja	65,40	74,45	69,94
Sekolah	1,39	0,27	0,83
Mengurus Rumah tangga	27,97	21,38	24,67
Lainnya	1,87	1,12	1,49

Tabel 2.2 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,94	65,06	39,28	60,72	38,08	61,92
Sumatera Utara	38,09	61,91	44,21	55,79	41,24	58,76
Sumatera Barat	31,90	68,10	35,39	64,61	34,05	65,95
Riau	48,08	51,92	54,05	45,95	51,75	48,25
Jambi	42,49	57,51	53,10	46,90	49,98	50,02
Sumatera Selatan	36,51	63,49	62,61	37,39	53,67	46,33
Bengkulu	47,06	52,94	56,83	43,17	53,82	46,18
Lampung	53,22	46,78	56,62	43,38	55,78	44,22
Kep. Bangka Belitung	40,75	59,25	47,66	52,34	44,20	55,80
Kepulauan Riau	45,36	54,64	48,76	51,24	45,88	54,12
DKI Jakarta	42,36	57,64	-	-	42,36	57,64
Jawa Barat	37,90	62,10	38,86	61,14	38,24	61,76
Jawa Tengah	43,21	56,79	45,01	54,99	44,21	55,79
DI Yogyakarta	45,81	54,19	49,04	50,96	46,84	53,16
Jawa Timur	43,51	56,49	48,96	51,04	46,43	53,57
Banten	45,56	54,44	38,31	61,69	43,38	56,62
Bali	53,98	46,02	61,16	38,84	56,72	43,28
Nusa Tenggara Barat	42,41	57,59	47,69	52,31	45,48	54,52
Nusa Tenggara Timur	45,96	54,04	57,67	42,33	55,38	44,62
Kalimantan Barat	43,53	56,47	57,42	42,58	53,31	46,69
Kalimantan Tengah	49,88	50,12	56,16	43,84	54,04	45,96
Kalimantan Selatan	37,68	62,32	46,12	53,88	42,60	57,40
Kalimantan Timur	40,48	59,52	52,57	47,43	45,10	54,90
Sulawesi Utara	37,23	62,77	38,93	61,07	38,16	61,84
Sulawesi Tengah	43,33	56,67	54,60	45,40	51,86	48,14
Sulawesi Selatan	34,55	65,45	40,11	59,89	38,10	61,90
Sulawesi Tenggara	35,68	64,32	46,52	53,48	43,47	56,53
Gorontalo	37,81	62,19	42,03	57,97	40,57	59,43
Sulawesi Barat	39,99	60,01	49,33	50,67	47,28	52,72
Maluku	36,60	63,40	52,84	47,16	46,25	53,75
Maluku Utara	41,89	58,11	61,27	38,73	55,88	44,12
Papua Barat	38,58	61,42	58,05	41,95	52,26	47,74
Papua	56,96	43,04	83,77	16,23	77,09	22,91
Indonesia	41,61	58,39	48,04	51,96	44,84	55,16

Tabel 2.3 Persentase Responden Berdasarkan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami	Kepala Rumah Tangga	Istri/Suami
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,93	45,07	60,74	39,26	59,12	40,88
Sumatera Utara	54,18	45,82	61,11	38,89	57,74	42,26
Sumatera Barat	48,15	51,85	50,44	49,56	49,56	50,44
Riau	62,12	37,88	63,85	36,15	63,19	36,81
Jambi	54,93	45,07	65,66	34,34	62,50	37,50
Sumatera Selatan	50,57	49,43	73,37	26,63	65,56	34,44
Bengkulu	62,65	37,35	67,78	32,22	66,20	33,80
Lampung	64,86	35,14	66,24	33,76	65,90	34,10
Kep. Bangka Belitung	54,51	45,49	58,62	41,38	56,56	43,44
Kepulauan Riau	57,20	42,80	57,33	42,67	57,22	42,78
DKI Jakarta	57,67	42,33	-	-	57,67	42,33
Jawa Barat	52,82	47,18	53,24	46,76	52,97	47,03
Jawa Tengah	61,77	38,23	58,68	41,32	60,07	39,93
DI Yogyakarta	62,65	37,35	65,20	34,80	63,46	36,54
Jawa Timur	59,94	40,06	66,14	33,86	63,26	36,74
Banten	56,90	43,10	52,66	47,34	55,62	44,38
Bali	64,23	35,77	69,87	30,13	66,38	33,62
Nusa Tenggara Barat	66,16	33,84	68,57	31,43	67,56	32,44
Nusa Tenggara Timur	61,62	38,38	73,63	26,37	71,28	28,72
Kalimantan Barat	59,17	40,83	68,42	31,58	65,68	34,32
Kalimantan Tengah	60,74	39,26	65,85	34,15	64,13	35,87
Kalimantan Selatan	51,95	48,05	61,07	38,93	57,27	42,73
Kalimantan Timur	51,26	48,74	60,41	39,59	54,75	45,25
Sulawesi Utara	55,14	44,86	49,02	50,98	51,79	48,21
Sulawesi Tengah	58,31	41,69	63,43	36,57	62,19	37,81
Sulawesi Selatan	54,78	45,22	57,01	42,99	56,20	43,80
Sulawesi Tenggara	59,26	40,74	62,95	37,05	61,91	38,09
Gorontalo	53,34	46,66	51,21	48,79	51,94	48,06
Sulawesi Barat	54,86	45,14	64,63	35,37	62,48	37,52
Maluku	55,39	44,61	67,22	32,78	62,42	37,58
Maluku Utara	59,83	40,17	70,92	29,08	67,84	32,16
Papua Barat	52,09	47,91	69,33	30,67	64,20	35,80
Papua	71,46	28,54	90,80	9,20	85,98	14,02
Indonesia	57,21	42,79	62,28	37,72	59,76	40,24

Tabel 2.4 Persentase Responden Berdasarkan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Kepala Rumah Tangga		Istri/Suami	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,05	21,07	0,02	40,86
Sumatera Utara	41,23	16,52	0,01	42,24
Sumatera Barat	34,03	15,53	0,02	50,42
Riau	51,71	11,48	0,04	36,77
Jambi	49,98	12,53	-	37,50
Sumatera Selatan	53,65	11,91	0,02	34,42
Bengkulu	53,82	12,38	-	33,80
Lampung	55,78	10,12	-	34,10
Kep. Bangka Belitung	44,08	12,48	0,12	43,31
Kepulauan Riau	45,88	11,34	-	42,78
DKI Jakarta	42,30	15,37	0,06	42,27
Jawa Barat	38,20	14,76	0,03	47,00
Jawa Tengah	44,16	15,91	0,05	39,88
DI Yogyakarta	46,84	16,62	-	36,54
Jawa Timur	46,40	16,86	0,03	36,71
Banten	43,24	12,38	0,14	44,24
Bali	56,72	9,66	-	33,62
Nusa Tenggara Barat	45,33	22,23	0,15	32,29
Nusa Tenggara Timur	55,35	15,93	0,02	28,70
Kalimantan Barat	53,31	12,37	-	34,32
Kalimantan Tengah	53,88	10,26	0,17	35,70
Kalimantan Selatan	42,39	14,87	0,20	42,53
Kalimantan Timur	44,90	9,85	0,20	45,05
Sulawesi Utara	37,87	13,92	0,29	47,92
Sulawesi Tengah	51,86	10,32	-	37,81
Sulawesi Selatan	38,10	18,10	-	43,80
Sulawesi Tenggara	43,29	18,63	0,18	37,91
Gorontalo	40,45	11,49	0,12	47,94
Sulawesi Barat	47,13	15,35	0,15	37,37
Maluku	46,10	16,32	0,15	37,42
Maluku Utara	55,83	12,02	0,06	32,10
Papua Barat	52,15	12,05	0,11	35,69
Papua	76,94	9,05	0,15	13,87
Indonesia	44,79	14,97	0,05	40,20

Tabel 2.5 Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan Menurut Provinsi

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,13	75,74	2,91	19,21
Sumatera Utara	2,09	79,31	2,59	16,01
Sumatera Barat	2,24	80,48	5,17	12,11
Riau	4,61	83,92	2,46	9,01
Jambi	1,35	84,21	2,40	12,03
Sumatera Selatan	1,73	85,00	2,05	11,23
Bengkulu	2,41	84,13	2,40	11,06
Lampung	1,46	86,51	1,42	10,61
Kep. Bangka Belitung	2,66	80,64	4,01	12,70
Kepulauan Riau	9,54	82,10	2,85	5,51
DKI Jakarta	4,90	79,11	3,57	12,41
Jawa Barat	2,25	81,80	3,78	12,17
Jawa Tengah	1,92	80,94	2,63	14,50
DI Yogyakarta	8,92	75,79	2,70	12,59
Jawa Timur	2,22	80,18	2,92	14,68
Banten	1,90	84,45	3,32	10,33
Bali	6,27	85,67	1,62	6,44
Nusa Tenggara Barat	2,69	80,79	3,48	13,05
Nusa Tenggara Timur	4,00	81,52	1,94	12,54
Kalimantan Barat	2,91	83,55	2,35	11,19
Kalimantan Tengah	3,50	84,49	3,25	8,76
Kalimantan Selatan	3,46	80,36	3,50	12,68
Kalimantan Timur	3,51	83,98	3,67	8,84
Sulawesi Utara	4,27	80,78	1,59	13,36
Sulawesi Tengah	2,65	85,73	2,59	9,03
Sulawesi Selatan	5,24	77,21	3,86	13,70
Sulawesi Tenggara	4,64	78,44	4,07	12,84
Gorontalo	3,26	85,25	2,13	9,36
Sulawesi Barat	3,97	80,87	4,09	11,07
Maluku	3,13	78,38	2,75	15,74
Maluku Utara	4,12	82,07	2,66	11,15
Papua Barat	4,65	81,21	3,81	10,33
Papua	3,84	84,54	2,08	9,54
Indonesia	2,81	81,39	3,02	12,78

Tabel 2.6 Persentase Responden Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Provinsi

Provinsi	<20	20-24	25-39	40-49	50-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,14	2,57	31,04	29,54	18,75	17,96
Sumatera Utara	0,26	2,00	30,12	26,97	22,16	18,49
Sumatera Barat	0,11	2,55	29,95	25,22	22,94	19,23
Riau	0,92	4,71	38,35	27,44	17,00	11,59
Jambi	0,04	2,70	34,59	25,86	19,93	16,88
Sumatera Selatan	0,27	2,70	34,82	25,90	19,05	17,27
Bengkulu	0,84	3,16	37,35	23,33	21,42	13,91
Lampung	0,31	2,51	33,23	26,00	19,71	18,25
Kep. Bangka Belitung	0,44	2,98	36,50	23,85	18,81	17,42
Kepulauan Riau	0,05	5,40	45,98	25,05	14,24	9,30
DKI Jakarta	0,14	3,00	31,61	28,57	20,93	15,74
Jawa Barat	0,43	3,48	30,78	26,71	20,37	18,23
Jawa Tengah	0,33	1,70	24,96	26,13	23,75	23,13
DI Yogyakarta	1,35	5,47	21,88	23,60	23,20	24,51
Jawa Timur	0,48	1,39	24,16	27,01	24,07	22,90
Banten	0,06	2,98	35,92	27,22	19,73	14,10
Bali	0,36	3,73	31,08	28,65	19,03	17,14
Nusa Tenggara Barat	0,84	6,38	32,58	24,09	18,61	17,50
Nusa Tenggara Timur	0,22	1,87	28,70	27,23	22,03	19,94
Kalimantan Barat	0,38	2,61	33,58	27,54	22,02	13,87
Kalimantan Tengah	0,67	3,73	37,46	28,14	17,90	12,09
Kalimantan Selatan	0,90	3,89	35,78	26,39	18,68	14,36
Kalimantan Timur	0,22	2,77	35,91	29,50	19,82	11,78
Sulawesi Utara	1,18	2,55	25,53	26,90	22,64	21,19
Sulawesi Tengah	0,44	2,76	33,65	26,43	21,38	15,34
Sulawesi Selatan	0,85	3,16	28,80	27,15	18,95	21,09
Sulawesi Tenggara	0,57	3,71	35,98	22,89	18,42	18,43
Gorontalo	0,88	4,29	33,69	29,70	17,32	14,12
Sulawesi Barat	0,28	3,38	32,55	27,20	18,65	17,93
Maluku	0,46	1,77	31,12	27,14	22,41	17,10
Maluku Utara	0,68	2,75	36,22	27,01	18,10	15,23
Papua Barat	0,45	4,74	44,00	23,31	18,99	8,52
Papua	0,61	3,54	45,49	28,78	15,46	6,13
Indonesia	0,43	2,74	30,05	26,73	21,24	18,81

Tabel 2.7 Persentase Responden Berdasarkan Ijazah yang Dimiliki Menurut Provinsi

Provinsi	Tidak Punya Ijazah SD	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	14,22	30,59	20,01	25,20	9,98
Sumatera Utara	15,59	26,78	19,99	28,68	8,96
Sumatera Barat	24,71	23,30	17,39	24,05	10,55
Riau	17,50	28,60	19,01	25,77	9,13
Jambi	21,24	32,61	17,15	22,72	6,29
Sumatera Selatan	21,11	35,67	16,89	19,92	6,40
Bengkulu	21,21	28,19	16,97	23,84	9,79
Lampung	22,70	34,14	20,08	18,37	4,71
Kep. Bangka Belitung	26,72	33,99	13,52	18,42	7,35
Kepulauan Riau	13,49	17,15	16,07	41,53	11,76
DKI Jakarta	7,49	18,07	17,78	39,03	17,63
Jawa Barat	18,55	38,23	15,89	19,75	7,57
Jawa Tengah	24,54	36,76	15,94	16,58	6,18
DI Yogyakarta	12,12	24,22	16,76	32,54	14,36
Jawa Timur	24,78	33,92	15,90	19,07	6,32
Banten	22,08	27,16	15,94	23,90	10,93
Bali	15,00	24,48	16,48	31,87	12,17
Nusa Tenggara Barat	26,51	29,37	16,65	19,31	8,17
Nusa Tenggara Timur	27,34	35,95	11,37	18,24	7,10
Kalimantan Barat	26,36	31,43	15,78	19,43	6,99
Kalimantan Tengah	17,71	34,89	18,72	21,79	6,89
Kalimantan Selatan	25,07	32,28	15,05	19,76	7,85
Kalimantan Timur	13,00	25,89	19,84	31,65	9,63
Sulawesi Utara	19,23	21,62	20,15	31,26	7,74
Sulawesi Tengah	19,36	36,70	15,74	20,43	7,77
Sulawesi Selatan	23,87	29,15	15,56	20,97	10,44
Sulawesi Tenggara	19,58	30,02	16,39	23,32	10,69
Gorontalo	31,67	27,99	14,76	18,68	6,90
Sulawesi Barat	27,01	33,53	13,34	17,24	8,88
Maluku	15,83	28,08	15,48	28,41	12,20
Maluku Utara	21,40	32,96	14,46	23,45	7,74
Papua Barat	16,87	25,26	17,48	27,60	12,79
Papua	13,91	33,00	17,86	25,84	9,40
Indonesia	20,65	32,34	16,63	22,11	8,27

Tabel 2.8 Persentase Responden Berdasarkan Kegiatan Utama Menurut Provinsi

Provinsi	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Tidak Ada Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	66,63	0,71	26,86	0,89	4,92
Sumatera Utara	70,14	0,81	24,39	1,14	3,52
Sumatera Barat	69,61	0,96	25,55	0,62	3,25
Riau	70,64	1,42	25,44	0,91	1,59
Jambi	77,07	0,29	18,43	0,99	3,21
Sumatera Selatan	77,23	0,82	17,75	1,21	3,00
Bengkulu	76,42	1,93	17,33	1,57	2,75
Lampung	75,85	0,70	19,85	1,17	2,43
Kep. Bangka Belitung	66,68	0,12	28,56	1,37	3,27
Kepulauan Riau	72,93	0,30	23,36	1,20	2,22
DKI Jakarta	64,14	0,80	28,30	3,68	3,08
Jawa Barat	61,23	0,65	32,18	2,18	3,76
Jawa Tengah	71,98	0,65	23,06	1,66	2,66
DI Yogyakarta	72,63	5,14	19,75	1,75	0,73
Jawa Timur	72,90	0,57	22,67	0,93	2,94
Banten	64,47	0,24	29,29	1,36	4,64
Bali	83,94	0,60	13,38	0,88	1,20
Nusa Tenggara Barat	72,77	1,50	20,90	1,58	3,25
Nusa Tenggara Timur	81,84	0,88	13,96	0,84	2,49
Kalimantan Barat	78,28	0,73	16,64	1,33	3,02
Kalimantan Tengah	78,86	0,57	18,19	0,63	1,75
Kalimantan Selatan	70,31	1,10	24,43	1,26	2,89
Kalimantan Timur	65,19	0,69	28,67	2,74	2,70
Sulawesi Utara	62,81	1,88	30,82	1,81	2,68
Sulawesi Tengah	73,23	1,20	21,18	1,08	3,30
Sulawesi Selatan	64,77	1,54	29,00	1,16	3,53
Sulawesi Tenggara	70,91	1,85	24,06	0,14	3,03
Gorontalo	70,14	1,60	24,80	0,42	3,04
Sulawesi Barat	78,52	0,09	17,66	0,50	3,22
Maluku	71,85	1,37	23,39	1,69	1,70
Maluku Utara	75,83	2,04	19,30	0,93	1,89
Papua Barat	78,34	0,37	17,11	1,22	2,95
Papua	90,99	0,49	6,97	0,45	1,09
Indonesia	69,94	0,83	24,67	1,49	3,07

3

PENGELOLAAN AIR



BAB III

PENGELOLAAN AIR

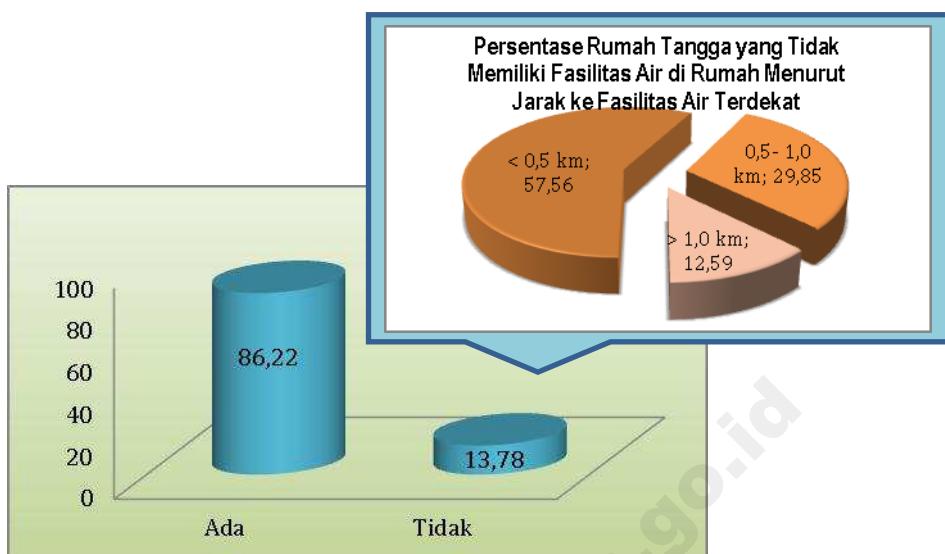
Ketersediaan sumber daya air di permukaan bumi terbatas jumlahnya. Meskipun 71 persen permukaan bumi adalah air, tetapi hanya sekitar 2,5 persen yang merupakan air tawar sedangkan sisanya merupakan air laut yang mengandung garam. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 1 persen yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara langsung atau sekitar 30 persen dari total persediaan air tawar. Ketersediaan air yang sangat terbatas tersebut mengharuskan pemanfaatan air secara efisien dan bijaksana.

3.1 Ketersediaan Fasilitas Air

Beberapa tahun terakhir, keterbatasan sumber air di bumi semakin terasa terutama di kota-kota besar. Pada musim kemarau misalnya, di beberapa daerah akan kekurangan air atau bahkan mengalami kelangkaan air. Hal ini berarti bahwa cadangan sumber daya air semakin menurun. Bertambahnya jumlah penduduk juga akan mengakibatkan cadangan sumber daya air akan menurun jika tidak diikuti dengan revitalisasi sumber daya air, karena konsumsi air akan meningkat. Kekurangan air akan berdampak buruk terhadap aktivitas rumah tangga bahkan akan mengancam kehidupan setiap individu didalamnya. Sumber air yang terjangkau dan memadai sangat penting untuk mempermudah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan air.

Keberadaan sumber air di area tempat tinggal penduduk/rumah tangga ditandai dengan adanya fasilitas air antara lain seperti adanya sumur, pompa air, leding, atau saluran-saluran air dari mata air yang disalurkan sampai ke rumah. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air untuk minum/masak/mandi/cuci di rumah dapat dilihat pada Grafik 3.1.

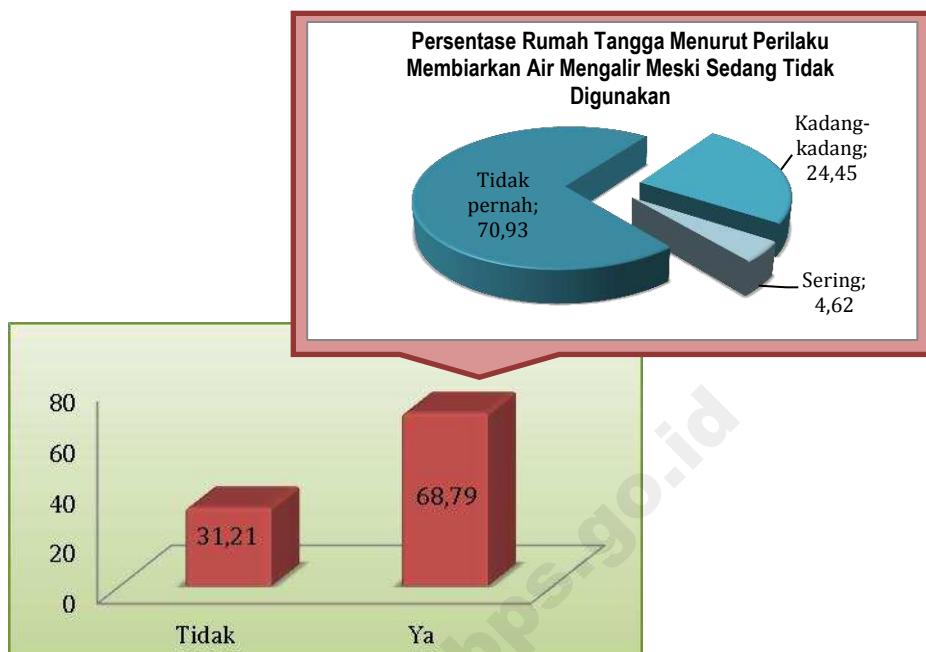
Grafik 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Fasilitas Air untuk Minum/Masak/Mandi/Cuci di Rumah dan Jarak ke Fasilitas Air Terdekat



Sebanyak 86,22 persen rumah tangga memiliki fasilitas air di rumah yang digunakan untuk minum/masak/mandi/cuci, sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air sebanyak 13,78 persen. Rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air di rumahnya harus mengambil air di fasilitas air terdekat. Tercatat sebanyak 57,56 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air di rumah harus menempuh jarak kurang dari 0,5 km untuk memperoleh air; 29,85 persen rumah tangga harus menempuh jarak 0,5–1,0 km untuk memperoleh air; dan 12,59 persen rumah tangga harus menempuh jarak lebih dari 1 km untuk memperoleh air. Jika dilihat berdasarkan provinsi, sebanyak 20,09 persen rumah tangga di Provinsi Papua harus menempuh jarak lebih dari 1 km untuk mengambil air ke fasilitas air terdekat (Tabel 3.4).

Dari sebanyak 86,22 persen rumah tangga yang terdapat fasilitas air di rumahnya, sebanyak 68,79 persen menggunakan instalasi air berupa pipa/selang untuk mengalirkan air dan sisanya sebanyak 31,21 persen tidak menggunakan pipa/selang (Grafik 3.2). Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan instalasi pipa/selang untuk mengalirkan air (87,11 persen), sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang menggunakan pipa/selang (27,35 persen) (Tabel 3.5).

Grafik 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Instalasi Air Pipa/Selang di Rumah dan Perilaku Membiarkan Air Mengalir Meski Sedang Tidak Digunakan



Implementasi perilaku hemat air yang dapat dilakukan oleh rumah tangga diantaranya adalah dengan tidak membiarkan air mengalir tanpa digunakan, mencuci peralatan dengan air ditampung, memanfaatkan air bekas, dan menginvestasikan peralatan yang dapat menghemat air seperti menggunakan *shower* atau pancuran untuk mandi dan menggunakan kloset toilet yang dilengkapi *flush*. Selain itu memeriksa keran-keran air yang bocor lalu segera menggantinya juga merupakan upaya untuk penghematan air. Membiarkan air mengalir dengan percuma meskipun dikarenakan kebocoran pipa merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap air.

Pada Grafik 3.2 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang tidak pernah membiarkan air pipa/selang mengalir tanpa digunakan tercatat sebanyak 70,93 persen. Sedangkan rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang membiarkan air pipa/selang mengalir tanpa digunakan tercatat sekitar 24,45 persen, dan sisanya sebesar 4,62 persen menyatakan sering membiarkan air pipa/selang mengalir tanpa digunakan. Rumah tangga di Provinsi Bali lebih ramah dalam hal tidak pernah membiarkan air pipa/selang mengalir tanpa digunakan yaitu mencapai 84,86 persen, diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,89 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,76 persen (Tabel 3.5).

3.2. Sumber Air Minum

Rumah tangga sebagai salah satu pengguna air sangat membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari tabel terlihat bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan air bersih (air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung). Untuk keperluan minum, sebanyak 86,57 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih dengan jenis air yang paling banyak dikonsumsi adalah air isi ulang (20,55 persen) dan air dari sumur terlindung (20,21 persen). Untuk keperluan memasak, sebanyak 83,24 persen rumah tangga menggunakan air bersih dengan sumber air yang paling banyak digunakan adalah sumur bor/pompa (25,56 persen) dan sumur terlindung (24,75 persen). Sementara sumber air yang digunakan untuk mandi/cuci sebagian besar rumah tangga menggunakan air yang bersumber dari sumur bor/pompa dan sumur terlindung.

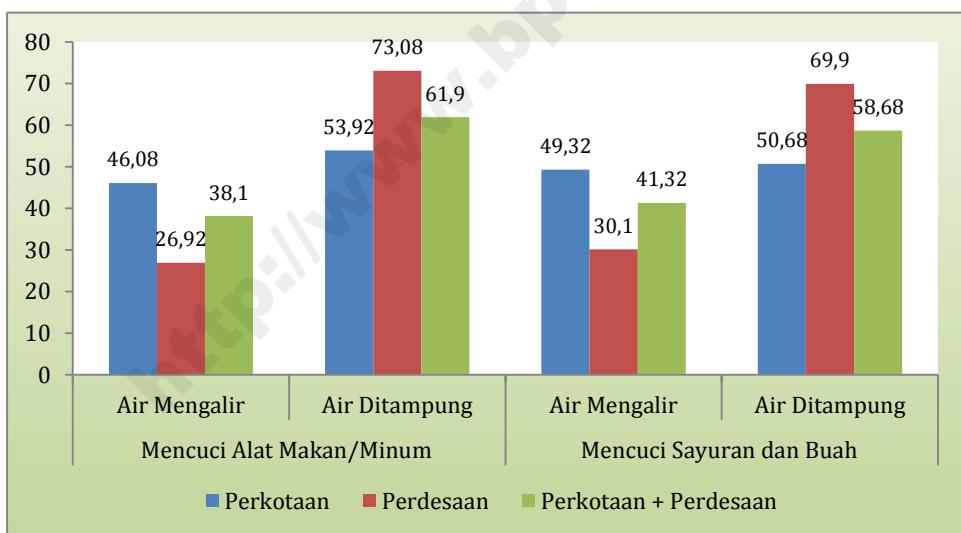
Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Keperluan Sehari-hari Rumah Tangga

Sumber Air Utama	Jenis Keperluan Sehari-hari (%)		
	Minum	Masak	Mandi/Cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Bersih	86,57	83,24	81,51
a. Air Kemasan Bermerk	9,30	0,89	-
b. Air Isi Ulang	20,55	4,15	-
c. Leding Meteran	8,51	14,78	14,82
d. Leding Eceran	1,71	2,77	1,48
e. Sumur bor/pompa	16,46	25,56	29,60
f. Sumur Terlindung	20,21	24,75	26,00
g. Mata Air Terlindung	9,84	10,33	9,62
Air Tidak Bersih	13,43	15,28	18,49
h. Sumur Tak Terlindung	5,71	6,54	7,50
i. Mata Air Tak Terlindung	3,44	3,52	3,36
j. Air Sungai	2,04	2,41	6,44
k. Air Hujan	2,10	2,53	0,65
l. Lainnya	0,14	0,29	0,54

3.3 Perilaku Penggunaan Air Saat Mencuci

Perilaku penghematan penggunaan air juga dapat dilakukan pada waktu mencuci pakaian, mencuci alat makan/minum ataupun mencuci sayuran/buah. Untuk perilaku mencuci alat makan/minum dan mencuci sayuran/buah, persentase rumah tangga yang menggunakan air ditampung lebih tinggi daripada yang menggunakan air mengalir dari pipa/selang yaitu sebesar 61,90 persen pada saat mencuci alat makan/minum dan 58,68 persen pada saat mencuci sayuran/buah (Grafik 3.3). Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak menggunakan air ditampung dari pada rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan (Tabel 3.6). Cara mencuci dengan menggunakan air yang ditampung terlebih dahulu dalam suatu wadah (ember, baskom, dll) relatif lebih menghemat air, karena volume air yang digunakan akan lebih terkontrol daripada menggunakan air mengalir dari pipa/selang.

Grafik 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Alat Makan/Minum dan Sayuran/Buah



Untuk perilaku mencuci pakaian, perilaku penghematan penggunaan air dapat dilihat dari kebiasaan rumah tangga dalam membilas cucian pakaian, karena penggunaan air terbanyak yaitu pada tahap pembilasan cucian pakaian. Bagi rumah tangga yang memiliki mesin cuci, mencuci dan membilas dengan menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan akan lebih menghemat penggunaan air dibandingkan mesin cuci satu/dua tabung bukaan atas, dengan demikian mesin cuci satu tabung bukaan depan merupakan salah satu investasi peralatan yang dapat menghemat air. Hasil survei menunjukkan sebanyak 19,11

persen rumah tangga membilas pakaian menggunakan mesin cuci. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 3,00 persen rumah tangga yang menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan (Tabel 3.8). Persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 9,94 persen, diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,04 persen, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,99 persen. Sebanyak 74,86 persen rumah tangga tidak menggunakan mesin cuci untuk membilas cucian pakaian. Dari jumlah tersebut hanya 26,90 persen yang menggunakan air ditampung ≤ 2 kali bilas dari total seluruh rumah tangga. Mencuci dengan menggunakan air ditampung akan lebih hemat jika dibanding dengan air mengalir. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk daerah perdesaan lebih banyak mencuci pakaian tanpa mesin cuci yaitu sebanyak 82,79 persen sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 66,88 persen (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Membilas Pakaian dan Daerah Tempat Tinggal

Cara Membilas Pakaian	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dengan mesin cuci			
Mesin cuci satu tabung bukaan depan	29,78	8,51	19,11
Mesin cuci satu/dua tabung bukaan atas	4,98	1,04	3,00
Tanpa Mesin Cuci			
Air ditampung ≤ 2 kali bilas	24,80	7,48	16,11
Air ditampung > 2 kali bilas	66,88	82,79	74,86
Air mengalir	23,85	29,93	26,90
Tidak mencuci pakaian di rumah	36,13	42,27	39,21
	6,90	10,59	8,75
	3,34	8,70	6,03

3.4. Pemanfaatan Air Bekas

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2011 tentang pedoman penggunaan sumber daya air, diantaranya mengatur mengenai pemanfaatan air bekas pakai (*greywater*). *Greywater* merupakan sisa air pembuangan yang biasanya berasal dari air bekas cucian, mandi, atau cuci piring. Contoh penggunaan air bekas adalah air bekas cucian bahan makanan/sayuran/buah untuk menyiram tanaman dan lainnya. Setidaknya 50-80 persen air yang dibuang adalah air yang berasal dari bekas cucian (pakaian dan piring) dan air bekas mandi, sehingga jika air tersebut bisa digunakan kembali, merupakan suatu bentuk penghematan penggunaan air sekaligus juga penghematan dalam pembayaran biaya penggunaan air (www.keiben.com).

Grafik 3.4. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain Menurut Daerah Tempat Tinggal



Grafik 3.4 menunjukkan bahwa sebanyak 78,77 persen rumah tangga menyatakan tidak pernah memanfaatkan air bekas, 15,84 persen rumah tangga menyatakan kadang-kadang memanfaatkan air bekas, dan hanya 5,39 persen rumah tangga yang sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain. Dilihat dari daerah tempat tinggal, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, kebiasaan rumah tangga dalam memanfaatkan air bekas masih sangat kurang. Persentase rumah tangga yang menyatakan kadang-kadang atau sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain tercatat sebesar 21,60 persen di perkotaan dan 20,86 persen di perdesaan. Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 26,91 persen (Tabel 3.9). Hal ini menunjukkan perilaku masyarakat di provinsi tersebut sudah lebih ramah terhadap penggunaan air, walaupun tidak diketahui apakah karena alasan perilaku peduli lingkungan atau karena keterbatasan pasokan air sehingga terpaksa menggunakan air bekas.

3.5. Keberadaan Tanaman di Rumah

Keberadaan tanaman sangat penting untuk konservasi sumber daya air. Tanaman atau pohon sangat membantu dalam penyediaan udara segar dan membantu penyerapan air ke dalam tanah. Satu pohon dewasa dapat menghasilkan kira-kira 260 pon oksigen tiap tahun yang setara dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 2 orang per tahun (www.savatrre.com/tree-facts). Selain untuk membuat rindang dan asri halaman rumah

keberadaan tanaman keras atau tanaman tahunan di pekarangan rumah juga dapat membantu penyerapan air khususnya air hujan sehingga penyediaan air tanah terjamin.

Pada Tabel 3.10 menunjukkan persentase rumah tangga yang mempunyai tanaman di rumah mencapai 59,72 persen. Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang mempunyai tanaman di rumah/pekarangan yaitu sebesar 33,19 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang memiliki tanaman di rumah/pekarangan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di perkotaan yaitu sebesar 67,02 persen berbanding 52,36 persen. Hal ini dimungkinkan karena rumah tangga di perkotaan khususnya DKI Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanam tanaman di pekarangannya. Sementara rumah tangga yang memiliki tanaman keras yang langsung di tanam di tanah (bukan di pot/drum) tercatat sebesar 45,98 persen (Tabel 3.11). Persentase rumah tangga yang memiliki tanaman keras yang ditanam di tanah di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di daerah perkotaan yaitu 56,21 persen berbanding 35,69 persen.

3.6. Keberadaan Area Resapan Air

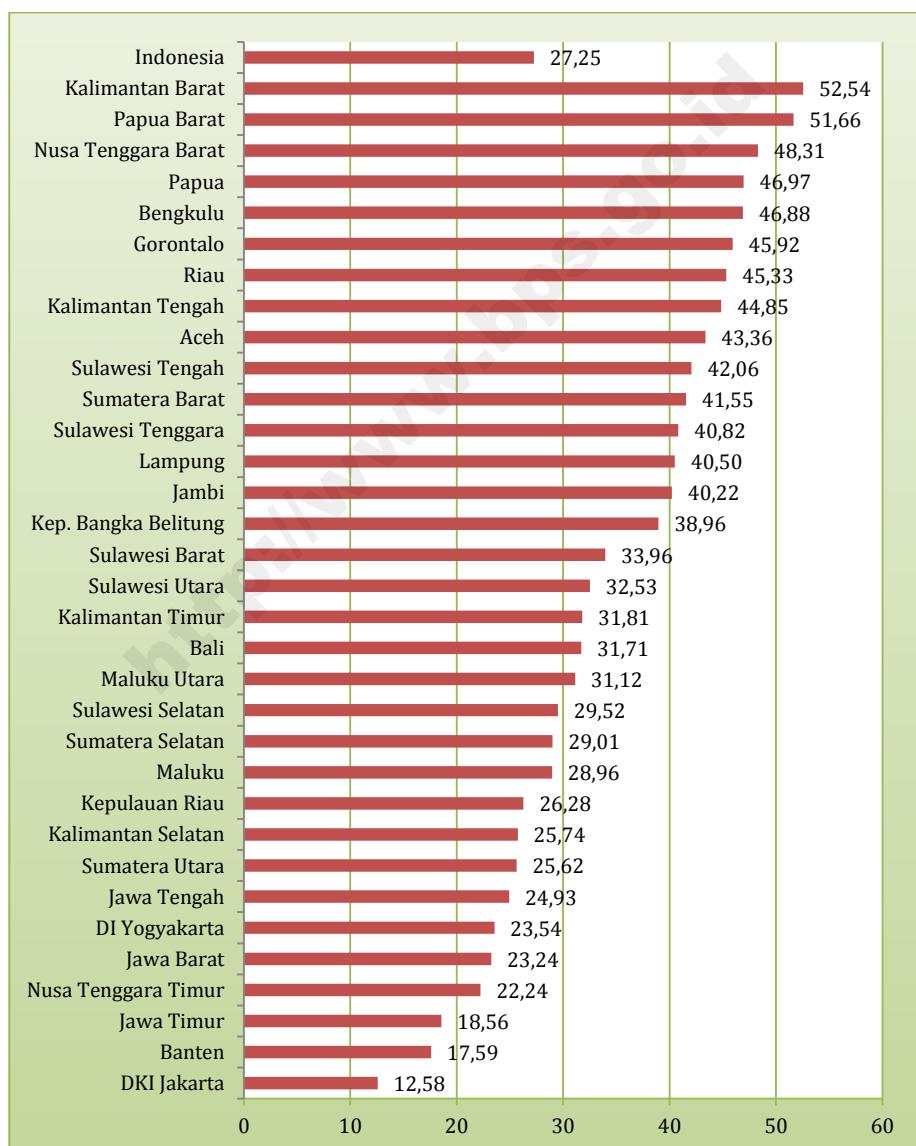
Kebutuhan rumah tangga terhadap air cukup banyak, maka rumah tangga juga perlu melakukan konservasi sumber daya air. Salah satu bentuk kepedulian terhadap sumber daya air yang dapat dilakukan dalam skala kecil oleh rumah tangga adalah dengan menyediakan area resapan air. Area resapan air memiliki fungsi sebagai penampung dan penahan air hujan baik yang melalui atap rumah maupun yang langsung ke tanah, sehingga air hujan tidak langsung terbuang ke saluran air, namun meresap kembali ke tanah sebagai sumber air bersih.

Grafik 3.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Area Resapan Air



Keberadaan area resapan air dan tanaman sangat penting untuk konservasi sumber daya air. Persentase rumah tangga yang mempunyai area resapan air (minimal ada 1 jenis area resapan air, baik sumur resapan, lubang resapan biopori, atau taman/tanah berumput) hanya sebesar 27,25 persen (Grafik 3.5). Persentase rumah tangga dengan keberadaan area resapan air di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 32,67 persen berbanding 21,79 persen (Grafik 3.5). Hal tersebut dimungkinkan karena rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan pada umumnya memiliki lahan pekarangan yang masih luas dan wilayah permukiman penduduk tidak sepadat di wilayah perkotaan.

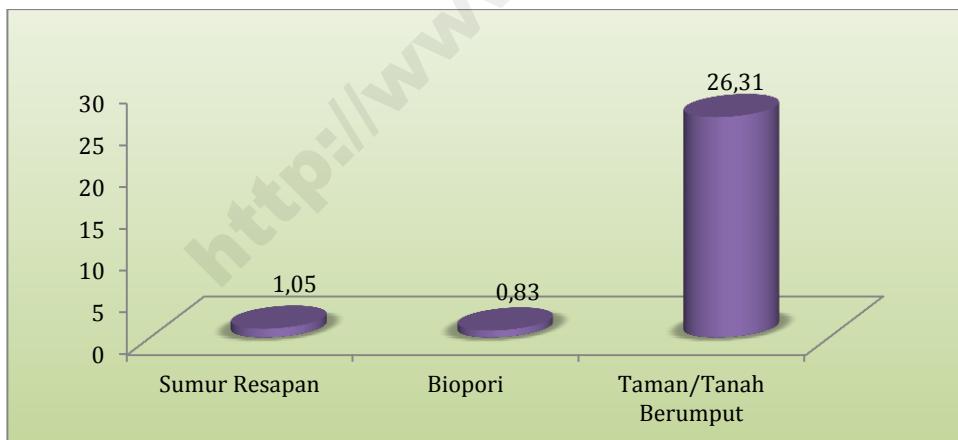
Grafik 3.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Provinsi



Jika dilihat menurut provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang memiliki area resapan air yaitu sebesar 12,58 persen (Grafik 3.6). Terbatasnya area lahan tempat tinggal yang dimiliki sebagian besar masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan area resapan untuk air tanah menjadi sulit disediakan warga.

Pada umumnya perencanaan bangunan kurang memperhatikan aspek lingkungan khususnya area resapan air. Lahan-lahan yang tidak terpakai untuk bangunan, khususnya di wilayah perkotaan, biasanya diperkeras dengan cara dipleset atau *paving block*, sehingga ketika musim hujan banyak lahan-lahan yang tergenang air atau bahkan terjadi banjir akibat berkurangnya lahan yang dapat menyerap air ke dalam tanah. Sedangkan pada musim kemarau, cadangan air di dalam tanah semakin berkurang karena tidak ada air yang meresap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan kekeringan atau kekurangan sumber air khususnya air tanah. Sumur resapan dan lubang resapan biopori merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sumur resapan dan lubang resapan biopori dapat meresapkan air hujan ke dalam tanah yang menjadi cadangan air tanah, dan juga mencegah banjir.

Grafik 3.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Area Resapan Air Menurut Jenis Area Resapan Air

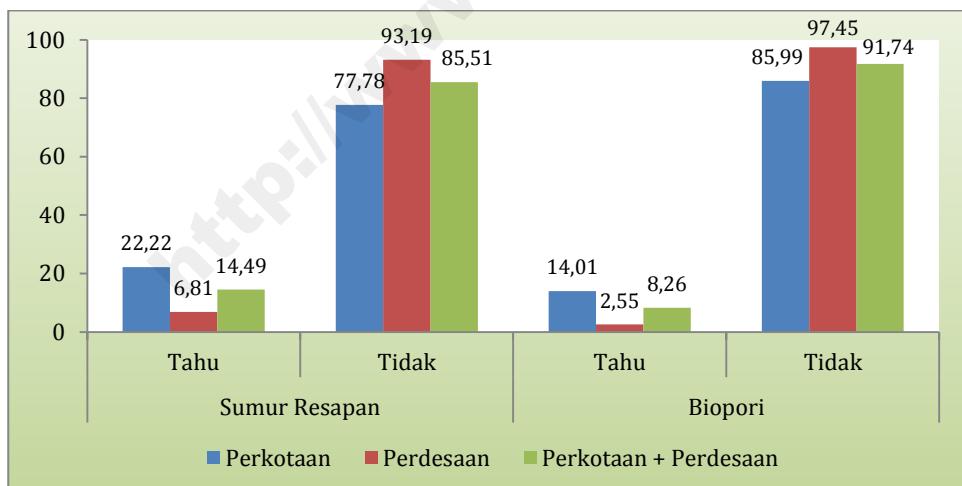


Jenis area resapan air yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga adalah taman/tanah berumput yaitu sekitar 26,31 persen. Keberadaan taman/tanah berumput selain berguna untuk memperindah rumah/pekarangan juga dapat berfungsi menjadi area resapan air. Sementara rumah tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang biopori masih sangat sedikit yaitu masing-masing hanya sekitar 1,05 persen dan 0,83 persen (Grafik 3.7). Jika dilihat menurut provinsi pada Tabel. 3.13 persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki

sumur resapan adalah di Provinsi DI Yogyakarta (7,33 persen), diikuti Provinsi DKI Jakarta (2,65 persen). Sementara persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki lubang resapan biopori (Tabel 3.15) terdapat terdapat di Provinsi DKI Jakarta (2,83 persen), diikuti Provinsi DI Yogyakarta (2,81 persen), Banten (2,19 persen), dan Jawa Barat (2,03 persen).

Masih terbatasnya persentase rumah tangga yang memiliki sumur resapan dan lubang resapan biopori dimungkinkan karena rumah tangga belum menyadari pentingnya keberadaan sumur resapan dan lubang resapan biopori. Disamping itu masih banyak juga rumah tangga yang tidak mengetahui apa itu sumur resapan dan lubang resapan biopori. Sebanyak 85,51 persen rumah tangga tidak mengetahui/mendengar mengenai sumur resapan dan 91,74 persen rumah tangga tidak mengetahui/mendengar mengenai luang biopori (Grafik 3.8). Persentase rumah tangga yang mengetahui/mendengar mengenai sumur resapan atau lubang biopori di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 22,22 persen berbanding 6,81 persen untuk sumur resapan dan 14,01 persen berbanding 2,55 persen untuk lubang resapan biopori (Grafik 3.8).

Grafik 3.8. Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui/Mendengar Mengenai Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori



Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Air untuk Minum/Masak/Mandi/Cuci di Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,47	87,81	89,67
Sumatera Utara	96,57	72,42	84,14
Sumatera Barat	93,37	75,66	82,45
Riau	94,34	83,39	87,60
Jambi	92,48	85,39	87,48
Sumatera Selatan	88,48	72,24	77,80
Bengkulu	97,58	89,22	91,79
Lampung	87,12	87,58	87,46
Kep. Bangka Belitung	89,72	73,68	81,70
Kepulauan Riau	94,35	61,40	89,29
DKI Jakarta	96,06	-	96,06
Jawa Barat	92,06	81,04	88,18
Jawa Tengah	94,55	88,12	91,00
DI Yogyakarta	98,14	92,08	96,21
Jawa Timur	95,83	83,81	89,39
Banten	96,31	70,97	88,66
Bali	98,70	89,06	95,02
Nusa Tenggara Barat	87,04	68,07	76,01
Nusa Tenggara Timur	87,22	26,00	37,98
Kalimantan Barat	79,37	68,45	71,68
Kalimantan Tengah	91,55	72,63	79,00
Kalimantan Selatan	95,30	80,34	86,58
Kalimantan Timur	95,32	74,71	87,45
Sulawesi Utara	88,68	79,11	83,44
Sulawesi Tengah	91,24	75,71	79,48
Sulawesi Selatan	93,53	83,60	87,19
Sulawesi Tenggara	84,42	78,69	80,31
Gorontalo	89,72	63,34	72,46
Sulawesi Barat	85,86	75,74	77,96
Maluku	81,71	53,31	64,83
Maluku Utara	89,94	74,67	78,91
Papua Barat	95,42	68,80	76,72
Papua	93,85	29,87	45,81
Indonesia	93,78	78,72	86,22

Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Air di Rumah dan Jarak ke Fasilitas Air Terdekat Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan		
	< 0,5 km	0,5 – 1,0 km	> 1,0 km	< 0,5 km	0,5 – 1,0 km	> 1,0 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	51,77	36,91	11,32	49,20	31,60	19,20
Sumatera Utara	49,95	38,70	11,35	54,74	30,23	15,03
Sumatera Barat	37,70	28,41	33,89	67,40	23,79	8,81
Riau	65,74	24,69	9,57	43,48	35,06	21,46
Jambi	81,18	18,82	-	65,11	19,71	15,18
Sumatera Selatan	57,93	41,47	0,60	64,67	27,82	7,51
Bengkulu	52,38	47,62	-	53,91	43,88	2,20
Lampung	62,01	26,53	11,46	53,84	37,48	8,68
Kep. Bangka Belitung	61,41	34,27	4,32	90,09	8,14	1,77
Kepulauan Riau	85,41	13,64	0,94	68,70	13,91	17,39
DKI Jakarta	60,58	25,89	13,53	-	-	-
Jawa Barat	58,77	32,37	8,85	60,90	27,63	11,47
Jawa Tengah	48,36	29,93	21,72	51,87	29,02	19,11
DI Yogyakarta	56,24	22,00	21,76	54,40	45,60	-
Jawa Timur	55,66	36,56	7,78	56,23	30,09	13,68
Banten	19,49	58,78	21,73	54,17	32,85	12,99
Bali	57,35	42,65	-	53,26	37,82	8,93
Nusa Tenggara Barat	61,09	21,07	17,84	74,67	15,81	9,52
Nusa Tenggara Timur	70,31	16,77	12,92	57,42	29,39	13,20
Kalimantan Barat	76,45	23,55	-	50,31	33,87	15,82
Kalimantan Tengah	60,72	29,50	9,78	65,93	24,78	9,29
Kalimantan Selatan	57,57	29,98	12,45	66,49	24,87	8,64
Kalimantan Timur	59,44	40,56	-	58,52	32,42	9,07
Sulawesi Utara	87,62	7,37	5,01	69,42	26,37	4,21
Sulawesi Tengah	25,92	53,82	20,26	60,94	30,17	8,89
Sulawesi Selatan	81,35	16,84	1,81	57,52	27,56	14,91
Sulawesi Tenggara	70,82	17,77	11,41	68,89	22,88	8,24
Gorontalo	72,88	11,50	15,62	75,86	18,80	5,34
Sulawesi Barat	89,32	10,68	-	84,41	13,64	1,96
Maluku	75,81	17,19	7,00	70,01	14,03	15,96
Maluku Utara	34,21	44,18	21,61	54,87	27,90	17,23
Papua Barat	86,44	13,56	-	69,20	23,48	7,32
Papua	48,35	17,70	33,95	29,90	50,41	19,69
Indonesia	58,07	30,96	10,97	57,41	29,53	13,06

Lanjutan Tabel 3.4

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan		
	< 0,5 km (8)	0,5 – 1,0 km (9)	> 1,0 km (10)
Aceh	49,58	32,39	18,03
Sumatera Utara	54,24	31,12	14,64
Sumatera Barat	63,10	24,46	12,44
Riau	47,40	33,23	19,37
Jambi	67,94	19,55	12,50
Sumatera Selatan	63,47	30,24	6,28
Bengkulu	53,77	44,22	2,00
Lampung	55,91	34,71	9,38
Kep. Bangka Belitung	82,04	15,47	2,49
Kepulauan Riau	76,17	13,79	10,04
DKI Jakarta	60,58	25,89	13,53
Jawa Barat	59,97	29,69	10,33
Jawa Tengah	50,92	29,27	19,82
DI Yogyakarta	55,01	37,71	7,28
Jawa Timur	56,12	31,28	12,60
Banten	46,29	38,74	14,97
Bali	53,92	38,60	7,48
Nusa Tenggara Barat	71,60	17,00	11,40
Nusa Tenggara Timur	57,94	28,88	13,18
Kalimantan Barat	55,94	31,65	12,41
Kalimantan Tengah	65,23	25,42	9,35
Kalimantan Selatan	65,18	25,62	9,20
Kalimantan Timur	58,73	34,29	6,98
Sulawesi Utara	75,05	20,50	4,46
Sulawesi Tengah	57,31	32,62	10,07
Sulawesi Selatan	61,88	25,60	12,51
Sulawesi Tenggara	69,32	21,74	8,94
Gorontalo	75,48	17,86	6,67
Sulawesi Barat	85,10	13,22	1,68
Maluku	71,24	14,69	14,07
Maluku Utara	52,13	30,06	17,81
Papua Barat	70,21	22,90	6,89
Papua	30,42	49,49	20,09
Indonesia	57,56	29,85	12,59

Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Instalasi Air Pipa/Selang di Rumah dan Perilaku Membiarkan Air Mengalir Tanpa Digunakan Menurut Provinsi

Provinsi	Persentase rumah tangga yang menggunakan instalasi air pipa/selang	Perilaku membiarkan air kran mengalir meski sedang tidak digunakan		
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	56,95	66,44	29,69	3,87
Sumatera Utara	65,49	66,72	31,60	1,68
Sumatera Barat	59,01	72,84	23,52	3,65
Riau	61,12	74,25	23,99	1,76
Jambi	59,28	71,93	23,84	4,23
Sumatera Selatan	49,73	62,59	33,96	3,45
Bengkulu	63,96	70,69	20,82	8,48
Lampung	48,24	69,88	21,59	8,53
Kep. Bangka Belitung	67,04	67,07	31,79	1,14
Kepulauan Riau	84,35	74,62	24,11	1,27
DKI Jakarta	82,08	79,89	18,65	1,46
Jawa Barat	72,37	70,43	24,86	4,71
Jawa Tengah	74,67	70,31	22,16	7,54
DI Yogyakarta	77,39	70,21	27,18	2,61
Jawa Timur	74,23	73,06	22,68	4,26
Banten	78,62	67,82	28,04	4,14
Bali	87,11	84,86	13,85	1,29
Nusa Tenggara Barat	51,11	73,83	23,00	3,17
Nusa Tenggara Timur	22,49	75,76	20,71	3,53
Kalimantan Barat	53,51	66,02	29,53	4,45
Kalimantan Tengah	62,40	68,71	29,67	1,62
Kalimantan Selatan	75,50	74,20	23,58	2,22
Kalimantan Timur	76,81	69,26	28,74	1,99
Sulawesi Utara	65,33	72,82	23,62	3,55
Sulawesi Tengah	65,88	63,90	29,44	6,66
Sulawesi Selatan	78,28	65,01	26,74	8,25
Sulawesi Tenggara	65,51	65,46	25,72	8,82
Gorontalo	52,39	69,84	25,92	4,25
Sulawesi Barat	62,79	52,81	28,69	18,50
Maluku	47,01	69,45	26,26	4,29
Maluku Utara	50,75	65,67	31,18	3,15
Papua Barat	54,60	71,01	21,41	7,58
Papua	27,35	65,67	28,92	5,41
Indonesia	68,79	70,93	24,45	4,62

Tabel 3.6 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Alat Makan/Minum Menurut Provinsi dan Derah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Air Mengalir	Air Ditampung	Air Mengalir	Air Ditampung	Air Mengalir	Air Ditampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20,10	79,90	16,49	83,51	17,86	82,14
Sumatera Utara	25,63	74,37	17,19	82,81	22,21	77,79
Sumatera Barat	31,15	68,85	21,92	78,08	26,53	73,47
Riau	34,16	65,84	13,29	86,71	23,48	76,52
Jambi	23,49	76,51	18,26	81,74	20,26	79,74
Sumatera Selatan	19,09	80,91	11,84	88,16	15,62	84,38
Bengkulu	14,63	85,37	12,14	87,86	13,15	86,85
Lampung	35,94	64,06	18,18	81,82	23,08	76,92
Kep. Bangka Belitung	27,43	72,57	21,30	78,70	24,81	75,19
Kepulauan Riau	65,24	34,76	15,85	84,15	60,52	39,48
DKI Jakarta	59,84	40,16	-	-	59,84	40,16
Jawa Barat	56,46	43,54	43,16	56,84	52,50	47,50
Jawa Tengah	41,85	58,15	36,45	63,55	39,04	60,96
DI Yogyakarta	65,20	34,80	25,85	74,15	55,44	44,56
Jawa Timur	45,63	54,37	24,10	75,90	35,19	64,81
Banten	49,08	50,92	24,24	75,76	44,32	55,68
Bali	61,82	38,18	37,60	62,40	53,93	46,07
Nusa Tenggara Barat	51,57	48,43	34,87	65,13	43,17	56,83
Nusa Tenggara Timur	7,37	92,63	9,61	90,39	8,43	91,57
Kalimantan Barat	17,62	82,38	17,91	82,09	17,80	82,20
Kalimantan Tengah	32,61	67,39	18,02	81,98	24,97	75,03
Kalimantan Selatan	34,95	65,05	26,72	73,28	30,73	69,27
Kalimantan Timur	43,44	56,56	34,03	65,97	40,87	59,13
Sulawesi Utara	41,08	58,92	18,67	81,33	30,35	69,65
Sulawesi Tengah	31,01	68,99	17,98	82,02	22,20	77,80
Sulawesi Selatan	31,25	68,75	11,86	88,14	19,53	80,47
Sulawesi Tenggara	10,14	89,86	11,71	88,29	11,18	88,82
Gorontalo	31,77	68,23	20,37	79,63	26,08	73,92
Sulawesi Barat	32,55	67,45	23,26	76,74	25,73	74,27
Maluku	12,40	87,60	15,11	84,89	13,48	86,52
Maluku Utara	9,45	90,55	10,13	89,87	9,85	90,15
Papua Barat	16,40	83,60	29,40	70,60	23,38	76,62
Papua	30,42	69,58	32,55	67,45	31,04	68,96
Indonesia	46,08	53,92	26,92	73,08	38,10	61,90

Tabel 3.7 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Air untuk Mencuci Sayuran dan Buah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Air Mengalir	Air Ditampung	Air Mengalir	Air Ditampung	Air Mengalir	Air Ditampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	25,01	74,99	19,63	80,37	21,68	78,32
Sumatera Utara	28,14	71,86	18,56	81,44	24,25	75,75
Sumatera Barat	31,83	68,17	22,15	77,85	26,99	73,01
Riau	34,29	65,71	14,47	85,53	24,14	75,86
Jambi	24,02	75,98	17,78	82,22	20,16	79,84
Sumatera Selatan	22,33	77,67	13,12	86,88	17,92	82,08
Bengkulu	21,18	78,82	12,04	87,96	15,74	84,26
Lampung	35,19	64,81	23,86	76,14	26,99	73,01
Kep. Bangka Belitung	26,80	73,20	21,38	78,62	24,49	75,51
Kepulauan Riau	67,21	32,79	16,35	83,65	62,36	37,64
DKI Jakarta	61,57	38,43	-	-	61,57	38,43
Jawa Barat	59,11	40,89	46,56	53,44	55,37	44,63
Jawa Tengah	48,10	51,87	40,57	59,43	44,18	55,81
DI Yogyakarta	62,29	37,49	25,89	74,11	53,26	46,58
Jawa Timur	51,29	48,71	29,51	70,49	40,73	59,27
Banten	53,68	46,32	27,68	72,32	48,70	51,30
Bali	64,50	35,50	37,46	62,54	55,69	44,31
Nusa Tenggara Barat	54,78	45,22	37,73	62,27	46,20	53,80
Nusa Tenggara Timur	9,49	90,51	9,37	90,63	9,43	90,57
Kalimantan Barat	17,69	82,31	20,20	79,80	19,27	80,73
Kalimantan Tengah	37,52	62,48	20,12	79,88	28,41	71,59
Kalimantan Selatan	39,56	60,44	29,40	70,60	34,35	65,65
Kalimantan Timur	40,29	59,71	38,25	61,75	39,73	60,27
Sulawesi Utara	42,37	57,63	20,90	79,10	32,09	67,91
Sulawesi Tengah	35,52	64,48	18,94	81,06	24,32	75,68
Sulawesi Selatan	30,15	69,85	12,47	87,53	19,46	80,54
Sulawesi Tenggara	9,78	90,22	8,94	91,06	9,22	90,78
Gorontalo	41,97	58,03	21,57	78,43	31,80	68,20
Sulawesi Barat	30,53	69,47	26,83	73,17	27,82	72,18
Maluku	14,03	85,97	15,75	84,25	14,72	85,28
Maluku Utara	19,96	80,04	11,35	88,65	14,92	85,08
Papua Barat	14,41	85,59	30,04	69,96	22,80	77,20
Papua	38,58	61,42	37,81	62,19	38,36	61,64
Indonesia	49,32	50,68	30,10	69,90	41,32	58,68

Tabel 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alat/Cara Membilas Cucian Pakaian

Provinsi	Menggunakan Mesin Cuci		Tanpa Mesin Cuci			Tidak Mencuci Pakaian di Rumah
	Satu	Satu/Dua	Air Ditampung ≤ 2 kali bilas	Air Ditampung > 2 kali bilas	Air Mengalir	
	Tabung Bukaan Depan	Tabung bukaan atas	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3,17	13,62	19,06	54,51	5,06	4,58
Sumatera Utara	2,00	14,45	26,66	42,75	6,23	7,90
Sumatera Barat	2,90	20,08	21,10	38,96	9,22	7,74
Riau	2,08	30,53	26,39	31,87	3,58	5,55
Jambi	3,20	19,42	25,06	40,88	4,85	6,60
Sumatera Selatan	1,70	14,24	28,55	37,13	5,61	12,77
Bengkulu	2,01	18,88	29,87	39,30	3,38	6,56
Lampung	1,91	11,65	31,11	50,50	1,60	3,24
Kep. Bangka Belitung	3,69	31,08	25,35	25,75	4,41	9,71
Kepulauan Riau	7,04	45,51	15,32	27,26	2,35	2,51
DKI Jakarta	9,94	33,04	17,68	29,77	6,96	2,61
Jawa Barat	2,83	18,69	28,81	33,62	11,78	4,27
Jawa Tengah	2,05	11,01	31,01	41,92	10,92	3,09
DI Yogyakarta	4,18	16,83	25,78	44,68	3,24	5,29
Jawa Timur	2,57	10,62	28,29	43,73	9,36	5,44
Banten	4,70	24,40	26,36	33,09	6,59	4,86
Bali	5,69	13,88	32,51	33,11	6,45	8,36
Nusa Tenggara Barat	1,68	5,24	25,94	41,93	12,03	13,18
Nusa Tenggara Timur	0,70	3,65	24,60	48,61	4,00	18,43
Kalimantan Barat	1,65	11,56	23,36	31,41	14,77	17,26
Kalimantan Tengah	2,73	20,60	23,55	27,33	10,99	14,80
Kalimantan Selatan	3,38	19,55	31,53	28,25	8,08	9,21
Kalimantan Timur	5,99	36,51	25,98	22,45	5,11	3,97
Sulawesi Utara	2,83	15,82	18,01	50,31	10,78	2,26
Sulawesi Tengah	2,34	12,60	20,54	42,77	11,41	10,35
Sulawesi Selatan	4,14	15,67	19,86	51,83	5,14	3,38
Sulawesi Tenggara	1,54	14,36	30,49	45,78	4,17	3,66
Gorontalo	1,65	7,66	24,88	55,42	2,56	7,84
Sulawesi Barat	1,63	7,24	24,11	48,90	14,00	4,11
Maluku	2,07	11,73	21,06	49,92	8,38	6,83
Maluku Utara	0,74	11,68	17,79	58,51	3,85	7,43
Papua Barat	0,95	13,77	14,64	46,67	14,17	9,79
Papua	1,77	9,67	17,25	21,85	23,99	25,47
Indonesia	3,00	16,11	26,90	39,21	8,75	6,03

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kebiasaan Memanfaatkan Air Bekas untuk Keperluan Lain

Provinsi	Tidak Pernah (2)	Kadang-kadang (3)	Sering (4)
(1)			
Aceh	86,16	11,85	2,00
Sumatera Utara	77,48	17,85	4,67
Sumatera Barat	89,92	8,31	1,77
Riau	84,56	11,63	3,81
Jambi	87,53	10,59	1,89
Sumatera Selatan	78,81	16,43	4,77
Bengkulu	88,94	8,62	2,44
Lampung	77,57	18,48	3,95
Kep. Bangka Belitung	72,17	21,92	5,91
Kepulauan Riau	83,23	12,36	4,41
DKI Jakarta	79,51	15,95	4,53
Jawa Barat	77,72	17,65	4,63
Jawa Tengah	79,69	15,17	5,13
DI Yogyakarta	67,85	21,69	10,47
Jawa Timur	80,12	13,77	6,11
Banten	75,32	20,44	4,24
Bali	62,77	20,09	17,14
Nusa Tenggara Barat	76,76	17,81	5,43
Nusa Tenggara Timur	41,70	31,39	26,91
Kalimantan Barat	84,67	13,28	2,04
Kalimantan Tengah	88,04	9,26	2,70
Kalimantan Selatan	83,87	12,35	3,78
Kalimantan Timur	78,77	16,21	5,02
Sulawesi Utara	80,05	13,67	6,28
Sulawesi Tengah	84,34	9,65	6,01
Sulawesi Selatan	79,53	14,69	5,78
Sulawesi Tenggara	87,07	10,70	2,23
Gorontalo	88,50	9,03	2,47
Sulawesi Barat	90,91	5,14	3,96
Maluku	72,77	19,72	7,51
Maluku Utara	74,83	23,40	1,77
Papua Barat	84,72	12,03	3,25
Papua	81,25	15,38	3,37
Indonesia	78,77	15,84	5,39

Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tanaman di Rumah Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	63,67	65,89	65,28
Sumatera Utara	52,49	55,55	54,07
Sumatera Barat	64,67	68,99	67,33
Riau	60,70	73,91	68,83
Jambi	51,40	63,91	60,23
Sumatera Selatan	48,18	55,21	52,80
Bengkulu	61,33	74,54	70,47
Lampung	52,78	78,03	71,82
Kep. Bangka Belitung	65,47	67,52	66,50
Kepulauan Riau	53,38	57,10	53,95
DKI Jakarta	33,19	-	33,19
Jawa Barat	46,94	60,59	51,75
Jawa Tengah	62,51	72,18	67,85
DI Yogyakarta	66,15	85,45	72,30
Jawa Timur	59,94	70,66	65,68
Banten	44,69	51,81	46,84
Bali	71,26	80,76	74,88
Nusa Tenggara Barat	47,60	56,36	52,69
Nusa Tenggara Timur	68,91	74,39	73,32
Kalimantan Barat	56,50	66,95	63,86
Kalimantan Tengah	46,20	67,68	60,45
Kalimantan Selatan	51,32	60,68	56,77
Kalimantan Timur	41,94	59,53	48,65
Sulawesi Utara	63,27	80,45	72,67
Sulawesi Tengah	43,94	64,64	59,62
Sulawesi Selatan	50,67	70,60	63,38
Sulawesi Tenggara	46,10	70,35	63,52
Gorontalo	53,96	61,12	58,65
Sulawesi Barat	51,63	64,55	61,71
Maluku	59,12	51,12	54,37
Maluku Utara	62,89	55,80	57,77
Papua Barat	41,54	72,85	63,54
Papua	37,13	63,31	56,78
Indonesia	52,36	67,02	59,72

Tabel 3.11 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tanaman Keras/Tahunan yang angsun Ditanam di Tanah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47,35	57,72	54,83
Sumatera Utara	35,23	40,07	37,72
Sumatera Barat	42,59	52,33	48,59
Riau	43,09	65,31	56,76
Jambi	37,87	52,59	48,26
Sumatera Selatan	32,89	46,96	42,14
Bengkulu	43,46	59,17	54,34
Lampung	37,35	68,17	60,58
Kep. Bangka Belitung	51,14	60,21	55,68
Kepulauan Riau	31,13	46,32	33,46
DKI Jakarta	13,54	-	13,54
Jawa Barat	28,70	46,59	35,00
Jawa Tengah	49,00	61,50	55,91
DI Yogyakarta	48,88	82,30	59,53
Jawa Timur	43,97	61,79	53,51
Banten	26,24	41,76	30,92
Bali	50,32	62,25	54,87
Nusa Tenggara Barat	39,74	52,01	46,87
Nusa Tenggara Timur	56,86	66,95	64,98
Kalimantan Barat	42,30	57,46	52,98
Kalimantan Tengah	37,95	60,02	52,59
Kalimantan Selatan	37,95	54,20	47,41
Kalimantan Timur	27,06	49,82	35,75
Sulawesi Utara	40,91	58,18	50,37
Sulawesi Tengah	32,04	52,43	47,49
Sulawesi Selatan	36,67	60,44	51,83
Sulawesi Tenggara	34,17	60,43	53,03
Gorontalo	43,28	48,13	46,45
Sulawesi Barat	40,29	48,58	46,76
Maluku	41,25	43,74	42,73
Maluku Utara	42,45	38,95	39,92
Papua Barat	30,63	58,16	49,97
Papua	26,65	49,61	43,89
Indonesia	35,69	56,21	45,98

Tabel 3.12 Persentase Penduduk yang Mengetahui/Mendengar Tentang Sumur Resapan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	15,75	6,51	9,09
Sumatera Utara	12,32	3,97	8,03
Sumatera Barat	18,86	6,36	11,15
Riau	29,59	9,52	17,24
Jambi	17,59	6,03	9,43
Sumatera Selatan	11,80	5,69	7,78
Bengkulu	19,84	6,95	10,92
Lampung	23,02	6,97	10,92
Kep. Bangka Belitung	11,97	6,59	9,28
Kepulauan Riau	18,86	5,83	16,86
DKI Jakarta	42,36	-	42,36
Jawa Barat	26,59	7,48	19,86
Jawa Tengah	15,57	8,96	11,91
DI Yogyakarta	44,96	16,65	35,94
Jawa Timur	17,29	6,47	11,49
Banten	23,91	5,41	18,33
Bali	17,57	7,37	13,68
Nusa Tenggara Barat	14,53	5,01	9,00
Nusa Tenggara Timur	23,44	5,73	9,19
Kalimantan Barat	8,63	4,54	5,75
Kalimantan Tengah	15,43	8,77	11,01
Kalimantan Selatan	14,63	6,07	9,64
Kalimantan Timur	21,81	9,24	17,01
Sulawesi Utara	13,47	7,63	10,27
Sulawesi Tengah	15,12	4,49	7,07
Sulawesi Selatan	11,99	3,83	6,79
Sulawesi Tenggara	20,45	5,08	9,41
Gorontalo	13,87	4,01	7,42
Sulawesi Barat	8,75	4,21	5,21
Maluku	26,27	6,43	14,48
Maluku Utara	16,59	9,48	11,45
Papua Barat	13,09	10,04	10,95
Papua	16,07	4,33	7,25
Indonesia	22,22	6,81	14,49

Tabel 3.13 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Sumur Resapan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,09	0,32	0,54
Sumatera Utara	0,47	0,19	0,32
Sumatera Barat	0,49	0,31	0,38
Riau	3,01	0,42	1,42
Jambi	0,51	0,08	0,21
Sumatera Selatan	-	0,69	0,45
Bengkulu	0,16	0,36	0,30
Lampung	0,81	0,21	0,36
Kep. Bangka Belitung	1,35	0,45	0,90
Kepulauan Riau	1,89	-	1,60
DKI Jakarta	2,64	-	2,64
Jawa Barat	2,03	0,52	1,50
Jawa Tengah	0,95	0,37	0,63
DI Yogyakarta	10,53	0,38	7,30
Jawa Timur	1,52	0,34	0,89
Banten	2,79	-	1,94
Bali	0,85	0,24	0,62
Nusa Tenggara Barat	1,84	0,33	0,96
Nusa Tenggara Timur	1,72	0,26	0,55
Kalimantan Barat	-	0,19	0,13
Kalimantan Tengah	0,72	0,67	0,69
Kalimantan Selatan	1,67	0,54	1,01
Kalimantan Timur	1,06	0,91	1,00
Sulawesi Utara	0,75	0,28	0,49
Sulawesi Tengah	1,23	0,10	0,37
Sulawesi Selatan	0,17	0,12	0,14
Sulawesi Tenggara	0,70	0,10	0,27
Gorontalo	0,42	0,22	0,29
Sulawesi Barat	0,66	0,19	0,29
Maluku	-	0,14	0,08
Maluku Utara	-	0,14	0,10
Papua Barat	-	-	-
Papua	1,13	0,03	0,31
Indonesia	1,76	0,34	1,05

Tabel 3.14 Persentase Penduduk yang Mengetahui/Mendengar tentang Lubang Resapan Biopori Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7,10	2,66	3,90
Sumatera Utara	6,31	1,59	3,88
Sumatera Barat	5,52	2,90	3,90
Riau	14,17	4,82	8,42
Jambi	8,76	1,17	3,40
Sumatera Selatan	6,82	2,38	3,90
Bengkulu	6,59	1,79	3,27
Lampung	16,55	2,38	5,86
Kep. Bangka Belitung	6,47	3,81	5,14
Kepulauan Riau	9,58	2,05	8,42
DKI Jakarta	38,13	-	38,13
Jawa Barat	17,50	3,24	12,48
Jawa Tengah	8,49	2,74	5,31
DI Yogyakarta	24,67	5,19	18,46
Jawa Timur	7,87	2,39	4,94
Banten	17,05	1,52	12,36
Bali	13,34	3,88	9,73
Nusa Tenggara Barat	3,96	1,70	2,65
Nusa Tenggara Timur	7,71	1,80	2,95
Kalimantan Barat	5,39	1,63	2,75
Kalimantan Tengah	10,41	4,89	6,75
Kalimantan Selatan	8,84	2,46	5,12
Kalimantan Timur	15,42	4,04	11,08
Sulawesi Utara	5,92	2,61	4,11
Sulawesi Tengah	4,99	1,35	2,23
Sulawesi Selatan	7,93	1,66	3,93
Sulawesi Tenggara	8,65	2,00	3,87
Gorontalo	4,21	1,08	2,16
Sulawesi Barat	5,12	2,48	3,06
Maluku	10,63	3,51	6,39
Maluku Utara	7,43	1,91	3,45
Papua Barat	5,40	4,27	4,61
Papua	7,19	1,17	2,67
Indonesia	14,01	2,55	8,26

Tabel 3.15 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lubang Resapan Biopori Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,66	0,14	0,28
Sumatera Utara	0,28	-	0,14
Sumatera Barat	0,31	-	0,12
Riau	0,73	0,19	0,40
Jambi	0,32	-	0,09
Sumatera Selatan	-	0,09	0,06
Bengkulu	-	-	-
Lampung	3,27	0,01	0,81
Kep. Bangka Belitung	0,45	0,22	0,34
Kepulauan Riau	1,05	-	0,89
DKI Jakarta	2,83	-	2,83
Jawa Barat	3,11	0,05	2,03
Jawa Tengah	0,39	0,04	0,20
DI Yogyakarta	4,12	-	2,81
Jawa Timur	0,51	0,21	0,35
Banten	3,05	0,20	2,19
Bali	1,23	-	0,76
Nusa Tenggara Barat	0,46	-	0,19
Nusa Tenggara Timur	0,53	0,11	0,19
Kalimantan Barat	0,12	0,15	0,15
Kalimantan Tengah	0,25	0,34	0,31
Kalimantan Selatan	0,22	-	0,09
Kalimantan Timur	0,76	-	0,47
Sulawesi Utara	0,05	-	0,02
Sulawesi Tengah	-	0,10	0,07
Sulawesi Selatan	0,27	-	0,10
Sulawesi Tenggara	-	0,27	0,19
Gorontalo	0,42	-	0,15
Sulawesi Barat	0,66	0,19	0,29
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	0,15	0,11
Papua	0,46	0,08	0,17
Indonesia	1,58	0,09	0,83

Tabel 3.16 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Taman/Tanah Berumput di Pekarangan Rumah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	41,78	43,49	43,01
Sumatera Utara	20,75	29,75	25,38
Sumatera Barat	37,49	43,89	41,43
Riau	38,66	48,62	44,79
Jambi	35,06	42,13	40,05
Sumatera Selatan	20,54	32,76	28,58
Bengkulu	36,65	51,18	46,71
Lampung	33,33	41,98	39,85
Kep. Bangka Belitung	37,49	38,87	38,18
Kepulauan Riau	22,82	39,95	25,45
DKI Jakarta	10,05	-	10,05
Jawa Barat	18,97	26,22	21,53
Jawa Tengah	19,72	28,38	24,51
DI Yogyakarta	12,17	26,33	16,68
Jawa Timur	15,74	19,55	17,78
Banten	13,92	20,57	15,93
Bali	28,65	34,87	31,02
Nusa Tenggara Barat	8,24	7,22	7,65
Nusa Tenggara Timur	10,45	24,40	21,67
Kalimantan Barat	40,23	57,72	52,54
Kalimantan Tengah	29,17	52,06	44,36
Kalimantan Selatan	19,60	29,14	25,16
Kalimantan Timur	25,00	42,18	31,56
Sulawesi Utara	22,40	40,28	32,19
Sulawesi Tengah	24,29	47,51	41,88
Sulawesi Selatan	19,22	35,04	29,31
Sulawesi Tenggara	24,31	46,76	40,43
Gorontalo	42,50	47,29	45,63
Sulawesi Barat	11,73	40,22	33,96
Maluku	29,54	28,56	28,96
Maluku Utara	29,56	31,58	31,02
Papua Barat	31,02	60,40	51,66
Papua	29,14	52,62	46,77
Indonesia	19,56	31,35	25,47

4

PENGELOLAAN ENERGI



BAB IV

PENGELOLAAN ENERGI

Secara makro energi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Berbicara tentang energi, bahasan tentang sumber energi menjadi bagian yang penting. Sumber energi yang berasal dari fosil yang sampai sekarang masih menjadi sumber energi utama bagi Indonesia. Indonesiamasih mengandalkan minyak bumi dan gas sebagai sumber energi utama untuk segala kegiatan yang ada, baik pada lingkup industri maupun dalam lingkup rumah tangga.

Bagi Indonesia, sumber energi yang memiliki potensi terbaik bisa jadi adalah sumber energi panas bumi yang di sinyalir cadangan sebesar 40% energi dunia untuk panas bumi berada di indonesia. Tak kalah menariknya adalah batubara yang sudah dipakai sebagai sumber pembangkit listrik dan beberapa sumber energi alternatif lainnya antara lain: energi matahari yang bersinar sepanjang tahun di Indonesia, angin, dan mikro-hidro dan biomass cukup potensial di kembangkan menjadi sumber energi alternatif.

Secara umum agenda besar bidang energi di Indonesia terkait pada 4 hal pokok:

1. Pengendalian sumber energi: dalam hal ini adalah usaha pencarian energi baru dan terbarukan yang berkapasitas besar.
2. Pengendalian penggunaan energi : dalam hal ini adalah usaha penghematan energi baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Pengendalian emisi: dalam hal ini adalah usaha mengurangi emisi melalui reduksi penggunaan dan penggunaan energi bersih serta usaha pencarian teknologi pengolah limbah energi
4. Mitigasi untuk keberlanjutan: dalam hal ini adalah usaha perbaikan dan penyelamatan lingkungan hidup

Rumah tangga sebagai basis pemanfaatan dan pengelolaan energi dalam lingkup terkecil di masyarakat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan energi. Pola konsumsi dan konservasi energi serta variabel lain yang dirasa penting digali pada lingkup rumah tangga sangat penting di gali untuk digunakan pada perumusan kebijakan bidang energi semakin dirasakan kemendesakannya.

Karakteristik pengelolaan energi pada level rumah tangga yang di tangkap melalui Susenas Modul Hansoshanya terbatas antara lain pada: pemanfaatan cahaya matahari dan energi alternatif, sumber penerangan, pemanfaatan lampu hemat energi, perilaku rumah tangga terbatas pada penggunaan perangkat televisi dan AC. Selain karakteristik yang di sebutkan di atas tidak di cakup dalam survei ini. Benang merah yang coba di tangkap terkait tema pengelolaan energi dalam lingkup rumah tangga antara lain terkait konsumsi dan konservasi energi serta reduksi penggunaan energi dengan menunjukkan perilaku yang berpihak pada isu efisiensi penggunaan energi pada level rumah tangga.

4.1 Pemanfaatan Cahaya Matahari

Lama peninjauan matahari merupakan salah satu dari beberapa unsur klimatologi selain suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tekanan udara, angin. Lamanya matahari menyinari bumi dapat di nyatakan sebagai lamanya matahari berada pada horizon. Perubahan lamanya peninjauan matahari tidak begitu besar pada daerah tropis yang dekat dengan ekuator. Semakin jauh letak tempat dari garis ekuator maka fluktuasi lama peninjauan akan semakin besar (Lakitan, 1994). Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 2013, lama peninjauan matahari pada stasiun pengamatan BMKG terendah antara lain di Provinsi Sumatera Barat (32,8 persen), DI Yogyakarta (22,9 persen), Kalimantan Timur (38,8 persen). Sedangkan lama peninjauan matahari yang tertinggi berada di provinsi Bali (72 persen), Nusa Tenggara Timur (73,3 persen), dan Sulawesi Barat (75,2 persen).

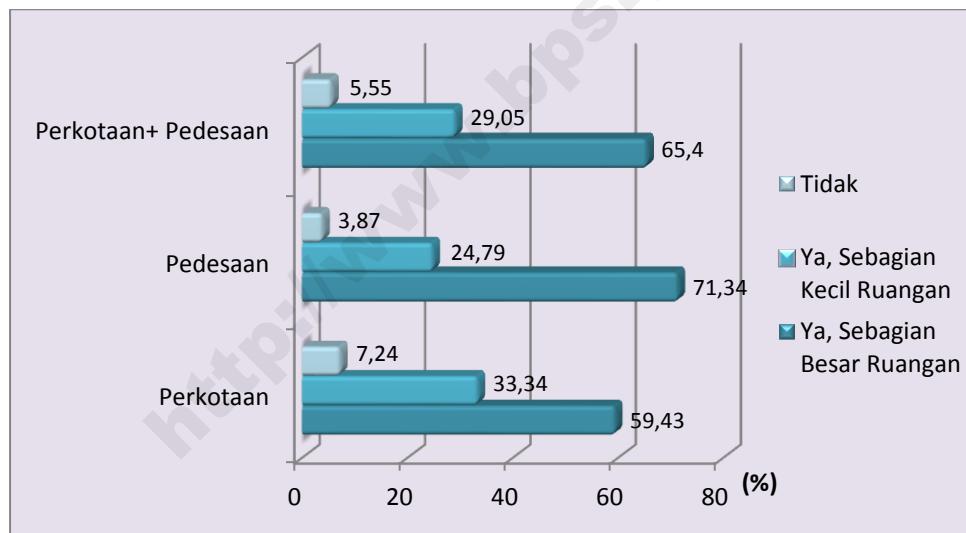
Dapat di simpulkan bahwa matahari bersinar sepanjang tahun di Indonesia dengan intensitas lama peninjauan yang beragam. Pemanfaatan cahaya matahari pada lingkup rumah tangga dapat di lakukan melalui pemanfaatan matahari untuk penerangan ruang di siang hari. Rumah tangga dikatakan memanfaatkan pencahayaan sinar matahari untuk penerangan ruangan apabila pada siang hari ada ruangan yang cukup mendapat pencahayaan matahari sehingga seseorang dapat membaca walaupun tanpa menggunakan lampu.

Pemanfaatan cahaya matahari untuk penerangan sebagian besar ruang di siang hari pada rumah tangga di perkotaan (59,43 persen) lebih sedikit di bandingkan oleh rumah tangga pedesaan (71,34 persen). Sebagai catatan, secara nasional hampir sebagian besar rumah tangga (65,4 persen) pemanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan sebagian besar ruangan bila memungkinkan. Sedangkan rumah tangga yang tidak memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan ruang di perkotaan (7,24 persen) lebih banyak di bandingkan rumah tangga di pedesaan yang tidak memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan

ruang (3,87 persen). Secara nasional, rumah tangga yang tidak memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan ruang di siang hari kurang lebih lima persen (5,55 persen rumah tangga).

Pemanfaatan cahaya matahari untuk penerangan ruang sangat tergantung oleh konstruksi bangunan rumah dan adanya akses cahaya untuk menembus ke dalam rumah melalui ruang terbuka akibat dispersi dan diffusi cahaya. Untuk daerah perkotaan yang bercirikan pemukiman padat penduduk, dimana rumah saling berhimpit dan ketiadaan ruang terbuka dapat menjadi penjelasan bahwa rumah tangga di perkotaan lebih kecil dalam memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan ruangan. Rumah Tangga yang memanfaatkan sinar matahari untuk penerangan di siang hari menurut daerah tempat tinggal di sajikan pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Penerangan Ruang di Siang Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal

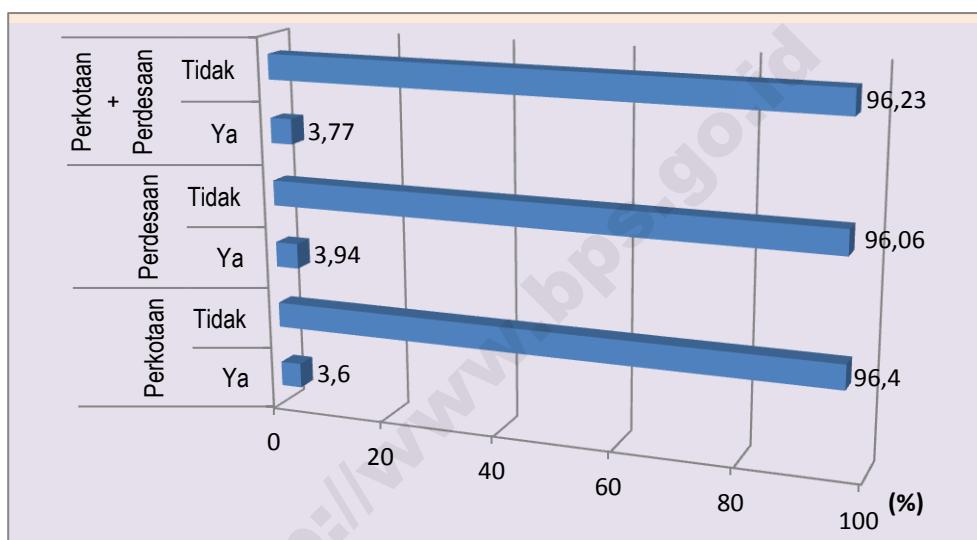


4.2 Pemanfaatan Energi Alternatif

Pemanfaatan energi alternatif bertujuan untuk menggantikan penggunaan sumber energi yang lama/konvensional berbasis fosil yang ketersediaannya terbatas, semakin langka dan diprediksi akan habis dalam rentang 30-50 tahun kedepan ditambah harganya yang semakin mahal dari waktu-kewaktu. Contoh energi alternatif: biogas yang diolah dari kotoran ternak, tenaga surya yang memanfaatkan panas matahari, angin, dll. Rumah tangga

memanfaatan energi alternatif seperti biogas, tenaga surya, angin, dll biasanya untuk penerangan /memasak/pemanas air, dll. Namun secara umum di Indonesia, hal ini bisa dikarenakan belum tersedianya energi alternatif untuk dikonsumsi dengan nyaman dan aman. Rumah tangga di perkotaan maupun di pedesaan tidak menunjukkan tingkat konsumsi yang berarti yang mengindikasikan belum berkebangnya pemanfaatan energi alternatif pada rumah tangga di Indonesia. Hasil Susenas Modul Hansos untuk rumah tangga yang memanfaatkan energi alternatif ditunjukkan pada Grafik 4.2 di bawah ini.

Grafik 4.2. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Alternatif Menurut Daerah Tempat Tinggal



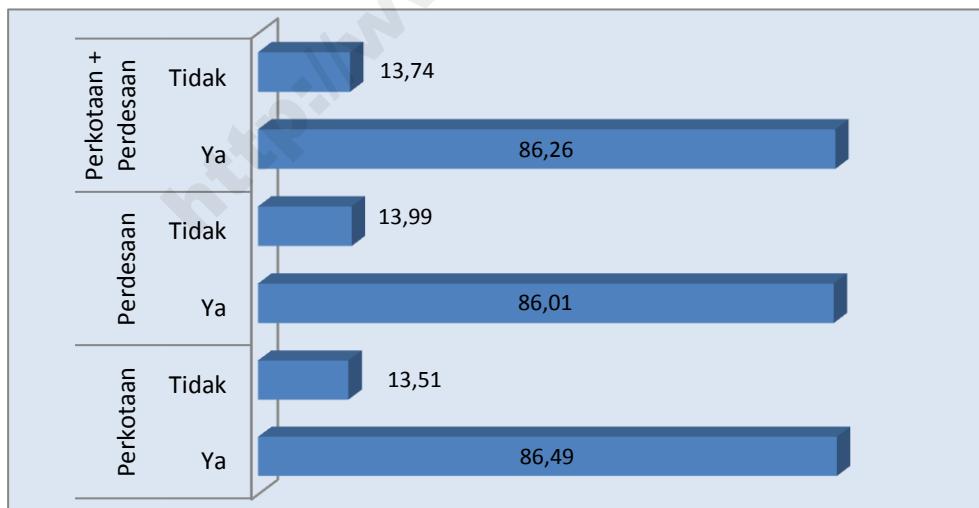
4.3 Penggunaan Lampu Hemat Energi (LHE)

Hasil Susenas Modul Hansos menunjukkan hampir sebagian besar rumah tangga di Indonesia mengandalkan penerangan yang bersumber dari energi listrik (97,16 persen), baik listrik yang dikelola PLN maupun non PLN. Salah satu cara rumah tangga untuk menghemat penggunaan energi listrik adalah dengan menggunakan lampu hemat energi. Lampu Hemat Energi (LHE) adalah lampu yang dapat menghemat pemakaian energi listrik sampai beberapa persen dari lampu biasa. Hal ini disebabkan karena di dalam LHE terdapat alat yang membuat energi yang diambil untuk menghidupkan lampu tersebut lebih sedikit yang disebut ballast. Lampu yang tidak dilengkapi oleh ballast baik berjenis bohlam dan

pijar dikategorikan jenis lampu tidak hemat energidilihat dari konsumsi listrik lebih boros dan usia pemakaian lampu yang pendek.

LHE yang beredar di pasaran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu FTL (Fluorescent Tube Lamp) atau lebih dikenal dengan nama lampu TL, dan CFL (Compact Fluorescent Lamp) yang dikenal dengan lampu pijar. Lampu TL bentuknya seperti tabung, dan dipasang dengan cara ditusukkan ke rumah lampunya. Biasanya lampu jenis ini ballastnya terpisah. Sedangkan lampu CFL, cara pemasangannya dengan ulir. Kelemahan menggunakan LHE salah satunya adalah dari sisi harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis lampu biasa. Pemanfaatan LHE pada rumah tangga perkotaan (86,49 persen) dan rumah pedesaan (86,01 persen) relatif tidak menunjukkan variasi yang berarti (Grafik 4.3). Artinya rumah tangga perkotaan maupun rumah tangga perdesaan sama dalam pemanfaatan LHE di rumah tangga masing-masing. Hal ini dapat diungkapkan karena kemudahan memperoleh LHE maupun karena perilaku yang terbentuk oleh pengetahuan dan persepsi baik pada rumah tangga perkotaan maupun rumah tangga pedesaan cukup baik, meskipun harga LHE relatif jauh lebih mahal dibandingkan oleh lampu yang tidak efisien dalam konsumsi energi listriknya.

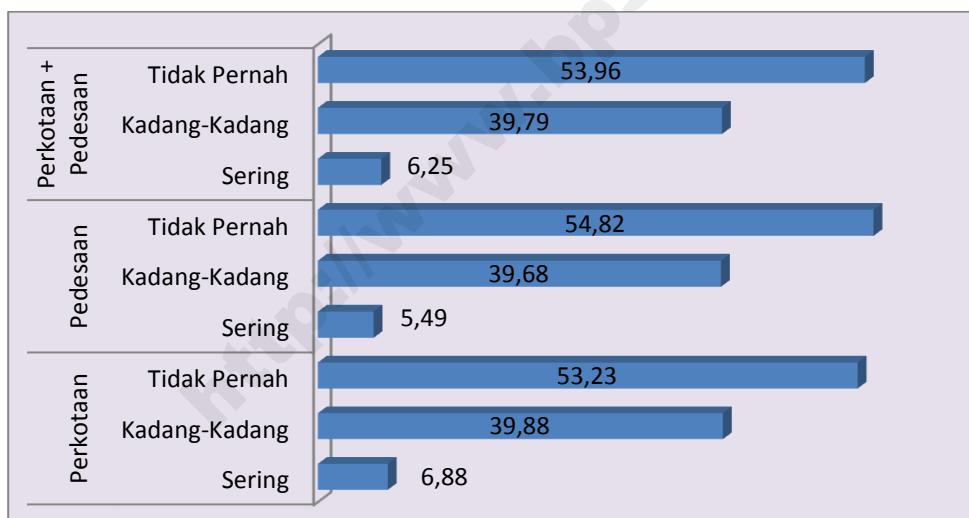
Grafik 4.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Daerah Tempat Tinggal



4.4 Perilaku Rumah Tangga pada Penggunaan Alat Elektronik

Secara tidak sadar, kepekaan kita dalam penggunaan energi listrik dapat terlihat dari kebiasaan dalam pemanfaatan beragam peralatan elektronik yang ada di rumah. Sebagai contoh dalam menyalakan televisi, kebiasaan membiarkan televisi menyala meskipun tidak di tonton merupakan bentuk kealpaan kepekaan dalam mereduksi efisiensi konsumsi listrik. Pengetahuan akan membangun kepekaan. Kepakaan akan membentuk karakter. Informasi perilaku ini dapat digunakan sebagai basis dasar rekaya sosial untuk edukasi dan kampanye lingkungan dan program efisiensi energi di masa depan. Hasil pendataan Modul Hansos menunjukkan persentase rumah tangga yang membiarkan televisi tetap menyala meskipun tidak ditonton sekitar 46,04 persen rumah tangga (Grafik 4.4). Perilaku tersebut relatif hampir sama antara wilayah perkotaan (46,76 persen) dengan pedesaan (45,17).

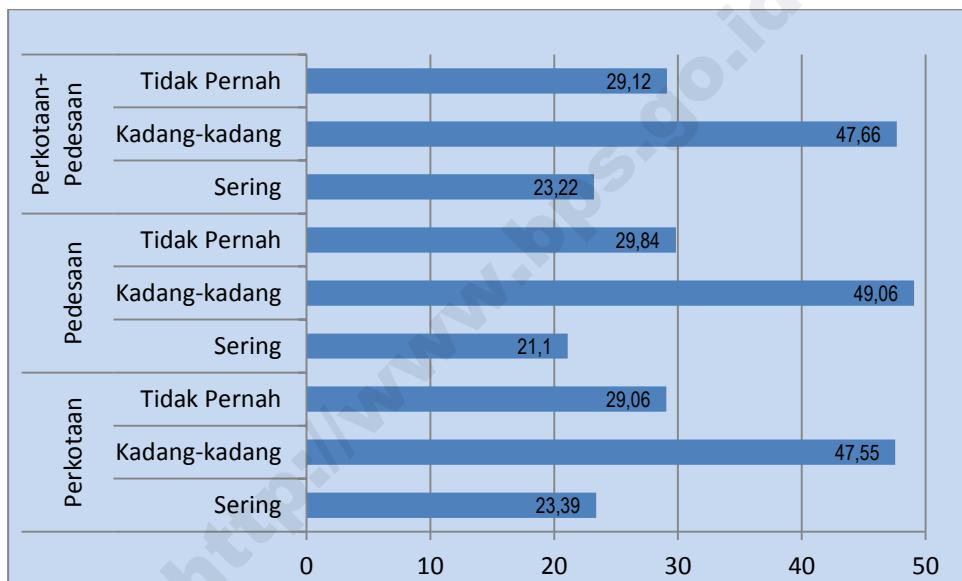
Grafik 4.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Televisi dengan Kebiasaan Membiarkan Televisi Tetap Menyala Meskipun Tidak Ditonton Menurut Daerah Tempat Tinggal



Masyarakat kota terbiasa dengan lingkungan buatan karena terbatasnya daya dukung lingkungan alami. Penghawaan ruang merupakan salah satu aspek pemanfaatan energi listrik baik menggunakan AC maupun kipas angin. Kepemilikan AC dan penggunaannya yang efisien merupakan salah satu aspek pemanfaatan listrik di rumah tangga yang coba di potret melalui Modul Hansos. Penggunaan AC pada suhu penghawaan sekitar 24°C disinyalir merupakan batas yang tepat dalam pemanfaatan AC selain pemilihan jenis AC yang hemat dalam konsumsi listrik (AC split mengkonsumsi listrik lebih efisien

dari AC window). Potret kebiasaan menyalakan AC pada suhu di bawah 24°C di sajikan pada Grafik 4.5. Hasil survei menunjukkan masyarakat perkotaan sedikit lebih banyak menyalakan AC pada suhu di bawah 24°C (23,39 persen) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (21,11 persen). Yang konsisten juga adalah masyarakat kota lebih sedikit yang menyatakan tidak pernah menyalakan AC di bawah suhu 24°C (29,06 persen) bila dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan (29,84 persen). Rumah tangga perkotaan yang menyatakan kadang-kadang menyalakan AC di bawah 24°C (47,55 persen) lebih sedikit dari rumah tangga di pedesaan yang menyatakan hal serupa 49,06 persen)

Gambar 4.5. Persentase Rumah tangga yang Memiliki AC dan Kebiasaan Menyalakan AC pada Suhu di Bawah 24°C Menurut Daerah Tempat Tinggal



Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Penerangan di Siang Hari Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+Pedesaan	
	Sebagian Besar Ruangan	Sebagian Kecil Ruangan	Sebagian Besar Ruangan	Sebagian Kecil Ruangan	Sebagian Besar Ruangan	Sebagian Kecil Ruangan
	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66,08	30,31	65,47	30,85	65,64	30,70
Sumatera Utara	61,03	31,20	65,37	29,25	63,26	30,20
Sumatera Barat	72,93	21,73	78,55	18,62	76,39	19,81
Riau	76,26	22,43	73,75	21,69	74,72	21,97
Jambi	73,04	23,07	76,07	19,51	75,18	20,56
Sumatera Selatan	60,26	34,02	68,91	27,76	65,95	29,91
Bengkulu	70,31	24,24	78,87	19,82	76,24	21,18
Lampung	73,04	21,20	79,06	17,86	77,58	18,68
Kep. Bangka Belitung	81,73	16,16	78,13	15,65	79,93	15,90
Kepulauan Riau	63,49	26,57	88,17	7,99	67,28	23,72
DKI Jakarta	38,49	44,27	-	-	38,49	44,27
Jawa Barat	53,43	39,46	69,08	27,03	58,94	35,08
Jawa Tengah	68,99	26,65	74,46	23,37	72,01	24,84
DI Yogyakarta	67,31	28,89	78,33	19,78	70,82	25,99
Jawa Timur	59,73	33,46	66,33	29,20	63,26	31,18
Banten	51,61	38,91	64,03	32,69	55,36	37,03
Bali	58,89	29,90	70,77	25,59	63,42	28,25
Nusa Tenggara Barat	63,99	33,47	73,68	21,90	69,62	26,75
Nusa Tenggara Timur	73,05	19,47	74,01	22,91	73,82	22,24
Kalimantan Barat	74,72	23,37	75,99	20,48	75,62	21,34
Kalimantan Tengah	76,53	19,79	84,09	14,67	81,54	16,39
Kalimantan Selatan	77,37	19,52	85,19	12,90	81,92	15,66
Kalimantan Timur	59,94	30,65	75,93	22,31	66,04	27,46
Sulawesi Utara	70,97	25,30	81,14	17,69	76,54	21,14
Sulawesi Tengah	62,33	28,48	78,89	17,14	74,87	19,89
Sulawesi Selatan	65,29	30,54	73,20	22,19	70,34	25,21
Sulawesi Tenggara	73,71	22,00	81,86	15,17	79,56	17,10
Gorontalo	75,78	23,01	76,08	22,93	75,98	22,96
Sulawesi Barat	65,24	34,10	69,39	23,67	68,48	25,97
Maluku	67,11	21,47	74,59	19,34	71,56	20,21
Maluku Utara	62,10	30,12	69,40	27,29	67,37	28,08
Papua Barat	61,53	30,87	74,62	19,80	70,72	23,09
Papua	53,84	38,97	33,56	45,51	38,62	43,88
Indonesia	59,43	33,34	71,34	24,79	65,40	29,05

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Alternatif Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,87	2,43	2,55
Sumatera Utara	3,20	3,01	3,10
Sumatera Barat	3,23	3,09	3,14
Riau	3,69	5,59	4,86
Jambi	2,18	2,11	2,13
Sumatera Selatan	3,62	5,33	4,74
Bengkulu	2,27	4,23	3,62
Lampung	2,19	4,00	3,55
Kep. Bangka Belitung	0,94	3,20	2,07
Kepulauan Riau	5,77	9,89	6,40
DKI Jakarta	8,14	-	8,14
Jawa Barat	3,13	2,68	2,97
Jawa Tengah	3,11	2,23	2,63
DI Yogyakarta	1,54	2,62	1,88
Jawa Timur	2,91	2,59	2,74
Banten	5,14	4,88	5,06
Bali	1,56	1,51	1,54
Nusa Tenggara Barat	3,58	5,14	4,49
Nusa Tenggara Timur	3,44	13,48	11,52
Kalimantan Barat	3,40	5,33	4,76
Kalimantan Tengah	4,43	6,59	5,86
Kalimantan Selatan	3,62	4,04	3,87
Kalimantan Timur	3,01	7,19	4,61
Sulawesi Utara	4,23	4,92	4,61
Sulawesi Tengah	3,90	5,13	4,83
Sulawesi Selatan	2,34	5,81	4,55
Sulawesi Tenggara	6,69	6,29	6,40
Gorontalo	4,84	8,87	7,48
Sulawesi Barat	0,00	11,52	8,99
Maluku	3,12	3,80	3,53
Maluku Utara	4,75	8,32	7,32
Papua Barat	1,41	3,26	2,71
Papua	0,91	9,50	7,36
Indonesia	3,60	3,94	3,77

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,9	90,96	92,37
Sumatera Utara	86,43	89,97	88,2
Sumatera Barat	89,04	88,11	88,48
Riau	94,97	93,97	94,38
Jambi	91,81	88,05	89,21
Sumatera Selatan	88,37	87,68	87,93
Bengkulu	98,51	85,23	89,44
Lampung	82,81	91,00	88,94
Kep. Bangka Belitung	87,42	91,45	89,43
Kepulauan Riau	93,04	89,93	92,57
DKI Jakarta	82,65	-	82,65
Jawa Barat	79,73	72,57	77,21
Jawa Tengah	89,94	87,94	88,84
DI Yogyakarta	91,02	96,23	92,67
Jawa Timur	87,38	87,47	87,43
Banten	88,95	71,67	83,82
Bali	90,67	89,03	90,05
Nusa Tenggara Barat	93,13	86,01	89,01
Nusa Tenggara Timur	89,8	86,63	87,46
Kalimantan Barat	94,44	90,55	91,87
Kalimantan Tengah	95,15	90,63	92,29
Kalimantan Selatan	95,56	91,33	93,14
Kalimantan Timur	89,46	82,22	86,80
Sulawesi Utara	87,07	87,40	87,25
Sulawesi Tengah	90,36	92,92	92,23
Sulawesi Selatan	91,48	90,83	91,07
Sulawesi Tenggara	95,88	90,82	92,35
Gorontalo	93,85	91,31	92,23
Sulawesi Barat	76,47	86,64	84,10
Maluku	90,53	24,24	82,61
Maluku Utara	91,38	14,68	87,19
Papua Barat	93,41	3,22	95,59
Papua	78,3	16,74	80,55
Indonesia	86,49	86,01	86,26

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki TV menurut Provinsi dan daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,35	75,12	78,90
Sumatera Utara	94,73	83,48	89,11
Sumatera Barat	91,74	85,49	87,96
Riau	94,69	91,62	92,87
Jambi	95,06	86,40	89,06
Sumatera Selatan	97,32	85,69	89,82
Bengkulu	96,20	86,19	89,36
Lampung	93,70	89,84	90,81
Kep. Bangka Belitung	95,43	89,40	92,43
Kepulauan Riau	95,02	87,56	93,90
DKI Jakarta	96,72	-	96,72
Jawa Barat	94,32	85,34	91,16
Jawa Tengah	93,90	89,08	91,24
DI Yogyakarta	89,91	83,23	87,80
Jawa Timur	92,96	84,11	88,22
Banten	97,03	81,99	92,56
Bali	93,26	87,90	91,24
Nusa Tenggara Barat	76,96	66,21	70,74
Nusa Tenggara Timur	83,27	38,02	49,87
Kalimantan Barat	96,83	87,59	90,73
Kalimantan Tengah	95,25	86,87	89,95
Kalimantan Selatan	94,61	87,51	90,54
Kalimantan Timur	96,09	92,42	94,75
Sulawesi Utara	88,97	80,03	84,10
Sulawesi Tengah	89,18	73,97	78,07
Sulawesi Selatan	91,87	82,74	86,13
Sulawesi Tenggara	85,13	75,55	78,46
Gorontalo	83,44	67,45	73,21
Sulawesi Barat	86,20	69,61	73,75
Maluku	87,75	66,65	76,44
Maluku Utara	80,37	67,49	71,46
Papua Barat	90,32	63,45	72,96
Papua	89,17	55,27	73,76
Indonesia	93,70	83,51	88,73

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki TV dan Kebiasaan Membiarakan TV Tetap Menyalakan Meskipun Tidak Ditonton Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan		
	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,79	41,48	54,73	2,15	36,53	61,32
Sumatera Utara	4,07	38,88	57,05	3,4	41,17	55,43
Sumatera Barat	5,77	38,72	55,5	3,8	39,76	56,44
Riau	6,11	42,55	51,34	3,92	31,51	64,57
Jambi	1,93	40,69	57,38	3,85	38,6	57,54
Sumatera Selatan	8,78	46,52	44,7	6,21	40,2	53,59
Bengkulu	8,44	33,58	57,98	6,61	33,53	59,85
Lampung	4,35	34,07	61,58	5,88	38,32	55,8
Kep. Bangka Belitung	5,59	42,09	52,32	7,92	53,12	38,96
Kepulauan Riau	4,83	44,98	50,19	5,98	33,56	60,46
DKI Jakarta	3,41	36,19	60,4	-	-	-
Jawa Barat	6,38	41,97	51,65	3,4	45,05	51,54
Jawa Tengah	9,4	39,48	51,13	7,11	40,49	52,4
DI Yogyakarta	12,44	43,24	44,32	6,98	34,87	58,15
Jawa Timur	8,3	35,78	55,91	6	37,69	56,31
Banten	7,36	43,18	49,46	7,98	40,9	51,12
Bali	6,13	28,89	64,99	5,72	25,11	69,17
Nusa Tenggara Barat	5,76	42,13	52,11	5,76	35,69	58,55
Nusa Tenggara Timur	3,71	26,7	69,59	4,18	28,96	66,87
Kalimantan Barat	7,72	41,35	50,93	2,51	44,85	52,64
Kalimantan Tengah	6,31	41,8	51,9	3,07	41,49	55,43
Kalimantan Selatan	6,74	43,31	49,95	4,86	42,61	52,54
Kalimantan Timur	4,53	48,46	47,01	2,55	50,47	46,98
Sulawesi Utara	5	30,74	64,26	5,5	35,01	59,49
Sulawesi Tengah	8,81	48,52	42,67	9,16	35,26	55,58
Sulawesi Selatan	10	44,22	45,78	9,46	39,13	51,4
Sulawesi Tenggara	9,97	34,03	56	8,14	38,48	53,38
Gorontalo	9,3	32,48	58,22	7,15	34,66	58,19
Sulawesi Barat	3,25	55,15	41,6	5,94	38,26	55,8
Maluku	12,1	37,65	50,26	5,03	37,58	57,39
Maluku Utara	1,25	63,5	35,25	2,92	43,23	53,84
Papua Barat	8,54	36,22	55,24	8,13	28,65	63,22
Papua	6,53	48,03	45,44	1,31	50,89	47,8
Indonesia	6,88	39,88	53,23	5,49	39,68	54,82

Lanjutan Tabel 4.5

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan		
	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
	(1)	(8)	(9)
Aceh	2,67	38,11	59,22
Sumatera Utara	3,76	39,95	56,3
Sumatera Barat	4,62	39,33	56,05
Riau	4,83	36,09	59,08
Jambi	3,22	39,29	57,49
Sumatera Selatan	7,2	42,64	50,17
Bengkulu	7,24	33,55	59,21
Lampung	5,48	37,22	57,31
Kep. Bangka Belitung	6,72	47,4	45,88
Kepulauan Riau	4,99	43,39	51,62
DKI Jakarta	3,41	36,19	60,4
Jawa Barat	5,4	42,98	51,62
Jawa Tengah	8,16	40,02	51,81
DI Yogyakarta	10,8	40,73	48,47
Jawa Timur	7,13	36,76	56,12
Banten	7,52	42,58	49,9
Bali	5,98	27,51	66,51
Nusa Tenggara Barat	5,76	38,65	55,59
Nusa Tenggara Timur	3,97	27,97	68,06
Kalimantan Barat	4,4	43,58	52,02
Kalimantan Tengah	4,33	41,61	54,06
Kalimantan Selatan	5,7	42,92	51,38
Kalimantan Timur	3,82	49,18	47
Sulawesi Utara	5,26	32,95	61,79
Sulawesi Tengah	9,05	39,35	51,6
Sulawesi Selatan	9,68	41,15	49,17
Sulawesi Tenggara	8,74	37,02	54,24
Gorontalo	8,04	33,76	58,2
Sulawesi Barat	5,15	43,19	51,65
Maluku	8,79	37,61	53,59
Maluku Utara	2,34	50,26	47,4
Papua Barat	8,31	31,97	59,72
Papua	4,75	49,01	46,24
Indonesia	6,25	39,79	53,96

Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	19,09	2,40	7,16
Sumatera Utara	10,52	1,47	6,01
Sumatera Barat	8,67	0,59	3,79
Riau	22,46	1,24	9,88
Jambi	13,63	0,78	4,72
Sumatera Selatan	15,19	1,15	6,14
Bengkulu	7,33	0,81	2,88
Lampung	7,13	0,58	2,23
Kep. Bangka Belitung	20,29	3,92	12,14
Kepulauan Riau	35,05	1,45	30,04
DKI Jakarta	31,14	-	31,14
Jawa Barat	9,05	0,89	6,18
Jawa Tengah	4,11	0,60	2,17
DI Yogyakarta	5,65	0,48	4,01
Jawa Timur	6,21	0,70	3,26
Banten	21,58	0,73	15,39
Bali	16,96	0,00	10,55
Nusa Tenggara Barat	4,45	0,62	2,23
Nusa Tenggara Timur	9,09	0,60	2,82
Kalimantan Barat	16,87	2,67	7,49
Kalimantan Tengah	11,18	0,98	4,72
Kalimantan Selatan	11,11	1,39	5,55
Kalimantan Timur	19,02	4,30	13,62
Sulawesi Utara	7,89	0,69	3,97
Sulawesi Tengah	13,40	1,19	4,49
Sulawesi Selatan	15,54	1,77	6,88
Sulawesi Tenggara	11,79	1,34	4,51
Gorontalo	15,17	2,70	7,19
Sulawesi Barat	12,39	0,90	3,77
Maluku	16,81	0,80	8,23
Maluku Utara	13,28	0,99	4,78
Papua Barat	13,35	1,66	5,80
Papua	13,13	5,48	9,65
Indonesia	12,08	1,02	6,68

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki AC dan Kebiasaan Menyalakan AC Pada Suhu di Bawah 24°C Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan		
	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	25,93	45,44	28,63	5,80	50,13	44,07
Sumatera Utara	18,56	42,46	38,99	19,88	61,00	19,11
Sumatera Barat	11,30	52,15	36,55	-	32,29	67,71
Riau	23,55	43,15	33,30	18,11	67,79	14,10
Jambi	18,63	47,80	33,57	12,51	61,16	26,34
Sumatera Selatan	42,33	42,65	15,02	23,21	28,78	48,01
Bengkulu	24,96	46,81	28,23	0	46,93	53,07
Lampung	6,06	29,85	64,09	21,82	58,10	20,09
Kep. Bangka Belitung	16,75	53,78	29,47	12,07	53,65	34,28
Kepulauan Riau	38,39	47,90	13,71	13,47	74,99	11,54
DKI Jakarta	16,57	57,52	25,90	-	-	-
Jawa Barat	30,71	46,66	22,63	20,13	44,37	35,49
Jawa Tengah	17,54	37,97	44,48	5,32	57,22	37,46
DI Yogyakarta	14,73	38,43	46,84	-	100	-
Jawa Timur	23,78	47,21	29,01	33,25	32,31	34,44
Banten	17,50	46,07	36,44	-	45,21	54,79
Bali	13,10	37,84	49,05	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	26,68	55,66	17,66	42,15	57,85	-
Nusa Tenggara Timur	28,92	55,57	15,50	30,74	41,93	27,33
Kalimantan Barat	22,69	45,51	31,80	41,23	32,62	26,15
Kalimantan Tengah	26,45	39,80	33,75	35,29	32,95	31,77
Kalimantan Selatan	28,61	48,28	23,11	32,80	43,27	23,93
Kalimantan Timur	27,41	48,18	24,41	16,33	65,7	17,97
Sulawesi Utara	25,07	31,65	43,29	6,93	76,47	16,59
Sulawesi Tengah	47,28	37,51	15,21	29,99	59,06	10,96
Sulawesi Selatan	34,00	36,49	29,51	32,56	47,98	19,46
Sulawesi Tenggara	26,94	46,35	26,71	34,22	45,49	20,29
Gorontalo	30,08	48,18	21,74	15,27	67,75	16,98
Sulawesi Barat	12,18	58,73	29,09	-	30,79	69,21
Maluku	26,63	52,76	20,61	55,85	44,15	-
Maluku Utara	24,50	59,02	16,48	43,07	56,93	-
Papua Barat	38,86	34,16	26,98	12,08	42,91	45,01
Papua	35,51	43,13	21,36	7,58	76,17	16,25
Indonesia	23,39	47,55	29,06	21,1	49,06	29,84

Lanjutan Tabel 4.7

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan		
	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
	(1)	(8)	(9)
Aceh	21,11	46,56	32,33
Sumatera Utara	18,72	44,73	36,55
Sumatera Barat	10,24	50,27	39,49
Riau	23,14	44,99	31,87
Jambi	17,92	49,34	32,74
Sumatera Selatan	40,03	40,98	18,99
Bengkulu	20,17	46,83	33,00
Lampung	9,13	35,37	55,50
Kep. Bangka Belitung	16,00	53,75	30,25
Kepulauan Riau	38,21	48,09	13,70
DKI Jakarta	16,57	57,52	25,90
Jawa Barat	30,18	46,55	23,28
Jawa Tengah	15,68	40,90	43,41
DI Yogyakarta	14,18	40,74	45,09
Jawa Timur	24,87	45,51	29,63
Banten	17,25	46,05	36,70
Bali	13,10	37,84	49,05
Nusa Tenggara Barat	29,16	56,01	14,83
Nusa Tenggara Timur	29,21	53,43	17,36
Kalimantan Barat	27,05	42,48	30,47
Kalimantan Tengah	27,60	38,90	33,49
Kalimantan Selatan	29,21	47,57	23,23
Kalimantan Timur	26,13	50,21	23,66
Sulawesi Utara	23,35	35,88	40,77
Sulawesi Tengah	43,92	41,69	14,39
Sulawesi Selatan	33,77	38,34	27,89
Sulawesi Tenggara	28,44	46,17	25,38
Gorontalo	26,53	52,88	20,6
Sulawesi Barat	10,00	53,72	36,28
Maluku	28,15	52,31	19,54
Maluku Utara	27,17	58,72	14,11
Papua Barat	33,91	35,78	30,31
Papua	28,3	51,66	20,04
Indonesia	23,22	47,66	29,12

5

PENGGUNAAN TRANSPORTASI



BAB V

PENGGUNAAN TRANSPORTASI

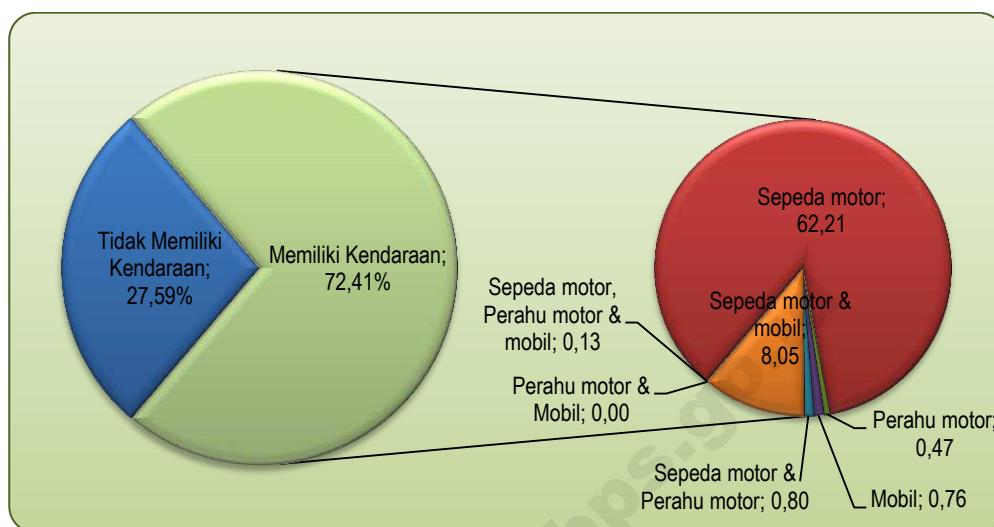
Perkembangan sektor transportasi di suatu wilayah akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Lancarnya perpindahan orang maupun barang/jasa membuat aktivitas perekonomian semakin berkembang. Bagi individu transportasi tersebut sebagai penunjang dari kegiatan utama, seperti kegiatan bekerja, sekolah dan lainnya. Transportasi bukan hanya sebagai alat memudahkan aktivitas individu namun sebagai pemberi nilai tambah terhadap aktivitas yang mengefisiensikan waktu dan tenaga.

Namun penggunaan transportasi itu sendiri erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, khususnya dalam penyediaan bahan bakar yang digunakan dan pencemaran yang ditimbulkan. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, rumah tangga sebagai pengguna transportasi sebaiknya juga mempertimbangkan penggunaan transportasi dari sisi kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan Gas Rumah Kaca (GRK) yang terbesar di perkotaan diikuti sumber emisi pencemar halus lain seperti industri, rumah tangga, dan kegiatan komersial. Emisi GRK dari sektor transportasi diperkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK dari seluruh sumber.

Hasil dari Susenas Modul Ketahanan Sosial 2014 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor cukup tinggi yaitu 72,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia telah menjadi kebutuhan pokok rumah tangga terutama bagi rumah tangga dengan perekonomian menengah ke atas. Pada Grafik 5.1 ditunjukkan persentase kepemilikan kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan dimana persentase tertinggi jenis kendaraan yang dimiliki rumah tangga adalah sepeda motor yaitu sebesar 62,21 persen, sedangkan mobil hanya dimiliki 0,76 persen rumah tangga, dan 0,47 persen memiliki perahu motor. Rumah tangga yang memiliki dua jenis kendaraan yaitu memiliki sepeda motor dan mobil sebanyak 8,05 persen, Data Kementerian

Perhubungan menyatakan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor tahun 2014 di wilayah perkotaan adalah 90 persen pertahun dengan total 8,9 juta kendaraan.

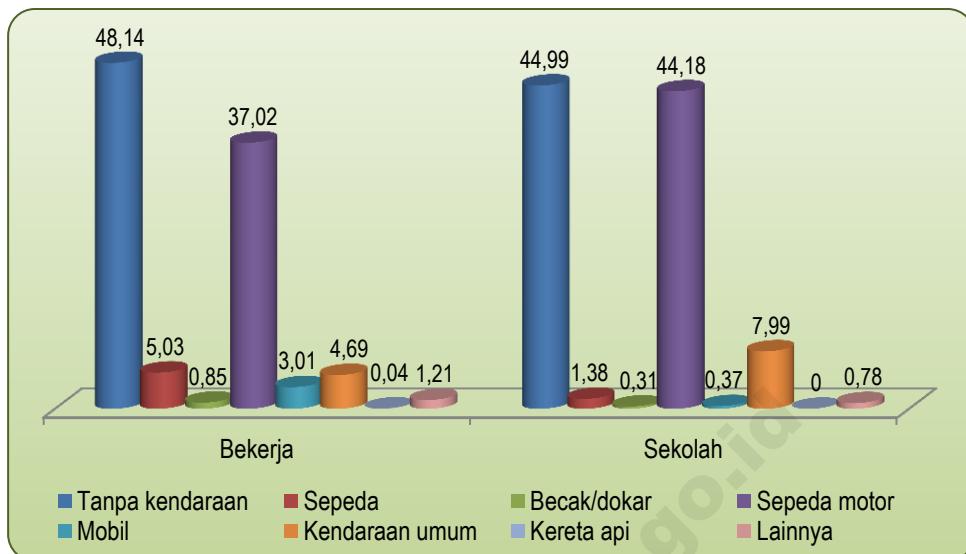
Grafik 5.1. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan dan Jenis Kendaraan Bermotor



5.1 Sarana Angkutan Utama Penunjang Kegiatan Utama

Bagi rumah tangga transportasi merupakan sarana dalam menunjang aktivitas sehari-hari seperti kegiatan bekerja, sekolah, maupun dalam mengurus rumah tangga. Pada Grafik 5.2 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan sepeda motor untuk kegiatan bekerja ada sebanyak 37,02 persen, menggunakan mobil 3,01 persen, sedangkan yang menggunakan kendaraan umum hanya 4,69 persen. Untuk kegiatan sekolah, pengguna sepeda motor terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 44,18 persen, dan pengguna kendaraan umum pada urutan kedua sebesar 7,99 persen. Pada Tabel 5.1 menyajikan persentase rumah tangga dengan angkutan utama yang biasa digunakan untuk bekerja menurut provinsi menunjukkan bahwa pada umumnya alat transportasi yang digunakan untuk bekerja di sebagian besar provinsi adalah menggunakan sepeda motor, diikuti dengan bersepeda atau jalan kaki. Akan tetapi untuk provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur, persentase tertinggi angkutan untuk menunjang kegiatan bekerja penduduk adalah dengan tanpa kendaraan atau berjalan kaki, hal ini dimungkinkan dikarenakan belum berkembang luas sarana transportasi di willyah Indonesia bagian timur dan juga karena faktor perekonomian penduduk.

Grafik 5.2. Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Bekerja dan Sekolah



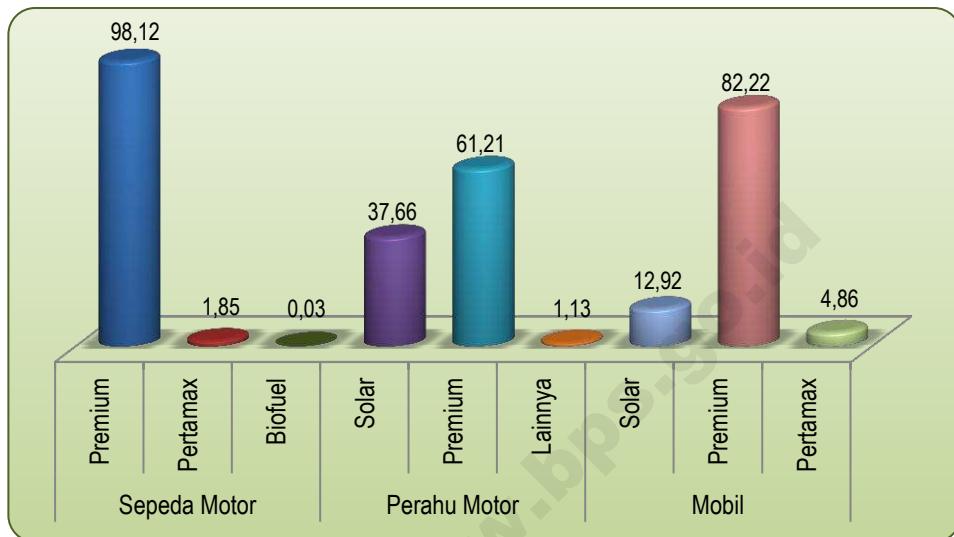
Terkait penggunaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan bekerja dan sekolah, penggunaan kendaraan umum lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan umum (kendaraan umum rute tertentu dan kendaraan umum tanpa rute tertentu) sebagai alat transportasi penunjang kegiatan bekerja hanya 4,69 persen, sedangkan yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor dan mobil pribadi) sebanyak 40,03 persen. Hal ini juga berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan sekolah, dimana pengguna kendaraan bermotor pribadi lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan umum, yaitu 44,55 persen pengguna kendaraan pribadi dan 7,99 persen pengguna kendaraan umum.

5.2 Bahan Bakar Utama

Aktivitas pemakaian kendaraan bermotor oleh masyarakat tidak lepas dari penggunaan bahan bakar minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia naik 10 persen setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran udara yang berasal dari knalpot dan mesin kendaraan tersebut. Bahan buangan dari kendaraan bermotor dikenal sebagai sumber utama bahan-bahan polutan. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata, pencemar di udara mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemar udara menyebabkan

kanker dan dampak kesehatan serius, menyebabkan asap kabut (*smog*) fotokimia dan hujan asam, mengurangi daya perlindungan lapisan ozon di atmosfer bagian atas, dan berpotensi untuk turut berperan dalam perubahan iklim dunia.

Grafik 5.3. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama dan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

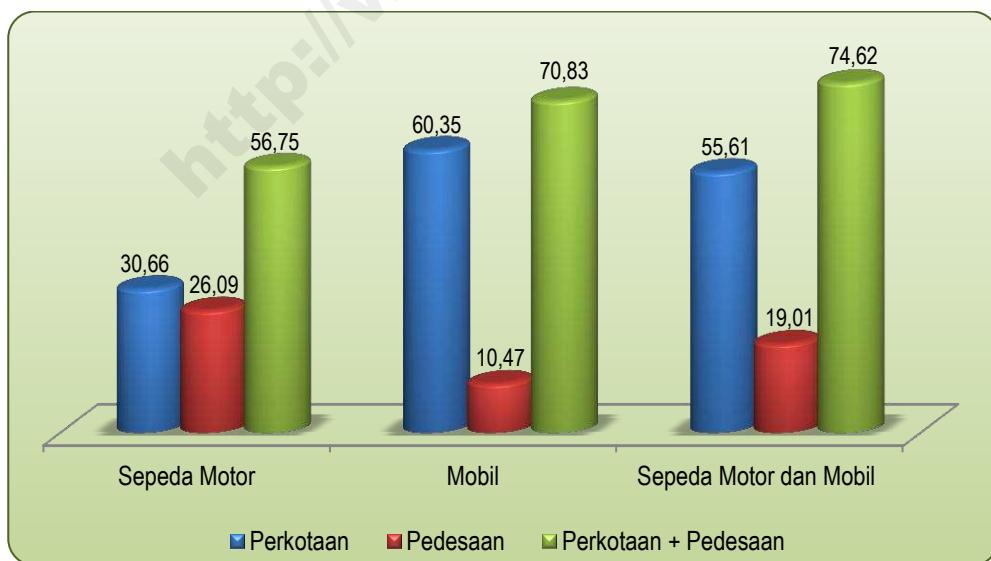


Berdasarkan Grafik 5.3, dari 72,41 persen rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor masih banyak rumah tangga yang memakai bahan bakar tidak ramah lingkungan, antara lain 98,12 persen rumah tangga pemilik kendaraan sepeda motor yang memakai bahan bakar premium, rumah tangga pemilik kendaraan perahu motor yang memakai bahan bakar solar 37,66 persen dan bahan bakar premium 61,21 persen, serta rumah tangga pemilik kendaraan mobil yang memakai bahan bakar solar 12,92 persen dan bahan bakar premium 82,22 persen. Rumah tangga pemakai bahan bakar ramah lingkungan (pertamax dan biofuel) masih kurang dari 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia masih cenderung kurang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Pada Tabel 5.3 menunjukkan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan pertamax sebagai bahan bakar sepeda motornya terdapat di Provinsi DKI Jakarta, demikian juga untuk bahan bakar mobil, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar jenis pertamax terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

5.3 Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Kendaraan

Untuk menghemat bahan bakar yang digunakan kendaraan, rumah tangga dapat melakukan pemeriksaan tekanan angin ban kendaraan. Tekanan angin ban yang kurang membuat konsumsi bahan bakar menjadi boros karena mesin butuh tenaga ekstra untuk memutar ban. Pada Grafik 5.4, dapat dilihat persentase rumah tangga yang melakukan pemeriksaan tekanan angin ban kendaraan, dimana persentase rumah tangga pemilik kendaraan sepeda motor yang melakukan pemeriksaan tekanan angin ban kendaraan hanya 56,75 persen, sedangkan rumah tangga pemilik kendaraan mobil 70,83 persen, dan rumah tangga pemilik kendaraan sepeda motor dan mobil sebanyak 74,62 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase terbanyak rumah tangga yang melakukan pemeriksaan tekanan angin ban kendaraan terdapat di daerah perkotaan. Untuk rumah tangga pemilik kendaraan sepeda motor yang melakukan pemeriksaan tekanan angin ban, tidak terdapat perbedaan persentase yang besar antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. Namun untuk rumah tangga pemilik kendaraan mobil, terdapat perbedaan persentase yang sangat besar antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan.

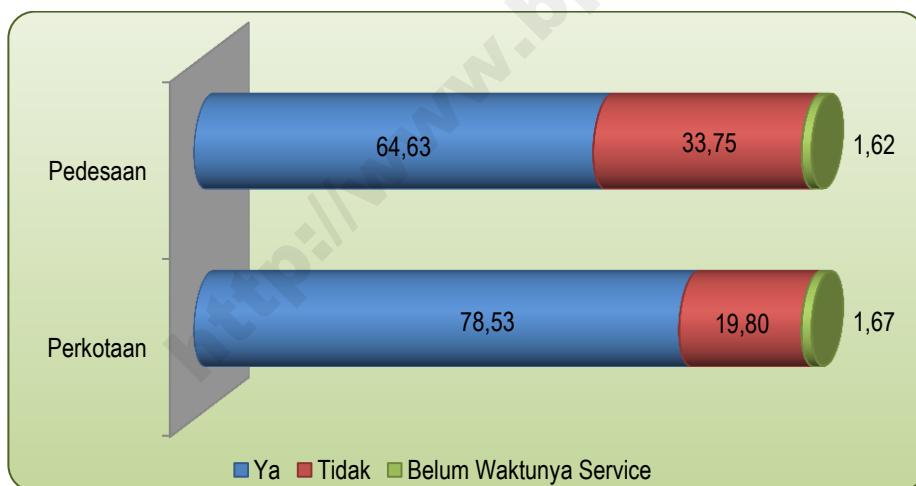
Grafik 5.4. Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Menurut Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal



5.4 Perawatan Mesin Kendaraan Bermotor

Selain dilihat dari bahan bakar utama yang digunakan untuk kendaraan yang dimiliki, indikator lain yang dapat mempengaruhi bahan buangan kendaraan bermotor yang nantinya dapat merusak lingkungan yaitu dapat dilihat dari perawatan secara rutin yang dilakukan rumah tangga terhadap mesin kendaraan bermotor yang dimiliki, dan hal ini juga berhubungan dengan sikap peduli terhadap lingkungan. Di Indonesia, rumah tangga yang melakukan perawatan mesin kendaraan bermotor yang dimiliki secara rutin sekitar 69,51 persen. Berdasarkan Grafik 5.5 rumah tangga yang melakukan perawatan mesin kendaraan secara rutin lebih banyak dibandingkan yang tidak melakukan perawatan mesin secara rutin, baik rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Persentase terbanyak rumah tangga yang melakukan perawatan mesin kendaraan secara rutin terdapat di daerah perkotaan.

Grafik 5.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Perawatan Mesin Secara Rutin pada Kendaraan Bermotor yang Dimiliki



Jika dilihat menurut provinsi (berdasarkan Tabel 5.9), persentase terbesar rumah tangga yang melakukan perawatan terhadap mesin kendaraan bermotor pribadinya terdapat di provinsi DKI Jakarta (83,32 persen), dan diikuti oleh provinsi Kepulauan Riau (78,49 persen). Sedangkan persentase terkecil rumah tangga yang melakukan perawatan mesin kendaraan bermotor secara rutin terdapat di Provinsi Maluku Utara, yaitu 42,62 persen.

5.5 Penggunaan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi penggunaannya, sepeda motor lebih sering digunakan sendiri sedangkan mobil lebih sering digunakan secara bersama. Pada Grafik 5.6, tercatat sebanyak 52,53 persen rumah tangga pemilik kendaraan sepeda motor lebih sering menggunakan sepeda motornya secara sendiri dibandingkan menggunakannya secara bersama/berboncengan (47,47 persen). Sementara untuk penggunaan mobil, tercatat sebanyak 69,57 persen rumah tangga pemilik mobil menggunakan mobilnya secara bersama (*car pooling*) dan sisanya sebesar 30,43 persen rumah tangga lebih sering menggunakannya secara sendiri. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, rumah tangga di daerah perkotaan yang menggunakan mobilnya secara bersama lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Sebaliknya, untuk penggunaan sepeda motor secara bersama lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Penggunaan kendaraan bermotor secara sendiri akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar yang pada akhirnya menghabiskan bahan bakar dan menimbulkan lebih banyak emisi gas rumah kaca. Jika dilihat menurut provinsi pada Tabel 5.4 persentase tertinggi rumah tangga pemilik sepeda motor yang menggunakan sepeda motornya lebih sering secara bersama terdapat di Provinsi Maluku Utara (63,48 persen), diikuti Provinsi Maluku (62,96 persen). Sedangkan persentase tertinggi rumah tangga pemilik kendaraan mobil (Tabel 5.7) yang menggunakan mobilnya secara bersama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu 80,34 persen, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (79,53 persen), dan Provinsi Jawa Timur (74,99 persen).

Grafik 5.6. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Cara Penggunaan Kendaraan Bermotor



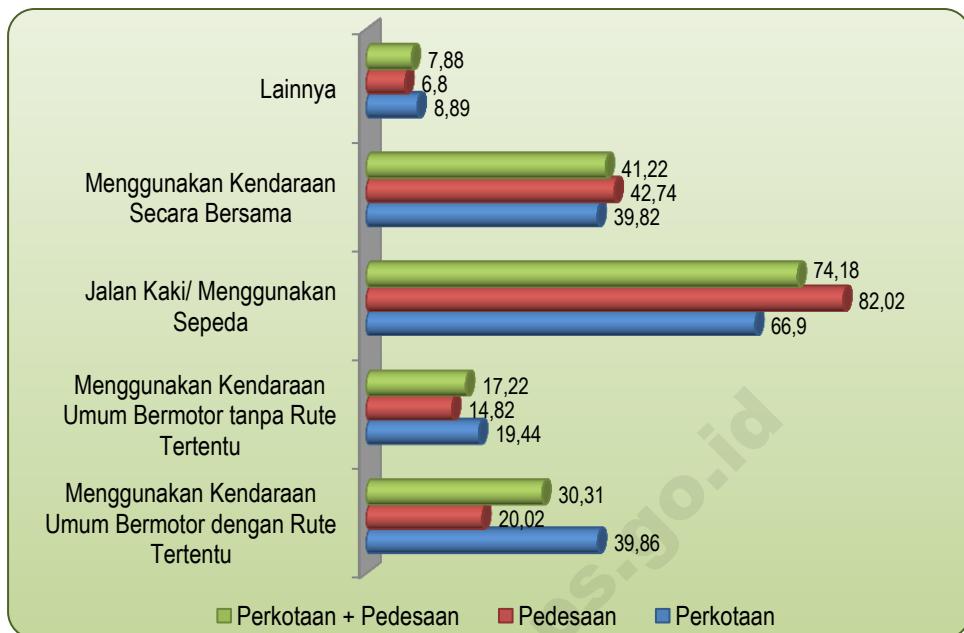
5.6 Usaha Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi

Kesadaran dan kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan dapat dilihat juga dari usaha rumah tangga tersebut dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Semakin banyak rumah tangga yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, maka semakin sedikit kendaraan bermotor yang berada di jalanan sehingga dapat mengurangi emisi buangan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Tabel 5.11 merupakan tabel mengenai rumah tangga yang melakukan usaha pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, dan hanya terdapat 12,98 persen rumah tangga yang melakukan usaha tersebut di Indonesia. Dan apabila dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang melakukan usaha pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi terdapat di provinsi Nusa Tenggara Timur (20,71 persen), diikuti provinsi Gorontalo (19,92 persen), Sulawesi Utara (18,85 persen), Sulawesi Selatan (16,3 persen), dan Nusa Tenggara Barat (15,43 persen). Sedangkan persentase terendah rumah tangga yang melakukan usaha pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi terdapat di provinsi Maluku Utara yaitu 6,95 persen. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, rumah tangga yang melakukan usaha mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi secara umum lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan, namun perbedaannya tidak terlalu besar.

Usaha dalam rangka pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh rumah tangga dapat dilakukan dengan lebih dari satu jenis usaha. Pada Grafik 5.7, jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga adalah jalan kaki atau menggunakan sepeda sebesar 74,18 persen, menggunakan kendaraan secara bersama (*car pooling*) sebesar 41,22 persen, dan menggunakan kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu sebesar 30,31 persen. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, usaha menggunakan kendaraan secara bersama dan usaha jalan kaki atau menggunakan sepeda adalah usaha yang paling banyak dilakukan rumah tangga yang bertempat tinggal di pedesaan. Sedangkan usaha yang paling banyak dilakukan rumah tangga yang bertempat tinggal di perkotaan adalah usaha menggunakan kendaraan umum bermotor dan lainnya. Hal ini sesuai dengan sarana transportasi dan fasilitas yang terdapat di daerah pedesaan dan perkotaan, dimana di daerah pedesaan lebih memungkinkan untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda, sedangkan di daerah perkotaan lebih banyak kendaraan umum.

Grafik 5.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Usaha yang Dilakukan dalam Rangka Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi

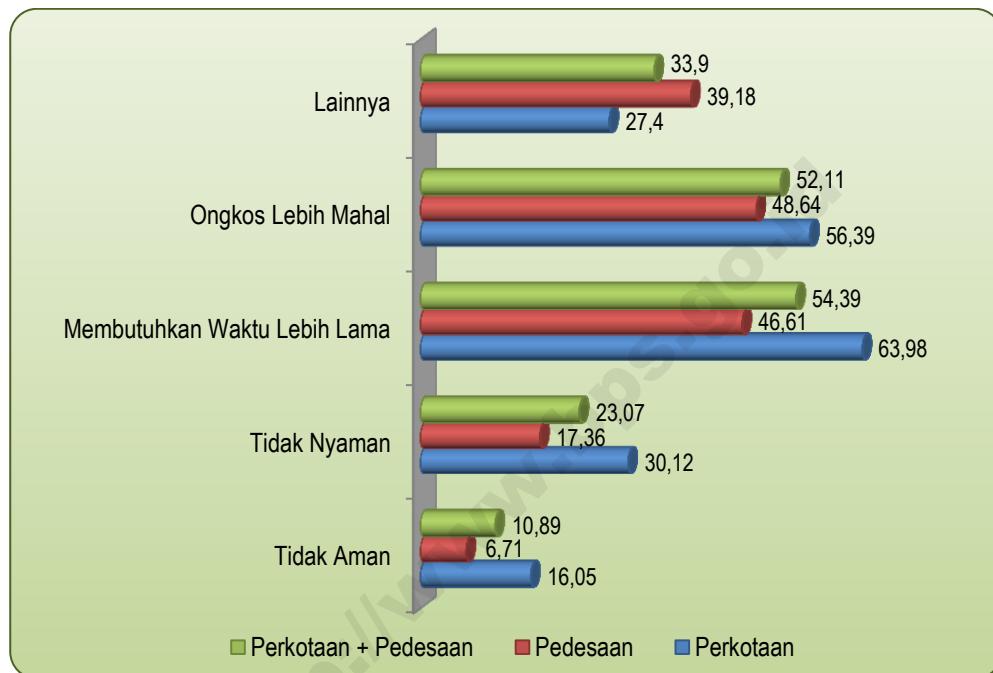


Dari usaha pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang terdapat pada Tabel 5.12, alasan terbanyak yang dikemukakan oleh rumah tangga dalam melakukan usaha tersebut yaitu penghematan biaya sebesar 68,45 persen, kemudian alasan jarak tempuh ke tempat aktivitas semakin dekat berada di urutan kedua namun persentase rumah tangga nya jauh dibandingkan alasan penghematan biaya yaitu 9,65 persen, sedangkan rumah tangga dengan alasan peduli lingkungan hanya sekitar 1,04 persen, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian rumah tangga dalam menjaga lingkungan masih rendah.

Apabila ditelusuri lebih lanjut mengenai usaha penggunaan kendaraan umum bermotor dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pada Tabel 5.11 ditunjukkan hanya 17,22 persen rumah tangga yang menggunakan kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu dan 30,31 persen rumah tangga yang menggunakan kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rumah tangga tidak menggunakan kendaraan umum tersebut, dan dari Grafik 5.8, alasan terbanyak yaitu membutuhkan waktu lebih lama (54,39 persen) dan ongkos lebih mahal (52,11 persen). Untuk alasan tidak nyaman dan tidak aman lebih banyak dikemukakan oleh rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan yang tinggal di daerah

pedesaan, hal ini sesuai dengan keadaan kendaraan umum di daerah perkotaan yang cenderung memiliki pelayanan buruk, melebihi muatan, pengemudi yang ugal-ugalan, dan rawannya tindak kriminal di dalam kendaraan umum.

Grafik 5.8. Persentase Rumah Tangga dengan Alasan Tidak Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dalam Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Daerah Tempat Tinggal



Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Bekerja Menurut Provinsi

Provinsi	Tanpa kendaraan	Sepeda	Becak/dokar	Sepeda motor	Mobil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	41,97	4,46	1,66	44,87	3,07
Sumatera Utara	46,79	3,55	2,08	39,73	2,11
Sumatera Barat	52,52	0,78	0,53	36,11	2,78
Riau	29,11	3,84	0,34	61,01	2,34
Jambi	37,27	1,53	0,19	54,27	2,52
Sumatera Selatan	37,47	3,90	0,82	50,14	2,85
Bengkulu	43,66	1,45	0,53	46,56	4,16
Lampung	38,60	6,05	0,41	49,04	2,15
Kep. Bangka Belitung	24,32	3,67	0,53	64,72	3,55
Kepulauan Riau	23,17	0,95	0,57	56,66	11,66
DKI Jakarta	32,68	2,33	0,52	40,31	12,27
Jawa Barat	53,96	3,31	0,71	30,03	2,93
Jawa Tengah	49,77	9,96	1,13	33,89	1,27
DI Yogyakarta	43,58	8,33	1,04	41,88	2,33
Jawa Timur	50,38	8,89	1,05	34,67	1,80
Banten	44,00	1,63	0,61	39,18	6,83
Bali	39,56	1,86	0,49	52,68	4,07
Nusa Tenggara Barat	61,87	1,50	1,36	26,95	2,39
Nusa Tenggara Timur	80,77	0,84	0,14	13,17	0,94
Kalimantan Barat	48,16	3,23	0,29	42,40	1,80
Kalimantan Tengah	30,71	6,09	0,40	48,86	3,55
Kalimantan Selatan	32,89	6,78	0,88	50,58	2,62
Kalimantan Timur	26,18	1,08	0,37	58,43	6,17
Sulawesi Utara	54,63	0,98	0,24	23,23	2,75
Sulawesi Tengah	54,84	1,20	0,38	35,89	2,07
Sulawesi Selatan	56,44	1,78	0,67	29,19	5,65
Sulawesi Tenggara	52,73	3,18	0,17	33,56	3,37
Gorontalo	55,63	2,46	1,03	23,89	2,61
Sulawesi Barat	61,37	2,61	0,56	29,07	2,69
Maluku	63,93	1,28	0,23	17,80	1,66
Maluku Utara	63,42	0,87	0,33	24,30	1,82
Papua Barat	54,39	1,08	0,71	26,38	1,33
Papua	68,72	0,58	0,78	17,46	1,27
Indonesia	48,14	5,03	0,85	37,02	3,01

Lanjutan Tabel 5.1

Provinsi	Kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu	Kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu	Kereta api	Lainnya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,85	1,34	-	0,78
Sumatera Utara	3,65	1,03	-	1,06
Sumatera Barat	3,94	2,81	-	0,53
Riau	0,85	0,69	-	1,83
Jambi	1,28	0,74	-	2,20
Sumatera Selatan	1,96	1,42	-	1,43
Bengkulu	1,46	1,33	-	0,85
Lampung	1,46	0,88	-	1,41
Kep. Bangka Belitung	0,17	0,88	-	2,16
Kepulauan Riau	3,99	1,16	-	1,84
DKI Jakarta	10,38	1,11	0,12	0,29
Jawa Barat	6,36	2,01	0,13	0,56
Jawa Tengah	2,73	0,62	0,03	0,62
DI Yogyakarta	0,71	1,02	-	1,10
Jawa Timur	1,62	0,74	0,03	0,82
Banten	6,24	1,03	0,11	0,37
Bali	0,79	0,30	-	0,25
Nusa Tenggara Barat	2,51	2,72	-	0,69
Nusa Tenggara Timur	1,85	2,02	-	0,26
Kalimantan Barat	0,67	1,08	-	2,37
Kalimantan Tengah	0,35	0,62	-	9,43
Kalimantan Selatan	1,34	1,32	-	3,59
Kalimantan Timur	2,33	0,88	-	4,56
Sulawesi Utara	9,56	6,68	-	1,92
Sulawesi Tengah	0,83	1,88	-	2,92
Sulawesi Selatan	3,43	1,73	-	1,11
Sulawesi Tenggara	2,11	2,88	-	2,00
Gorontalo	4,42	8,16	-	1,80
Sulawesi Barat	1,38	0,57	-	1,74
Maluku	6,08	4,11	-	4,92
Maluku Utara	3,27	3,28	-	2,72
Papua Barat	4,93	4,22	-	6,96
Papua	2,44	1,98	-	6,77
Indonesia	3,36	1,33	0,04	1,21

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga dengan Angkutan Utama yang Biasa Digunakan Menuju ke Tempat Sekolah Menurut Provinsi

Provinsi	Tanpa kendaraan	Sepeda	Becak/dokar	Sepeda motor	Mobil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,25	-	-	35,34	-
Sumatera Utara	44,48	1,27	-	35,82	-
Sumatera Barat	60,70	-	-	27,90	-
Riau	37,93	-	-	62,07	-
Jambi	-	24,54	-	51,86	-
Sumatera Selatan	22,25	5,46	10,47	49,58	-
Bengkulu	35,16	-	-	64,84	-
Lampung	67,15	-	-	20,27	-
Kep. Bangka Belitung	-	100,00	-	-	-
Kepulauan Riau	63,59	-	-	36,41	-
DKI Jakarta	34,92	-	-	65,08	-
Jawa Barat	69,31	-	-	24,21	-
Jawa Tengah	46,03	-	-	50,89	-
DI Yogyakarta	20,44	3,74	-	71,68	3,58
Jawa Timur	38,21	3,52	-	54,18	-
Banten	89,44	-	-	10,56	-
Bali	28,71	-	-	48,75	-
Nusa Tenggara Barat	76,07	-	-	17,54	-
Nusa Tenggara Timur	71,40	-	-	6,17	-
Kalimantan Barat	25,35	-	-	70,24	-
Kalimantan Tengah	63,84	-	-	32,60	-
Kalimantan Selatan	4,55	5,44	-	83,54	-
Kalimantan Timur	32,43	5,06	-	62,51	-
Sulawesi Utara	30,35	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	22,31	-	-	72,11	-
Sulawesi Selatan	39,44	-	-	47,63	-
Sulawesi Tenggara	72,70	-	-	22,41	-
Gorontalo	17,48	-	-	36,68	-
Sulawesi Barat	100,00	-	-	-	-
Maluku	29,87	-	-	6,16	-
Maluku Utara	78,51	-	-	8,65	-
Papua Barat	87,86	-	-	-	-
Papua	13,26	-	-	35,58	-
Indonesia	44,99	1,38	0,31	44,18	0,37

Lanjutan Tabel 5.2

Provinsi	Kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu	Kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu	Kereta api	Lainnya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,78	-	-	3,63
Sumatera Utara	18,42	-	-	-
Sumatera Barat	11,40	-	-	-
Riau	-	-	-	-
Jambi	23,61	-	-	-
Sumatera Selatan	12,25	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-
Lampung	-	1,35	-	11,23
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta		-	-	-
Jawa Barat	6,48	-	-	-
Jawa Tengah	3,09	-	-	-
DI Yogyakarta	0,55	-	-	-
Jawa Timur	4,08	-	-	-
Banten	-	-	-	-
Bali	22,54	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	3,40	-	3,00
Nusa Tenggara Timur	22,43	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	4,41
Kalimantan Tengah	-	-	-	3,56
Kalimantan Selatan	-	-	-	6,47
Kalimantan Timur	-	-	-	-
Sulawesi Utara	67,27	2,38	-	-
Sulawesi Tengah	5,58	-	-	-
Sulawesi Selatan	10,28	1,61	-	1,04
Sulawesi Tenggara	4,89	-	-	-
Gorontalo	27,51	18,34	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	46,83	13,74	-	3,40
Maluku Utara	5,04	7,80	-	-
Papua Barat	-	12,14	-	-
Papua	51,16	-	-	-
Indonesia	7,34	0,65	-	0,78

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Premium	Pertamax	Biofuel	Premium	Pertamax	Biofuel	Premium	Pertamax	Biofuel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	99,45	0,39	0,17	99,09	0,80	0,11	99,20	0,67	0,13
Sumatera Utara	98,98	1,02	-	99,01	0,99	-	98,99	1,01	-
Sumatera Barat	98,99	1,01	-	98,50	1,50	-	98,70	1,30	-
Riau	97,80	2,20	-	98,68	1,32	-	98,33	1,67	-
Jambi	98,78	0,92	0,30	98,69	1,31	-	98,72	1,19	0,09
Sumatera Selatan	99,52	0,48	-	98,70	1,30	-	98,99	1,01	-
Bengkulu	97,64	2,36	-	99,04	0,96	-	98,57	1,43	-
Lampung	99,38	0,62	-	98,79	1,21	-	98,93	1,07	-
Kep. Bangka Belitung	98,73	1,27	-	99,02	0,98	-	98,87	1,13	-
Kepulauan Riau	97,09	2,91	-	99,57	0,43	-	97,44	2,56	-
DKI Jakarta	93,35	6,61	0,04	-	-	-	93,35	6,61	0,04
Jawa Barat	96,64	3,36	-	98,82	1,18	-	97,29	2,71	-
Jawa Tengah	97,56	2,44	-	99,12	0,88	-	98,39	1,61	-
DI Yogyakarta	97,04	2,65	0,31	98,39	1,61	-	97,41	2,36	0,23
Jawa Timur	98,31	1,65	0,03	99,20	0,78	0,03	98,76	1,21	0,03
Banten	96,84	3,10	0,06	98,58	1,42	-	97,25	2,70	0,05
Bali	99,38	0,62	-	99,41	0,45	0,14	99,39	0,56	0,05
Nusa Tenggara Barat	97,92	2,08	-	99,27	0,73	-	98,66	1,34	-
Nusa Tenggara Timur	96,75	2,82	0,43	96,78	3,22	-	96,77	3,07	0,17
Kalimantan Barat	98,37	1,63	-	99,19	0,64	0,17	98,91	0,97	0,11
Kalimantan Tengah	98,23	1,77	-	98,32	1,68	-	98,28	1,72	-
Kalimantan Selatan	98,15	1,61	0,25	99,14	0,86	-	98,69	1,20	0,11
Kalimantan Timur	97,93	2,07	-	99,68	0,32	-	98,59	1,41	-
Sulawesi Utara	98,58	1,42	-	98,83	-	-	98,71	1,29	-
Sulawesi Tengah	99,29	0,71	-	98,64	1,17	0,14	98,83	1,07	0,10
Sulawesi Selatan	98,03	1,97	-	99,03	1,22	-	98,62	1,38	-
Sulawesi Tenggara	99,51	0,49	-	98,15	0,97	-	98,57	1,43	-
Gorontalo	98,57	1,43	-	96,60	1,85	-	97,38	2,62	-
Sulawesi Barat	98,92	1,08	-	100,00	3,40	-	99,73	0,27	-
Maluku	97,29	2,71	-	99,75	0,25	-	98,36	1,64	-
Maluku Utara	97,52	2,48	-	99,28	0,72	-	98,62	1,38	-
Papua Barat	99,07	0,93	-	98,17	1,83	-	98,54	1,46	-
Papua	98,91	0,48	0,61	97,10	2,90	-	98,26	1,35	0,39
Indonesia	97,40	2,57	0,03	98,94	1,04	0,02	98,12	1,85	0,03

Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Sepeda Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Sendiri	Berboncengan	Sendiri	Berboncengan	Sendiri	Berboncengan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,35	56,65	41,17	58,83	41,85	58,15
Sumatera Utara	55,83	44,17	45,98	54,02	51,12	48,88
Sumatera Barat	54,31	45,69	50,16	49,84	51,85	48,15
Riau	55,74	44,26	39,80	60,20	46,19	53,81
Jambi	42,34	57,66	42,00	58,00	42,10	57,90
Sumatera Selatan	53,65	46,35	42,87	57,13	46,65	53,35
Bengkulu	54,29	45,71	50,10	49,90	51,51	48,49
Lampung	44,29	55,71	42,21	57,79	42,70	57,30
Kep. Bangka Belitung	66,00	34,00	48,69	51,31	57,41	42,59
Kepulauan Riau	64,08	35,92	52,02	47,98	62,38	37,62
DKI Jakarta	59,49	40,51	-	-	59,49	40,51
Jawa Barat	57,83	42,17	59,66	40,34	58,38	41,62
Jawa Tengah	53,42	46,58	56,24	43,76	54,94	45,06
DI Yogyakarta	60,96	39,04	56,23	43,77	59,64	40,36
Jawa Timur	51,90	48,10	49,53	50,47	50,70	49,30
Banten	55,02	44,98	55,07	44,93	55,04	44,96
Bali	69,21	30,79	60,12	39,88	66,08	33,92
Nusa Tenggara Barat	61,54	38,46	53,07	46,93	56,85	43,15
Nusa Tenggara Timur	42,11	57,89	39,07	60,93	40,23	59,77
Kalimantan Barat	48,10	51,90	49,64	50,36	49,12	50,88
Kalimantan Tengah	44,21	55,79	45,03	54,97	44,71	55,29
Kalimantan Selatan	56,82	43,18	47,22	52,78	51,53	48,47
Kalimantan Timur	57,97	42,03	46,65	53,35	53,71	46,29
Sulawesi Utara	41,80	58,20	41,02	58,98	41,39	58,61
Sulawesi Tengah	53,30	46,70	39,91	60,09	43,95	56,05
Sulawesi Selatan	46,17	53,83	46,45	53,55	46,33	53,67
Sulawesi Tenggara	49,59	50,41	35,85	64,15	40,13	59,87
Gorontalo	48,11	51,89	40,66	59,34	43,61	56,39
Sulawesi Barat	59,39	40,61	54,39	45,61	55,65	44,35
Maluku	41,31	58,69	31,46	68,54	37,04	62,96
Maluku Utara	49,35	50,65	28,80	71,20	36,52	63,48
Papua Barat	51,49	48,51	33,82	66,18	40,98	59,02
Papua	44,20	55,80	32,89	67,11	40,13	59,87
Indonesia	55,13	44,87	49,56	50,44	52,53	47,47

Tabel 5.5 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama Perahu Motor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Solar	Premium	Lainnya	Solar	Premium	Lainnya	Solar	Premium	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	22,43	77,57	-	22,22	77,78	-	22,31	77,69	-
Sumatera Utara	31,49	68,51	-	83,19	16,81	-	55,33	44,67	-
Sumatera Barat	85,96	14,04	-	53,45	44,15	2,40	58,00	39,94	2,06
Riau	100,0	-	-	82,14	17,86	-	83,05	16,95	-
Jambi	74,40	25,60	-	49,90	50,10	-	57,73	42,27	-
Sumatera Selatan	56,91	43,09	-	37,74	62,26	-	40,27	59,73	-
Bengkulu	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-
Lampung	17,56	82,44	-	24,65	75,35	-	22,69	77,31	-
Kep. Bangka Belitung	38,77	61,23	-	72,56	27,44	-	59,88	40,12	-
Kepulauan Riau	40,81	59,19	-	94,02	5,98	-	53,89	46,11	-
DKI Jakarta	48,45	51,55	-	-	-	-	48,45	51,55	-
Jawa Barat	11,14	88,86	-	23,34	76,66	-	18,06	81,94	-
Jawa Tengah	67,38	32,62	-	-	100,00	-	59,59	40,41	-
DI Yogyakarta	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-
Jawa Timur	49,89	50,11	-	46,51	53,49	-	48,48	51,52	-
Banten	42,86	57,14	-	20,50	79,50	-	38,27	61,73	-
Bali	-	100,00	-	100,0	-	-	49,95	50,05	-
Nusa Tenggara Barat	74,77	25,23	-	55,20	44,80	-	60,17	39,83	-
Nusa Tenggara Timur	57,62	42,38	-	80,77	19,23	-	75,03	24,97	-
Kalimantan Barat	26,82	73,18	-	22,73	77,27	-	23,97	76,03	-
Kalimantan Tengah	30,76	63,13	6,11	34,50	65,50	-	34,14	65,27	0,59
Kalimantan Selatan	67,38	32,62	-	37,59	61,29	1,12	43,48	55,62	0,90
Kalimantan Timur	23,72	76,28	-	26,51	71,89	1,60	25,67	73,22	1,12
Sulawesi Utara	46,23	53,77	-	2,31	97,69	-	9,09	90,91	-
Sulawesi Tengah	-	100,00	-	8,22	91,78	-	6,66	93,34	-
Sulawesi Selatan	50,71	49,29	-	44,16	55,84	-	45,24	54,76	-
Sulawesi Tenggara	34,07	56,33	9,60	18,92	72,23	8,85	22,50	68,47	9,03
Gorontalo	-	100,00	-	8,76	91,24	-	8,02	91,98	-
Sulawesi Barat	-	-	-	18,34	71,20	10,46	18,34	71,20	10,46
Maluku	9,39	90,61	-	21,77	69,16	9,07	18,21	75,33	6,46
Maluku Utara	26,02	73,98	-	10,68	85,65	3,67	11,54	85,00	3,46
Papua Barat	28,45	60,17	11,37	1,82	93,31	4,86	5,77	88,41	5,83
Papua	-	100,00	-	2,67	71,83	25,51	2,38	74,87	22,76
Indonesia	39,88	59,77	0,35	36,54	61,94	1,52	37,66	61,21	1,13

Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bahan Bakar Utama Mobil Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Solar	Premium	Pertamax	Solar	Premium	Pertamax	Solar	Premium	Pertamax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	12,03	87,07	0,90	35,25	64,75	-	22,94	76,59	0,48
Sumatera Utara	22,54	74,04	3,42	36,75	63,25	-	26,26	71,22	2,53
Sumatera Barat	5,21	93,20	1,58	26,57	73,43	-	12,72	86,25	1,03
Riau	12,71	84,35	2,94	24,48	75,52	-	17,19	80,99	1,82
Jambi	18,20	79,19	2,60	26,17	73,83	-	21,91	76,70	1,39
Sumatera Selatan	14,89	83,96	1,15	30,23	69,77	-	20,83	78,46	0,70
Bengkulu	9,84	90,16	-	23,40	76,60	-	16,26	83,74	-
Lampung	15,90	84,10	-	39,32	60,68	-	28,65	71,35	-
Kep. Bangka Belitung	16,32	83,68	-	24,72	75,28	-	19,29	80,71	-
Kepulauan Riau	7,93	88,49	3,58	-	100,00	-	7,75	88,76	3,50
DKI Jakarta	3,42	78,20	18,39	-	-	-	3,42	78,20	18,39
Jawa Barat	3,72	88,31	7,97	17,26	80,89	1,85	5,43	87,37	7,20
Jawa Tengah	11,24	86,84	1,93	19,31	79,34	1,35	14,23	84,06	1,72
DI Yogyakarta	5,95	92,93	1,13	4,57	88,01	7,42	5,77	92,28	1,96
Jawa Timur	17,18	74,80	8,01	27,36	72,64	-	20,50	74,10	5,40
Banten	4,41	87,58	8,01	9,28	90,72	-	4,66	87,74	7,60
Bali	6,50	92,25	1,26	11,49	86,12	2,39	7,47	91,06	1,48
Nusa Tenggara Barat	8,56	91,44	-	7,57	92,43	-	8,23	91,77	-
Nusa Tenggara Timur	17,32	80,53	2,15	25,44	74,56	-	20,35	78,30	1,35
Kalimantan Barat	7,65	92,35	-	54,96	45,04	-	26,58	73,42	-
Kalimantan Tengah	15,60	83,27	1,13	29,20	70,80	-	22,39	77,05	0,57
Kalimantan Selatan	9,15	89,35	1,51	22,62	77,38	-	13,22	85,73	1,05
Kalimantan Timur	9,77	85,76	4,48	21,14	77,52	1,35	13,14	83,31	3,55
Sulawesi Utara	4,05	95,95	-	6,39	93,61	-	5,02	94,98	-
Sulawesi Tengah	7,34	92,66	-	5,35	94,65	-	6,27	93,73	-
Sulawesi Selatan	8,07	90,01	1,92	15,00	85,00	-	11,05	87,86	1,09
Sulawesi Tenggara	9,83	90,17	-	12,02	87,98	-	10,60	89,40	-
Gorontalo	9,20	90,80	-	14,41	85,59	-	11,24	88,76	-
Sulawesi Barat	8,30	91,70	-	9,28	90,72	-	8,88	91,12	-
Maluku	7,45	92,55	-	-	100,00	-	6,85	93,15	-
Maluku Utara	-	95,19	4,81	41,86	58,14	-	22,67	75,12	2,21
Papua Barat	14,46	85,54	-	52,45	41,30	6,25	32,87	64,10	3,03
Papua	18,52	81,48	-	53,51	46,49	-	31,44	68,56	-
Indonesia	9,12	84,53	6,35	23,87	75,56	0,57	12,92	82,22	4,86

Tabel 5.7 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Mobil Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Sendiri	Bersama	Sendiri	Bersama	Sendiri	Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	30,31	69,69	44,73	55,27	37,08	62,92
Sumatera Utara	28,53	71,47	28,13	71,87	28,43	71,57
Sumatera Barat	36,28	63,72	31,24	68,76	34,51	65,49
Riau	33,25	66,75	22,86	77,14	29,29	70,71
Jambi	24,39	75,61	34,02	65,98	28,87	71,13
Sumatera Selatan	35,03	64,97	32,83	67,17	34,18	65,82
Bengkulu	40,13	59,87	27,82	72,18	34,30	65,70
Lampung	26,70	73,30	24,18	75,82	25,32	74,68
Kep. Bangka Belitung	35,06	64,94	32,14	67,86	34,03	65,97
Kepulauan Riau	36,89	63,11	8,87	91,13	36,23	63,77
DKI Jakarta	38,18	61,82	-	-	38,18	61,82
Jawa Barat	31,25	68,75	48,29	51,71	33,41	66,59
Jawa Tengah	24,88	75,12	29,89	70,11	26,74	73,26
DI Yogyakarta	19,64	80,36	19,78	80,22	19,66	80,34
Jawa Timur	24,25	75,75	26,58	73,42	25,01	74,99
Banten	33,15	66,85	46,63	53,37	33,83	66,17
Bali	28,60	71,40	26,53	73,47	28,20	71,80
Nusa Tenggara Barat	32,12	67,88	22,50	77,50	28,95	71,05
Nusa Tenggara Timur	14,57	85,43	30,38	69,62	20,47	79,53
Kalimantan Barat	32,69	67,31	42,84	57,16	36,75	63,25
Kalimantan Tengah	35,88	64,12	44,54	55,46	40,20	59,80
Kalimantan Selatan	28,18	71,82	31,35	68,65	29,14	70,86
Kalimantan Timur	27,64	72,36	22,15	77,85	26,01	73,99
Sulawesi Utara	36,96	63,04	36,33	63,67	36,70	63,30
Sulawesi Tengah	35,74	64,26	29,31	70,69	32,30	67,70
Sulawesi Selatan	22,34	77,66	28,80	71,20	25,11	74,89
Sulawesi Tenggara	37,42	62,58	39,89	60,11	38,28	61,72
Gorontalo	31,92	68,08	18,93	81,07	26,82	73,18
Sulawesi Barat	28,75	71,25	26,77	73,23	27,57	72,43
Maluku	35,67	64,33	100,00	-	40,83	59,17
Maluku Utara	27,51	72,49	45,81	54,19	37,42	62,58
Papua Barat	20,83	79,17	31,34	68,66	25,92	74,08
Papua	28,15	71,85	72,23	27,77	44,42	55,58
Indonesia	30,05	69,95	31,53	68,47	30,43	69,57

Tabel 5.8 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan							
	Tidak ada	Sepeda motor	Perahu motor	Mobil	Sepeda motor & Perahu motor	Sepeda motor& mobil	Perahu motor & Mobil	Sepeda motor, Perahu motor & mobil
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	15,14	68,23	0,22	0,17	0,97	14,85	-	0,44
Sumatera Utara	21,17	66,51	0,09	0,49	0,71	10,33	-	0,69
Sumatera Barat	18,95	61,85	-	0,84	0,13	18,07	-	0,16
Riau	8,96	74,93	-	0,36	0,26	15,49	-	-
Jambi	13,70	65,79	-	1,22	1,98	17,32	-	-
Sumatera Selatan	17,11	64,36	0,29	1,86	0,31	15,94	-	0,12
Bengkulu	10,92	70,78	-	1,31	0,64	16,35	-	-
Lampung	22,22	66,16	-	0,98	0,85	9,61	-	0,18
Kep. Bangka Belitung	8,70	70,63	-	0,97	4,14	15,21	-	0,36
Kepulauan Riau	7,26	65,82	4,64	6,69	3,16	12,27	-	0,15
DKI Jakarta	18,75	62,12	0,03	4,98	0,14	13,89	-	0,08
Jawa Barat	30,63	58,14	0,05	1,14	0,20	9,79	-	0,04
Jawa Tengah	24,07	65,95	0,15	0,31	0,47	9,01	-	0,02
DI Yogyakarta	13,58	69,75	-	0,48	0,21	15,97	-	-
Jawa Timur	18,56	68,72	0,09	0,58	0,39	11,53	-	0,14
Banten	16,88	64,47	-	1,33	1,50	15,70	-	0,12
Bali	8,64	65,88	0,04	0,45	0,13	24,44	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	42,32	50,05	0,10	0,29	0,29	6,96	-	-
Nusa Tenggara Timur	35,96	50,36	0,24	1,45	0,64	11,35	-	-
Kalimantan Barat	9,79	73,90	2,39	0,48	1,70	11,47	-	0,28
Kalimantan Tengah	11,15	72,56	1,32	0,53	1,82	12,17	-	0,44
Kalimantan Selatan	12,03	70,90	1,05	0,85	1,93	12,91	-	0,33
Kalimantan Timur	8,65	72,71	1,11	1,23	1,71	14,10	0,28	0,20
Sulawesi Utara	46,75	41,52	0,10	4,30	0,09	6,94	0,07	0,22
Sulawesi Tengah	14,17	70,70	2,52	,89	1,00	10,73	-	-
Sulawesi Selatan	21,28	59,45	0,57	1,47	0,62	16,13	-	0,47
Sulawesi Tenggara	26,02	56,14	0,43	,97	0,96	14,54	-	0,94
Gorontalo	39,21	50,90	0,42	1,04	0,42	8,00	-	-
Sulawesi Barat	29,34	60,09	-	1,41	-	9,16	-	-
Maluku	42,08	47,07	1,50	1,92	0,54	6,75	-	0,14
Maluku Utara	37,44	56,60	0,83	0,27	0,71	4,15	-	-
Papua Barat	30,91	58,97	2,11	-	1,50	6,14	-	0,38
Papua	30,27	60,16	-	1,04	0,88	7,45	-	0,20
Indonesia	22,22	63,67	0,24	1,28	0,57	11,88	0,01	0,14

Lanjutan Tabel 5.8

Provinsi	Pedesaan							
	Tidak ada	Sepeda motor	Perahu motor	Mobil	Sepeda motor & Perahu motor	Sepeda motor& mobil	Perahu motor & Mobil	Sepeda motor, Perahu motor & mobil
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	28,30	65,60	0,18	0,23	0,63	5,02	-	0,03
Sumatera Utara	31,75	63,28	0,36	0,34	0,77	3,43	-	0,07
Sumatera Barat	26,84	65,88	0,03	0,25	0,83	5,93	-	0,24
Riau	14,02	76,91	1,09	-	1,89	6,02	-	0,08
Jambi	17,04	74,65	0,26	0,19	1,35	6,37	-	0,14
Sumatera Selatan	21,39	70,85	0,20	0,41	1,65	4,87	-	0,63
Bengkulu	22,51	70,23	-	0,34	0,21	6,63	-	0,08
Lampung	17,82	77,22	-	0,11	0,76	3,98	-	0,12
Kep. Bangka Belitung	10,32	74,52	0,70	-	5,46	7,70	-	1,31
Kepulauan Riau	22,04	62,19	4,18	-	9,07	1,47	-	1,05
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	46,09	50,39	0,06	0,38	0,55	2,43	-	0,10
Jawa Tengah	29,10	66,38	-	0,21	0,07	4,24	-	-
DI Yogyakarta	29,14	65,25	-	-	0,25	5,37	-	-
Jawa Timur	27,23	67,27	0,12	0,08	0,24	5,04	-	0,03
Banten	40,75	56,33	-	-	0,79	1,95	-	0,17
Bali	21,89	67,25	0,41	0,11	0,55	9,78	-	-
Nusa Tenggara Barat	48,43	48,32	0,33	0,10	0,35	2,34	-	0,14
Nusa Tenggara Timur	74,91	22,59	0,56	0,15	0,09	1,70	-	-
Kalimantan Barat	25,64	66,73	1,78	0,16	2,42	3,22	-	0,05
Kalimantan Tengah	20,29	56,33	8,08	-	8,66	6,22	0,07	0,35
Kalimantan Selatan	19,34	66,75	4,54	0,20	5,00	4,07	-	0,10
Kalimantan Timur	8,73	68,76	3,81	0,68	7,91	9,49	-	0,62
Sulawesi Utara	51,63	39,57	1,02	2,00	1,10	4,60	-	0,08
Sulawesi Tengah	35,10	55,79	3,78	0,10	1,03	4,20	-	-
Sulawesi Selatan	34,26	53,35	2,09	0,60	2,58	7,02	-	0,10
Sulawesi Tenggara	35,88	57,90	0,87	0,16	1,87	3,11	-	0,21
Gorontalo	48,71	43,55	3,45	0,20	1,21	2,67	-	0,20
Sulawesi Barat	40,91	52,49	0,83	0,47	1,44	3,86	-	-
Maluku	68,99	26,80	2,60	-	1,09	0,52	-	-
Maluku Utara	53,72	34,62	6,33	0,69	3,33	1,00	-	0,32
Papua Barat	50,31	37,54	7,79	0,22	1,77	2,22	-	0,15
Papua	85,04	11,15	1,92	0,16	0,19	0,65	0,05	0,82
Indonesia	32,92	60,75	0,71	0,24	1,03	4,24	0,00	0,12

Lanjutan Tabel 5.8

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan							
	Tidak ada	Sepeda motor	Perahu motor	Mobil	Sepeda motor & Perahu motor	Sepeda motor & mobil	Perahu motor & Mobil	Sepeda motor, Perahu motor & mobil
	(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Aceh	24,63	66,33	0,19	0,22	0,73	7,76	-	0,15
Sumatera Utara	26,61	64,85	0,23	0,42	0,74	6,78	-	0,37
Sumatera Barat	23,81	64,34	0,02	0,48	0,56	10,58	-	0,21
Riau	12,07	76,15	0,67	0,14	1,26	9,66	-	0,05
Jambi	16,06	72,04	0,18	0,49	1,54	9,59	-	0,10
Sumatera Selatan	19,92	68,63	0,23	0,91	1,19	8,66	-	0,45
Bengkulu	18,94	70,40	-	0,64	0,34	9,62	-	0,05
Lampung	18,90	74,49	-	0,32	0,78	5,36	-	0,13
Kep. Bangka Belitung	9,51	72,58	0,35	0,48	4,80	11,45	-	0,83
Kepulauan Riau	9,53	65,27	4,57	5,66	4,07	10,62	-	0,29
DKI Jakarta	18,75	62,12	0,03	4,98	0,14	13,89	-	0,08
Jawa Barat	36,08	55,41	0,06	0,87	0,32	7,20	-	0,07
Jawa Tengah	26,85	66,19	0,07	0,26	0,25	6,37	-	0,01
DI Yogyakarta	18,54	68,32	-	0,33	0,22	12,59	-	-
Jawa Timur	23,20	67,94	0,11	0,31	0,31	8,05	-	0,08
Banten	24,09	62,02	-	0,93	1,28	11,55	-	0,13
Bali	13,69	66,40	0,19	0,32	0,29	18,85	-	0,26
Nusa Tenggara Barat	45,87	49,04	0,23	0,18	0,33	4,27	-	0,08
Nusa Tenggara Timur	67,29	28,02	0,49	0,41	0,20	3,59	-	-
Kalimantan Barat	20,95	68,85	1,96	0,25	2,20	5,66	-	0,12
Kalimantan Tengah	17,22	61,79	5,80	0,18	6,36	8,22	0,05	0,38
Kalimantan Selatan	16,29	68,48	3,08	0,47	3,72	7,76	-	0,20
Kalimantan Timur	8,68	71,20	2,15	1,02	4,08	12,34	0,17	0,36
Sulawesi Utara	49,42	40,46	0,60	3,04	0,64	5,66	0,03	-
Sulawesi Tengah	30,02	59,41	3,48	0,29	1,02	5,78	-	0,14
Sulawesi Selatan	29,56	55,56	1,54	0,91	1,87	10,32	-	-
Sulawesi Tenggara	33,10	57,41	0,75	0,39	1,62	6,33	-	0,24
Gorontalo	45,43	46,09	2,41	0,49	0,94	4,51	-	0,42
Sulawesi Barat	38,37	54,16	0,65	0,68	1,12	5,02	-	0,13
Maluku	58,08	35,02	2,15	0,78	0,87	3,05	-	0,06
Maluku Utara	49,19	40,73	4,80	0,57	2,60	1,88	-	0,23
Papua Barat	44,54	43,92	6,10	0,15	1,68	3,39	-	0,22
Papua	71,39	23,37	1,45	0,38	0,37	2,34	0,04	0,67
Indonesia	27,59	62,21	0,47	0,76	0,80	8,05	0,00	0,13

Tabel 5.9 Persentase Rumah Tangga yang Merawat Mesin Kendaraannya Secara Rutin Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki

Provinsi	Sepeda motor	Perahu motor	Mobil	Sepeda motor & Perahu motor	Sepeda motor & mobil	Perahu motor & Mobil	Sepeda motor, Perahu motor & mobil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	61,39	71,53	72,86	39,51	84,07	-	83,03	63,61
Sumatera Utara	65,26	73,18	56,31	69,93	85,51	-	75,66	67,20
Sumatera Barat	59,90	-	61,18	65,17	80,14	-	86,23	62,82
Riau	68,86	73,45	100,00	58,67	88,59	-	100,00	70,98
Jambi	61,16	32,59	89,88	48,44	77,02	-	100,00	62,89
Sumatera Selatan	56,71	100,00	91,13	61,81	76,53	-	73,13	59,54
Bengkulu	50,25	-	82,04	46,49	78,02	-	100,00	53,82
Lampung	58,90	-	88,91	65,50	89,54	-	-	61,01
Kep. Bangka Belitung	66,27	100,00	100,00	61,31	86,99	-	85,99	69,12
Kepulauan Riau	77,88	58,48	80,14	81,20	89,17	-	70,26	78,49
DKI Jakarta	80,32	85,05	91,67	91,77	93,52	-	100,00	83,32
Jawa Barat	74,61	-	90,83	74,67	90,17	-	100,00	76,54
Jawa Tengah	68,45	100,00	77,23	74,39	86,19	-	100,00	70,08
DI Yogyakarta	Sepeda motor	Perahu motor	100,00	100,00	78,61	-		68,67
Jawa Timur	65,26	69,46	78,46	74,91	80,57	-	100,00	67,00
Banten	68,63	-	91,37	76,57	93,37	-	100,00	72,86
Bali	72,73	85,19	92,70	100,00	88,69	-	100,00	76,49
Nusa Tenggara Barat	68,53	100,00	67,81	92,89	93,16	-	100,00	70,80
Nusa Tenggara Timur	63,40	70,45	66,71	81,21	66,11	-		63,95
Kalimantan Barat	71,21	33,81	100,00	81,09	83,29	-	100,00	71,56
Kalimantan Tengah	71,42	53,62	37,66	64,94	82,68	-	41,53	70,54
Kalimantan Selatan	59,60	33,62	81,18	56,07	78,18	-	70,47	60,36
Kalimantan Timur	72,26	34,32	80,95	61,76	82,52	100,00	87,15	72,49
Sulawesi Utara	70,27	60,24	85,23	69,32	87,42	100,00	100,00	73,06
Sulawesi Tengah	58,41	66,39	100,00	72,22	83,74	-		61,27
Sulawesi Selatan	58,72	80,41	68,98	69,00	76,58	-	46,78	62,18
Sulawesi Tenggara	59,40	67,18	84,59	69,61	70,39	-	78,26	61,04
Gorontalo	52,18	62,41	43,03	69,13	90,53	-	100,00	56,13
Sulawesi Barat	55,73	51,77	54,43	44,10	59,29	-		55,75
Maluku	51,02	33,48	21,33	67,55	67,40	-	100,00	51,17
Maluku Utara	40,92	40,72	62,79	45,78	66,89	-	100,00	42,62
Papua Barat	54,54	46,27	75,16	44,10	76,10	-	49,06	54,66
Papua	76,43	75,81	85,54	87,36	85,14	-	78,45	77,32
Indonesia	67,37	55,99	85,21	67,99	85,27	77,12	80,90	69,51

Tabel 5.10 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Kendaraan Bermotor yang Dimiliki Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor dan Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor dan Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor dan Mobil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,29	21,47	38,84	44,14	51,39	37,79	63,43	72,86	76,63
Sumatera Utara	31,39	44,06	59,60	27,57	24,22	18,30	58,97	68,28	77,90
Sumatera Barat	23,56	37,27	45,74	36,59	10,45	24,81	60,15	47,72	70,56
Riau	21,86	100,00	44,40	32,00	-	27,85	53,86	100,00	72,25
Jambi	15,27	35,96	31,98	40,39	27,08	35,25	55,66	63,04	67,24
Sumatera Selatan	16,16	56,42	41,15	37,97	23,89	24,33	54,13	80,32	65,48
Bengkulu	12,64	62,88	34,57	38,02	17,96	26,11	50,66	80,85	60,67
Lampung	13,80	59,47	35,06	30,50	13,64	36,66	44,30	73,11	71,72
Kep. Bangka Belitung	37,80	100,00	55,72	38,66	-	33,88	76,46	100,00	89,59
Kepulauan Riau	62,52	86,76	75,24	9,62	-	2,95	72,14	86,76	78,19
DKI Jakarta	67,48	63,68	84,48	-	-	-	67,48	63,68	84,48
Jawa Barat	38,12	62,34	66,73	15,48	10,80	8,84	53,60	73,14	75,57
Jawa Tengah	25,07	45,01	45,39	26,59	18,92	23,92	51,66	63,93	69,31
DI Yogyakarta	43,18	56,09	67,88	19,73	-	10,74	62,91	56,09	78,63
Jawa Timur	31,76	55,18	53,15	32,32	8,05	25,54	64,08	63,23	78,70
Banten	48,78	100,00	71,92	11,68	-	3,31	60,47	100,00	75,23
Bali	37,24	79,02	61,24	25,76	13,67	15,62	63,00	92,70	76,86
Nusa Tenggara Barat	16,84	42,36	49,63	21,81	32,19	20,07	38,65	74,55	69,70
Nusa Tenggara Timur	21,77	21,67	39,21	39,60	30,11	27,78	61,37	51,78	66,99
Kalimantan Barat	15,87	55,47	38,68	39,80	44,53	28,53	55,67	100,00	67,20
Kalimantan Tengah	23,95	29,99	41,74	44,91	-	42,65	68,87	29,99	84,39
Kalimantan Selatan	15,56	37,64	35,94	20,26	9,56	13,71	35,82	47,20	49,65
Kalimantan Timur	35,33	40,23	49,99	20,20	12,56	23,32	55,53	52,79	73,31
Sulawesi Utara	31,83	50,47	45,36	35,52	30,93	31,91	67,35	81,40	77,27
Sulawesi Tengah	13,66	44,79	25,37	42,51	25,15	43,67	56,17	69,94	69,04
Sulawesi Selatan	22,54	39,45	45,64	33,17	29,06	30,24	55,71	68,51	75,89
Sulawesi Tenggara	15,66	70,15	37,78	32,29	29,85	23,97	47,94	100,00	61,76
Gorontalo	14,71	59,62	52,05	29,59	27,17	37,95	44,30	86,78	90,00
Sulawesi Barat	10,70	21,37	14,08	45,55	54,43	45,85	56,25	75,80	59,93
Maluku	19,41	27,70	28,05	26,53	62,79	2,69	45,94	27,70	30,75
Maluku Utara	11,16	-	26,02	38,25	75,16	23,38	49,41	62,79	49,40
Papua Barat	22,41	-	27,97	13,52	25,31	21,58	35,93	75,16	49,55
Papua	42,30	35,85	55,08	17,28	-	18,64	59,58	61,16	73,72
Indonesia	30,66	60,35	55,61	26,09	10,47	19,01	56,75	70,83	74,62

Tabel 5.11 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi dan Jenis Usaha yang Dilakukan Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan					
	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dengan Rute Tertentu	Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor tanpa Rute Tertentu	Jenis Usaha yang Dilakukan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,95	12,73	20,95	47,23	71,33	8,65
Sumatera Utara	10,88	49,79	22,03	58,61	34,91	3,84
Sumatera Barat	11,28	51,02	23,39	57,61	39,18	16,83
Riau	14,99	23,00	14,49	67,06	44,65	12,79
Jambi	8,98	11,66	45,21	48,98	69,64	10,46
Sumatera Selatan	5,94	31,98	25,27	61,24	26,43	5,94
Bengkulu	8,76	33,90	21,73	55,38	53,95	7,26
Lampung	11,13	52,56	31,33	78,72	54,59	5,08
Kep. Bangka Belitung	8,72	11,63	-	48,37	57,75	17,45
Kepulauan Riau	8,56	19,47	9,90	62,35	38,25	17,28
DKI Jakarta	10,05	58,84	17,27	57,80	41,45	4,15
Jawa Barat	14,68	52,07	25,55	63,94	29,35	4,36
Jawa Tengah	16,82	29,32	7,23	80,77	46,45	11,48
DI Yogyakarta	13,32	10,91	6,52	65,53	27,61	26,59
Jawa Timur	11,69	24,90	8,81	73,78	42,90	15,66
Banten	11,62	60,17	32,92	55,09	35,43	3,18
Bali	8,37	8,46	8,13	67,28	55,96	3,73
Nusa Tenggara Barat	12,33	15,46	9,38	72,14	51,72	12,84
Nusa Tenggara Timur	18,45	53,17	50,92	84,51	70,96	1,39
Kalimantan Barat	9,92	14,51	20,57	75,67	56,05	19,69
Kalimantan Tengah	12,42	32,59	32,93	80,22	66,06	4,96
Kalimantan Selatan	10,49	36,33	16,05	74,89	57,10	8,13
Kalimantan Timur	11,32	36,77	25,03	50,27	45,33	11,34
Sulawesi Utara	16,50	62,13	44,87	64,48	24,35	1,58
Sulawesi Tengah	8,11	35,38	20,80	49,94	44,90	13,30
Sulawesi Selatan	12,12	64,07	51,81	52,79	33,85	6,95
Sulawesi Tenggara	12,75	27,05	43,30	60,16	50,63	7,32
Gorontalo	16,31	25,72	30,01	60,09	31,33	4,29
Sulawesi Barat	4,20	100,00	50,00	74,38	25,62	-
Maluku	10,99	67,03	53,00	64,16	16,02	6,91
Maluku Utara	3,70	31,97	76,07	71,40	44,09	41,24
Papua Barat	7,67	50,98	45,48	39,20	16,96	-
Papua	11,58	51,69	45,64	66,52	41,48	3,06
Indonesia	12,57	39,86	19,44	66,90	39,82	8,89

Lanjutan Tabel 5.11

Provinsi	Pedesaan					
	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Jenis Usaha yang Dilakukan				
		Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dengan Rute Tertentu	Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor tanpa Rute Tertentu	Jalan Kaki/ Menggunakan Sepeda	Menggunakan Kendaraan Secara Bersama	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	14,40	23,01	20,28	77,56	61,61	1,75
Sumatera Utara	13,19	38,87	11,41	73,20	47,94	3,94
Sumatera Barat	11,36	20,09	30,63	74,84	30,93	6,43
Riau	13,08	4,11	3,59	78,12	47,65	12,89
Jambi	8,96	3,58	6,99	72,43	40,97	7,39
Sumatera Selatan	11,20	19,22	17,91	87,00	39,72	3,10
Bengkulu	14,21	10,59	9,47	92,79	39,87	8,31
Lampung	7,50	22,93	11,28	84,56	32,40	5,03
Kep. Bangka Belitung	9,50	16,06	10,72	70,39	81,11	2,73
Kepulauan Riau	7,61	-	-	55,68	57,22	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,07	19,54	24,62	80,71	33,54	12,55
Jawa Tengah	13,70	23,57	11,05	85,94	47,91	5,07
DI Yogyakarta	8,52	14,44	6,17	82,98	38,05	8,28
Jawa Timur	14,63	11,80	5,45	82,83	42,77	8,41
Banten	12,93	31,51	9,96	85,18	39,23	2,57
Bali	12,53	6,25	9,17	86,90	35,63	2,47
Nusa Tenggara Barat	17,93	13,45	24,50	82,76	42,48	6,29
Nusa Tenggara Timur	22,12	37,59	26,46	81,60	27,32	1,66
Kalimantan Barat	8,40	6,18	5,84	80,71	32,50	7,64
Kalimantan Tengah	12,92	15,82	17,14	86,16	62,15	6,01
Kalimantan Selatan	12,72	16,09	10,92	76,58	53,90	4,55
Kalimantan Timur	6,86	7,31	12,68	73,37	51,06	1,90
Sulawesi Utara	20,98	41,46	61,52	78,18	26,41	0,94
Sulawesi Tengah	15,01	11,16	7,32	85,05	37,66	6,83
Sulawesi Selatan	19,15	38,50	31,92	83,34	47,14	5,20
Sulawesi Tenggara	16,30	33,55	21,72	80,78	27,57	9,53
Gorontalo	22,18	38,16	45,70	73,43	56,47	5,74
Sulawesi Barat	16,46	17,73	14,54	82,48	43,83	3,71
Maluku	17,91	7,55	11,92	89,91	39,12	10,69
Maluku Utara	8,64	23,68	41,74	92,30	31,75	7,41
Papua Barat	17,85	21,74	19,89	76,58	50,14	10,96
Papua	6,00	21,59	30,55	85,91	47,44	-
Indonesia	13,44	20,02	14,82	82,02	42,74	6,80

Lanjutan Tabel 5.11

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan					
	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Jenis Usaha yang Dilakukan		Jalan Kaki/ Menggunakan Sepeda	Menggunakan Kendaraan Secara Bersama	Lainnya
	(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Aceh	13,63	20,18	20,47	69,21	64,28	3,65
Sumatera Utara	11,98	44,04	16,44	66,29	41,78	3,89
Sumatera Barat	11,33	32,66	27,69	67,84	34,28	10,65
Riau	13,84	12,26	8,29	73,35	46,36	12,84
Jambi	8,97	6,03	18,57	65,32	49,65	8,32
Sumatera Selatan	9,33	22,10	19,57	81,19	36,72	3,74
Bengkulu	12,37	16,17	12,40	83,83	43,24	8,06
Lampung	8,36	32,25	17,59	82,72	39,38	5,04
Kep. Bangka Belitung	9,11	13,92	5,55	59,76	69,84	9,83
Kepulauan Riau	8,43	17,14	8,72	61,55	40,51	15,22
DKI Jakarta	10,05	58,84	17,27	57,80	41,45	4,15
Jawa Barat	14,80	42,22	25,27	69,02	30,62	6,84
Jawa Tengah	15,15	26,53	9,08	83,28	47,16	8,38
DI Yogyakarta	11,99	11,60	6,45	68,96	29,67	22,98
Jawa Timur	13,19	17,53	6,91	78,87	42,82	11,58
Banten	11,93	52,85	27,05	62,77	36,40	3,03
Bali	9,81	7,49	8,59	75,93	46,99	3,18
Nusa Tenggara Barat	15,43	14,16	19,11	78,97	45,78	8,63
Nusa Tenggara Timur	20,71	42,91	34,81	82,60	42,22	1,57
Kalimantan Barat	8,91	9,31	11,37	78,82	41,35	12,17
Kalimantan Tengah	12,74	21,73	22,70	84,07	63,53	5,64
Kalimantan Selatan	11,74	24,02	12,93	75,92	55,16	5,95
Kalimantan Timur	9,62	28,76	21,67	56,55	46,88	8,78
Sulawesi Utara	18,85	50,08	54,58	72,47	25,55	1,21
Sulawesi Tengah	12,96	15,67	9,83	78,51	39,01	8,04
Sulawesi Selatan	16,30	46,19	37,90	74,15	43,14	5,73
Sulawesi Tenggara	15,20	31,85	27,36	75,39	33,60	8,95
Gorontalo	19,92	34,24	40,76	69,23	48,55	5,28
Sulawesi Barat	13,37	24,24	17,34	81,84	42,39	3,41
Maluku	14,03	33,66	29,95	78,61	28,98	9,03
Maluku Utara	6,95	25,19	47,99	88,50	34,00	13,58
Papua Barat	14,08	27,65	25,06	69,03	43,44	8,75
Papua	9,39	44,15	41,86	71,38	42,98	2,29
Indonesia	12,98	30,31	17,22	74,18	41,22	7,88

Tabel 5.12 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi dengan Alasan Utamanya Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Perkotaan							
		Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi							
		Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Aktivitas Berkurang	Kesehatan	Jarak Tempuh ke Tempat Aktivitas Semakin dekat	Akses Kendaraan Umum	Menghindari Kemacetan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	11,95	81,73	-	1,33	-	11,26	2,10	-	3,59
Sumatera Utara	10,88	75,04	-	4,75	5,57	5,74	0,75	3,68	4,47
Sumatera Barat	11,28	72,07	3,01	7,25	1,73	7,71	0,40	1,70	6,12
Riau	14,99	48,25	1,96	6,76	8,70	13,20	2,88	1,01	17,23
Jambi	8,98	60,38	-	13,34	5,50	12,55	-	-	8,23
Sumatera Selatan	5,94	63,69	1,25	6,92	7,74	11,17	1,71	-	7,51
Bengkulu	8,76	71,99	-	16,41	5,80	-	5,80	-	-
Lampung	11,13	79,11	-	,96	11,24	7,88	-	-	0,80
Kep. Bangka Belitung	8,72	68,31	-	3,04	8,29	14,28	-	-	6,08
Kepulauan Riau	8,56	44,71	1,62	14,12	3,13	7,10	-	11,16	18,16
DKI Jakarta	10,05	46,69	-	11,87	7,42	21,25	4,46	4,98	3,33
Jawa Barat	14,68	53,59	1,70	9,75	7,49	11,20	3,28	8,22	4,76
Jawa Tengah	16,82	64,97	1,05	5,33	8,24	11,10	1,48	,21	7,61
DI Yogyakarta	13,32	70,75	2,35	4,12	8,47	10,00	-	,85	3,46
Jawa Timur	11,69	71,33	0,64	4,72	3,95	8,36	0,87	1,64	8,49
Banten	11,62	48,58	3,14	8,33	6,95	18,27	5,23	3,48	6,02
Bali	8,37	64,70	2,31	10,00	9,03	8,98	-	3,68	1,30
Nusa Tenggara Barat	12,33	66,38	2,21	5,88	,80	13,24	1,59	-	9,88
Nusa Tenggara Timur	18,45	73,19	9,46	3,07	4,25	8,17	-	-	1,86
Kalimantan Barat	9,92	45,12	-	6,50	6,86	14,08	1,26	6,25	19,94
Kalimantan Tengah	12,42	86,70	-	2,63	5,08	3,42	-	-	2,17
Kalimantan Selatan	10,49	65,77	4,90	3,11	10,23	9,79	2,67	-	3,53
Kalimantan Timur	11,32	73,02	-	9,98	7,15	4,22	2,23	1,39	2,01
Sulawesi Utara	16,50	43,18	-	6,85	14,47	20,45	10,92	1,58	2,55
Sulawesi Tengah	8,11	53,01	-	3,99	-	7,26	5,11	5,16	25,48
Sulawesi Selatan	12,12	63,21	-	5,68	6,27	9,19	6,62	2,94	6,09
Sulawesi Tenggara	12,75	65,32	3,75	3,32	7,53	12,58	-	-	7,51
Gorontalo	16,31	66,09	-	4,29	8,57	4,29	-	4,29	12,48
Sulawesi Barat	4,20	25,62	-	25,62	-	-	-	-	48,75
Maluku	10,99	44,54	2,27	5,47	13,63	10,39	-	-	23,70
Maluku Utara	3,70	37,26	-	21,50	-	23,93	-	-	17,30
Papua Barat	7,67	38,81	-	13,94	6,63	20,26	-	-	20,36
Papua	11,58	55,32	-	10,29	1,10	14,07	2,75	2,64	13,83
Indonesia	12,57	61,00	1,31	7,26	6,76	11,30	2,37	3,55	6,45

Lanjutan Tabel 5.12

Provinsi	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Pedesaan								
		Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi								
		Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Aktivitas Berku rang	Kese hatan	Jarak Tempuh ke Tempat Aktivitas Semakin dekat	Akses Kenda raan Umum	Meng hindari Kema ceta	Lainnya	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Aceh	14,40	81,69	-	5,82	1,40	7,79	1,96	-	1,34	
Sumatera Utara	13,19	83,44	-	1,11	2,41	7,10	0,18	-	5,77	
Sumatera Barat	11,36	70,59	-	4,88	1,90	15,70	0,88	-	6,05	
Riau	13,08	87,12	1,65	1,81	2,83	3,90	-	-	2,68	
Jambi	8,96	85,36	-	1,44	2,88	7,81	-	-	2,51	
Sumatera Selatan	11,20	77,99	4,67	3,90	2,10	6,07	0,79	-	4,47	
Bengkulu	14,21	84,39	-	,61	,70	9,13	-	-	5,17	
Lampung	7,50	60,89	0,68	5,84	6,90	8,78	2,62	-	14,29	
Kep. Bangka Belitung	9,50	81,19	2,73	5,26	2,73	8,09	-	-	-	
Kepulauan Riau	7,61	93,52	-	-	-	6,48	-	-	-	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	15,07	67,10	-	8,83	4,32	11,23	2,83	0,53	5,16	
Jawa Tengah	13,70	75,43	0,98	5,75	3,00	4,16	1,42	-	9,28	
DI Yogyakarta	8,52	72,14	-	4,20	-	23,66	-	-	-	
Jawa Timur	14,63	80,52	-	4,35	1,99	7,58	0,46	-	5,10	
Banten	12,93	81,94	2,57	2,57	6,43	6,49	-	-	-	
Bali	12,53	82,85	-	3,40	7,07	5,41	-	-	1,28	
Nusa Tenggara Barat	17,93	55,10	2,53	10,43	8,64	18,90	2,22	-	2,18	
Nusa Tenggara Timur	22,12	65,40	0,90	1,91	6,29	11,40	5,24	-	8,86	
Kalimantan Barat	8,40	80,02	-	3,54	2,07	8,21	-	-	6,16	
Kalimantan Tengah	12,92	86,39	0,76	1,84	2,49	5,17	-	-	3,35	
Kalimantan Selatan	12,72	80,35	2,16	5,89	0,87	8,73	-	-	1,99	
Kalimantan Timur	6,86	80,04	5,59	5,94	0,74	6,21	-	-	1,48	
Sulawesi Utara	20,98	62,15	1,91	7,92	4,61	15,70	3,99	-	3,72	
Sulawesi Tengah	15,01	80,97	-	4,83	9,59	-	-	-	4,61	
Sulawesi Selatan	19,15	79,14	0,40	2,92	3,21	6,12	2,82	-	5,38	
Sulawesi Tenggara	16,30	77,61	0,30	7,47	7,96	2,38	-	-	4,28	
Gorontalo	22,18	81,61	-	3,75	3,85	-	8,94	1,85	-	
Sulawesi Barat	16,46	84,49	2,30	2,44	-	4,61	-	-	6,16	
Maluku	17,91	63,42	2,53	8,11	-	24,51	-	-	1,43	
Maluku Utara	8,64	74,20	-	4,43	6,37	15,00	-	-	-	
Papua Barat	17,85	68,32	1,87	9,45	-	12,63	1,69	-	6,04	
Papua	6,00	78,08	-	-	14,97	6,95	-	-	-	
Indonesia	13,44	76,48	0,75	4,85	3,23	7,88	1,27	0,08	5,46	

Lanjutan Tabel 5.12

Provinsi	Ruta Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi	Perkotaan + Pedesaan							
		Alasan Utama Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi							
		Penghematan Biaya	Peduli Lingkungan	Aktivitas Berkurang	Kesehatan	Jarak Tempuh ke Tempat Aktivitas Semakin dekat	Akses Kendaraan Umum	Menghindari Kemacetan	Lainnya
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
Aceh	13,63	81,70	-	4,59	1,02	8,74	2,00	-	1,96
Sumatera Utara	11,98	79,46	-	2,83	3,91	6,46	0,45	1,74	5,15
Sumatera Barat	11,33	71,19	1,22	5,84	1,84	12,46	0,69	0,69	6,08
Riau	13,84	70,35	1,79	3,94	5,36	7,92	1,24	0,43	8,96
Jambi	8,97	77,79	-	5,04	3,67	9,25	-	-	4,24
Sumatera Selatan	9,33	74,76	3,90	4,58	3,38	7,22	1,00	-	5,16
Bengkulu	12,37	81,42	-	4,40	1,92	6,94	1,39	-	3,93
Lampung	8,36	66,62	0,46	4,31	8,27	8,50	1,80	-	10,05
Kep. Bangka Belitung	9,11	74,97	1,41	4,19	5,41	11,08	-	-	2,94
Kepulauan Riau	8,43	50,54	1,43	12,44	2,76	7,02	-	9,83	15,99
DKI Jakarta	10,05	46,69	-	11,87	7,42	21,25	4,46	4,98	3,33
Jawa Barat	14,80	57,68	1,19	9,47	6,53	11,21	3,15	5,89	4,88
Jawa Tengah	15,15	70,04	1,02	5,54	5,70	7,74	1,45	,11	8,42
DI Yogyakarta	11,99	71,02	1,88	4,13	6,80	12,69	-	,69	2,78
Jawa Timur	13,19	76,51	0,28	4,51	2,85	7,92	0,64	,72	6,58
Banten	11,93	57,10	3,00	6,86	6,82	15,26	3,89	2,59	4,48
Bali	9,81	72,70	1,29	7,09	8,16	7,41	-	2,06	1,29
Nusa Tenggara Barat	15,43	59,12	2,42	8,81	5,85	16,88	1,99	-	4,93
Nusa Tenggara Timur	20,71	68,06	3,82	2,31	5,59	10,30	3,45	-	6,47
Kalimantan Barat	8,91	66,91	-	4,65	3,87	10,41	0,47	2,35	11,33
Kalimantan Tengah	12,74	86,50	0,49	2,12	3,40	4,55	-	-	2,94
Kalimantan Selatan	11,74	74,64	3,23	4,80	4,54	9,15	1,05	-	2,59
Kalimantan Timur	9,62	74,93	1,52	8,88	5,40	4,76	1,62	1,01	1,87
Sulawesi Utara	18,85	54,24	1,11	7,48	8,73	17,68	6,88	,66	3,23
Sulawesi Tengah	12,96	75,76	-	0,74	3,93	9,15	,95	,96	8,50
Sulawesi Selatan	16,30	74,35	0,28	3,75	4,13	7,04	3,96	,89	5,60
Sulawesi Tenggara	15,20	74,40	1,20	6,38	7,85	5,04	-	-	5,12
Gorontalo	19,92	76,72	-	3,92	5,34	1,35	6,12	2,62	3,93
Sulawesi Barat	13,37	79,83	2,12	4,27	-	4,25	-	-	9,53
Maluku	14,03	55,13	2,42	6,95	5,98	18,31	-	-	11,21
Maluku Utara	6,95	67,47	-	7,54	5,21	16,63	-	-	3,15
Papua Barat	14,08	62,36	1,50	10,35	1,34	14,17	1,35	-	8,93
Papua	9,39	61,02	-	7,71	4,57	12,28	2,06	1,98	10,37
Indonesia	12,98	68,45	1,04	6,10	5,06	9,65	1,84	1,88	5,98

Tabel 5.13 Persentase Rumah Tangga dengan Alasan Tidak Menggunakan Kendaraan Umum Bermotor dalam Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan				
	Tidak Aman	Tidak Nyaman	Membutuhkan Waktu Lebih Lama	Ongkos Lebih Mahal	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,78	26,27	68,31	72,17	21,07
Sumatera Utara	20,77	29,98	67,92	53,19	25,01
Sumatera Barat	14,71	20,10	73,86	44,88	24,56
Riau	8,39	24,50	52,19	61,84	30,19
Jambi	6,64	22,24	32,04	49,52	39,74
Sumatera Selatan	22,64	14,15	34,50	40,71	21,14
Bengkulu	-	32,09	47,31	39,92	38,13
Lampung	5,11	7,26	49,63	39,39	37,21
Kep. Bangka Belitung	5,91	15,81	48,14	34,33	45,58
Kepulauan Riau	32,41	53,07	62,22	48,67	23,81
DKI Jakarta	39,30	49,68	69,36	55,07	25,97
Jawa Barat	21,77	30,26	65,12	65,25	22,57
Jawa Tengah	13,32	34,26	69,75	55,94	25,80
DI Yogyakarta	13,56	36,08	65,85	52,91	44,50
Jawa Timur	11,57	26,60	59,96	52,12	32,19
Banten	14,17	20,40	75,08	43,71	22,57
Bali	12,57	29,66	67,32	59,42	24,67
Nusa Tenggara Barat	-	16,64	54,08	37,88	38,74
Nusa Tenggara Timur	39,74	46,49	69,75	51,78	14,16
Kalimantan Barat	17,31	37,26	64,56	66,07	35,82
Kalimantan Tengah	16,67	19,32	48,90	52,65	33,34
Kalimantan Selatan	5,77	23,47	66,99	61,73	22,20
Kalimantan Timur	17,48	27,33	72,51	69,35	16,50
Sulawesi Utara	2,79	12,21	45,68	39,57	35,48
Sulawesi Tengah	5,75	11,13	41,38	40,31	43,84
Sulawesi Selatan	7,80	24,31	45,81	75,85	12,90
Sulawesi Tenggara	25,86	46,60	57,31	75,29	9,40
Gorontalo	7,50	29,01	37,83	70,66	14,34
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	19,27	11,42	15,11	12,21	53,41
Maluku Utara	-	-	100,00	100,00	-
Papua Barat	-	-	-	57,27	42,73
Papua	13,77	32,60	70,49	57,65	43,01
Indonesia	16,05	30,12	63,98	56,39	27,40

Lanjutan Tabel 5.13

Provinsi	Pedesaan				
	Tidak Aman	Tidak Nyaman	Membutuhkan Waktu Lebih Lama	Ongkos Lebih Mahal	Lainnya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	7,21	8,91	50,93	60,45	24,34
Sumatera Utara	6,52	15,22	41,89	58,89	28,36
Sumatera Barat	1,64	19,08	32,59	35,77	37,05
Riau	5,44	9,77	23,75	24,73	69,98
Jambi	8,85	17,62	34,30	42,35	55,49
Sumatera Selatan	14,30	34,31	46,95	54,96	32,88
Bengkulu	1,90	5,62	18,27	39,78	60,44
Lampung	7,81	14,70	34,34	46,63	40,61
Kep. Bangka Belitung	-	13,90	61,78	61,78	37,92
Kepulauan Riau	-		14,53	44,32	55,68
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,80	19,78	54,92	58,39	30,44
Jawa Tengah	2,66	15,62	52,88	45,32	38,22
DI Yogyakarta	-	29,59	58,83	59,30	38,17
Jawa Timur	8,11	19,84	55,51	48,18	37,98
Banten	13,11	21,92	59,08	53,99	25,53
Bali	11,45	28,82	65,08	57,85	36,13
Nusa Tenggara Barat	10,52	11,79	35,77	31,09	58,62
Nusa Tenggara Timur	8,20	17,01	34,21	49,85	28,69
Kalimantan Barat	15,88	16,53	16,32	37,86	52,26
Kalimantan Tengah	3,21	7,12	15,02	38,43	63,91
Kalimantan Selatan	2,13	5,58	36,92	44,36	54,34
Kalimantan Timur	0,31	25,90	39,36	60,30	50,11
Sulawesi Utara	3,21	11,69	27,25	49,31	41,85
Sulawesi Tengah	13,95	14,35	40,15	54,31	27,71
Sulawesi Selatan	8,95	19,30	52,07	60,62	28,26
Sulawesi Tenggara	1,40	10,03	21,12	45,90	43,84
Gorontalo	4,71	32,96	39,75	59,94	22,99
Sulawesi Barat	6,46	6,46	15,90	46,41	46,58
Maluku	1,71	6,81	39,63	47,18	38,94
Maluku Utara	-	-	22,09	48,88	39,89
Papua Barat	2,72	22,40	56,12	47,73	33,25
Papua	10,32	25,15	37,56	53,01	36,27
Indonesia	6,71	17,36	46,61	48,64	39,18

Lanjutan Tabel 5.13

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan				
	Tidak Aman	Tidak Nyaman	Membutuhkan Waktu Lebih Lama	Ongkos Lebih Mahal	Lainnya
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	9,00	13,63	55,65	63,64	23,45
Sumatera Utara	12,14	21,03	52,14	56,65	27,04
Sumatera Barat	5,95	19,42	46,21	38,78	32,93
Riau	6,48	14,96	33,76	37,79	55,98
Jambi	8,43	18,49	33,87	43,71	52,51
Sumatera Selatan	15,89	30,46	44,57	52,24	30,64
Bengkulu	1,54	10,63	23,77	39,81	56,22
Lampung	7,30	13,29	37,22	45,27	39,97
Kep. Bangka Belitung	3,03	14,87	54,80	47,73	41,84
Kepulauan Riau	27,58	45,16	55,11	48,03	28,56
DKI Jakarta	39,30	49,68	69,36	55,07	25,97
Jawa Barat	15,54	26,17	61,14	62,57	25,64
Jawa Tengah	8,04	25,02	61,39	50,67	31,96
DI Yogyakarta	10,91	34,81	64,48	54,16	43,26
Jawa Timur	9,48	22,51	57,27	49,74	35,69
Banten	13,72	21,04	68,35	48,03	23,81
Bali	12,07	29,29	66,32	58,72	29,76
Nusa Tenggara Barat	6,50	13,64	42,77	33,68	51,02
Nusa Tenggara Timur	15,05	23,41	41,93	50,27	25,53
Kalimantan Barat	16,35	23,45	32,41	47,27	46,78
Kalimantan Tengah	7,00	10,56	24,56	42,43	55,29
Kalimantan Selatan	3,37	11,68	47,17	50,28	43,38
Kalimantan Timur	11,13	26,80	60,26	66,01	28,92
Sulawesi Utara	3,02	11,93	35,57	44,91	38,97
Sulawesi Tengah	12,94	13,95	40,30	52,59	29,70
Sulawesi Selatan	8,74	20,22	50,93	63,41	25,45
Sulawesi Tenggara	6,95	18,33	29,33	52,57	36,02
Gorontalo	5,79	31,43	39,00	64,10	19,63
Sulawesi Barat	6,46	6,46	15,90	46,41	46,58
Maluku	4,47	7,54	35,76	41,67	41,22
Maluku Utara	-	-	29,28	53,60	36,21
Papua Barat	2,46	20,23	50,68	48,65	34,17
Papua	12,19	29,17	55,37	55,52	39,92
Indonesia	10,89	23,07	54,39	52,11	33,90

6

PENGELOLAAN SAMPAH



BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Sementara menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Dari definisi tersebut dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut bertambah. Peningkatan jumlah sampah ini harus disertai dengan pengelolaan sampah yang baik dan kontinyu yang dimulai dari skala rumah tangga, dimana rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah yang utama.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan seluruh ibukota provinsi di Indonesia yang dirangkum dalam publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2014 tentang produksi dan volume sampah yang terangkut di kota-kota besar, menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga belum bisa terangkut sepenuhnya oleh petugas kebersihan. Untuk itu diperlukan peran serta dari masyarakat dalam mengatasi masalah sampah dengan berperilaku pro lingkungan, seperti mengurangi volume sampah yang dihasilkan atau mendaur ulang sampah.

6.1 Kebiasaan Membuang Sampah

Kebiasaan rumah tangga dalam membuang sampah dapat dikategorikan menjadi dua cara, yaitu membuang sampah dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan membuang sampah dengan yang lebih ramah lingkungan. Adapun yang dimaksud membuang sampah dengan cara tidak ramah lingkungan seperti ditimbun/dikubur, dibakar, dibuang ke laut/sungai/got, dibuang sembarangan (tanah lapang, kebun, dll). Seperti diketahui bahwa sampah yang dibuang dengan cara ditimbun/dikubur di tanah akan menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat terkontaminasinya tanah dengan berbagai bahan kimia yang berasal dari sampah rumah tangga, kecuali jika sampah yang dikubur/ditimbun adalah sampah

organik seperti sisa nasi, sayuran, buah-buahan, sampah dedaunan, dll. Berbagai macam sampah organik tersebut justru akan membuat tanah menjadi subur.

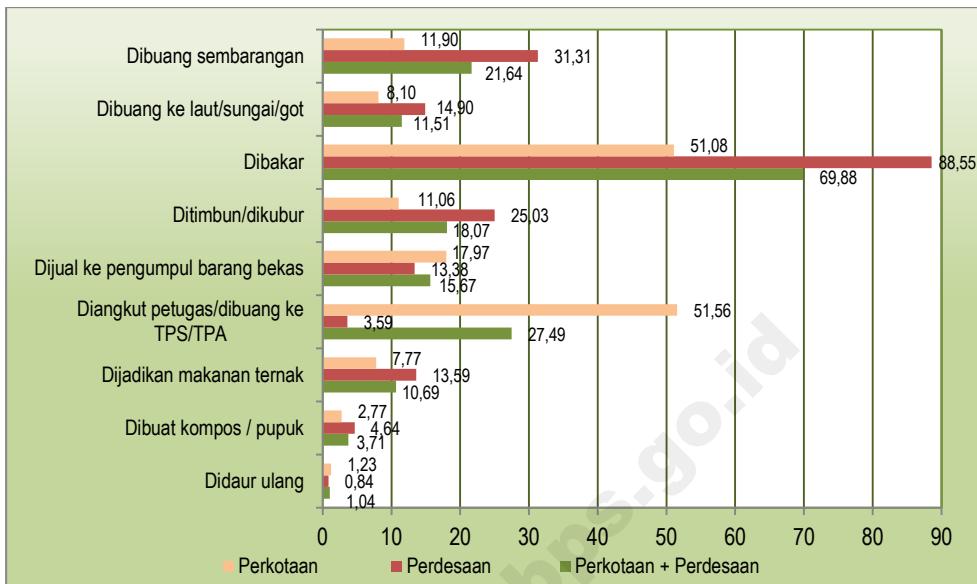
Sampah yang dibakar juga akan menimbulkan efek negatif karena asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah rumah tangga tersebut akan meningkatkan kadar CO₂ di bumi sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan Gas Rumah Kaca yang akan berdampak pada pemanasan global. Membuang sampah ke laut/sungai/got tentunya sangat praktis dilakukan, namun akumulasi sampah yang dibuang ke laut/sungai/got tersebut akan mencemari laut dan menyebabkan tersumbatnya aliran air sungai maupun got disaat musim hujan sehingga akan menyebabkan meluapnya air dan menyebabkan terjadinya banjir. Begitupula sampah yang dibuang ke tanah lapang ataupun kebun juga akan menyebabkan polusi udara (bau sampah) dan mencemari tanah. Adapun yang dimaksud membuang sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan, seperti didaur ulang, dibuat kompos/pupuk, dijadikan makanan hewan/ternak, diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA, dan dijual/diberikan kepada orang lain.

Berdasarkan data hasil Susenas Modul Hansos 2014, kebiasaan rumah tangga di Indonesia dalam membuang sampah masih banyak yang tidak ramah lingkungan yaitu rumah tangga yang membuang sampah dengan cara dibakar tercatat sebesar 69,88 persen, dibuang sembarangan ke tanah lapang, kebun, dll (21,64 persen), ditimbun/dikubur (18,07 persen), dan dibuang ke laut/sungai/got (11,51 persen). Sementara rumah tangga yang membuang sampah dengan cara lebih ramah lingkungan relative belum banyak, seperti membuang sampah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA sebesar 27,49 persen rumah tangga, dijual/diberikan kepada orang lain (15,67 persen), dijadikan makanan hewan/ternak (10,69 persen), dan didaur ulang/dibuat kompos (4,75 persen).

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, perbedaan persentase cara membuang sampah yang signifikan antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan terjadi pada cara membuang sampah dengan cara dibakar dan diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA. Persentase rumah tangga perdesaan yang membuang sampahnya dengan cara dibakar jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga perkotaan yaitu 88,55 persen berbanding 51,08 persen. Tingginya persentase pembakaran sampah oleh rumah tangga, baik di perkotaan maupun di perdesaan mencerminkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah masih kurang ramah lingkungan. Pembakaran sampah yang dilakukan mungkin memang menyelesaikan masalah penumpukan sampah, namun pembakaran sampah juga akan menimbulkan masalah baru yaitu polusi udara dan meningkatnya konsentrasi CO₂ di atmosfer. Asap atau gas CO₂ yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah tersebut akan menyebabkan semakin bertambahnya

konsentrasi CO₂ yang ada di atmosfer, yang pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer sehingga turut menyumbang terjadinya pemanasan global.

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan Terhadap Sampah Menurut Daerah Tempat Tinggal



Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang membakar sampah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 88,72 persen, diikuti Provinsi Aceh (86,85 persen), Provinsi Gorontalo (85,20 persen), dan Provinsi Lampung (85,17 persen). Sementara provinsi dengan persentase terkecil rumah tangga yang membakar sampah tercatat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 6,20 persen (Tabel 6.1).

Selain membuang sampah dengan cara dibakar, perlakuan sampah yang juga kurang baik terhadap lingkungan adalah menimbun/mengubur sampah, membuang sampah ke got/sungai/laut, dan membuang sampah sembarangan. Perlakuan terhadap sampah seperti ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal, seperti menimbulkan polusi udara (bau), menimbulkan banjir akibat tertutupnya saluran got atau aliran sungai. Di Provinsi Papua, persentase rumah tangga yang membuang sampah sembarangan mencapai lebih dari lima puluh persen yaitu tercatat sebanyak 55,89 persen.

Sampah sepertinya tampak tidak berguna, namun sesungguhnya sampah masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, misalnya sampah plastik didaur ulang menjadi barang kerajinan, sampah dedaunan, sayur dan buah atau sampah sisa makanan bisa diolah kembali menjadi pupuk/kompos atau dimanfaatkan kembali menjadi makanan ternak. Persentase rumah tangga yang melakukan daur ulang sampah dan membuat sampah menjadi

pupuk atau kompos masih sedikit yaitu berturut-turut sebesar 1,04 persen dan 3,71 persen. Sementara rumah tangga yang memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan sebagai makanan ternak tercatat sekitar 10,69 persen. Rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan tercatat lebih banyak yang memanfaatkan kembali sampah sebagai makanan ternak dibandingkan daerah perkotaan yaitu 13,59 persen berbanding dengan 7,77 persen.

Sementara rumah tangga yang sampahnya diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA dan rumah tangga yang sampahnya dijual ke pengumpul barang bekas, persentasenya masih relatif rendah yaitu berturut-turut sebesar 27,49 persen dan 15,67 persen. Rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih banyak membuang sampahnya dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA yaitu sebesar 51,56 persen dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di perdesaan yaitu hanya 3,59 persen. Hal ini disebabkan adanya perbedaan fasilitas yang ada di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan, seperti keberadaan TPS/TPA serta petugas pengangkut sampah yang biasanya difasilitasi oleh dinas kebersihan kota atau provinsi.

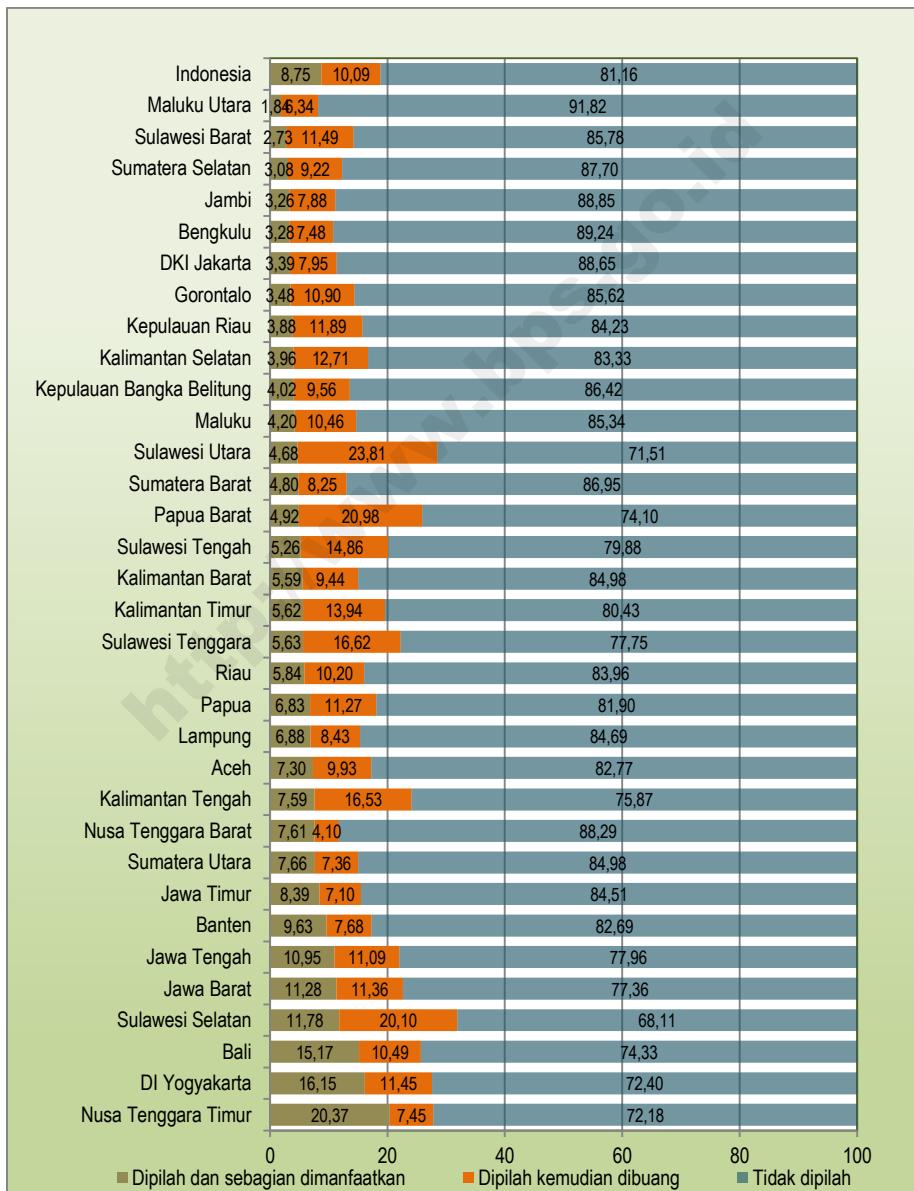
Jika dilihat menurut perlakuan utama atau yang paling sering dilakukan terhadap sampah, tercatat bahwa membuang sampah dengan cara dibakar merupakan perlakuan utama terhadap sampah yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga yaitu mencapai 54,65 persen, diikuti cara membuang sampah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA sebesar 25,35 persen, dan dibuang sembarangan sebesar 9,39 persen (Tabel 6.2). Sebagian besar provinsi di Indonesia terlihat bahwa persentase terbesar cara membuang sampah yang utama oleh rumah tangga adalah dengan cara dibakar, kecuali untuk Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, persentase terbesar cara membuang sampah adalah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA. Sementara untuk Provinsi Papua, persentase terbesar cara membuang sampah adalah dengan cara dibuang sembarangan yaitu mencapai 41,38 persen.

6.2 Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk

Pengelolaan sampah dalam rumah tangga idealnya harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang yaitu antara sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah membusuk, karena hal ini akan memudahkan proses pengolahan sampah pada tahapan berikutnya. Data hasil Modul Hansos 2014 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase rumah tangga yang menyatakan tidak memilah sampah yaitu sebesar 81,16 persen (Grafik 6.2). Sebanyak 10,09 persen rumah tangga menyatakan sudah memilah sampah namun semuanya

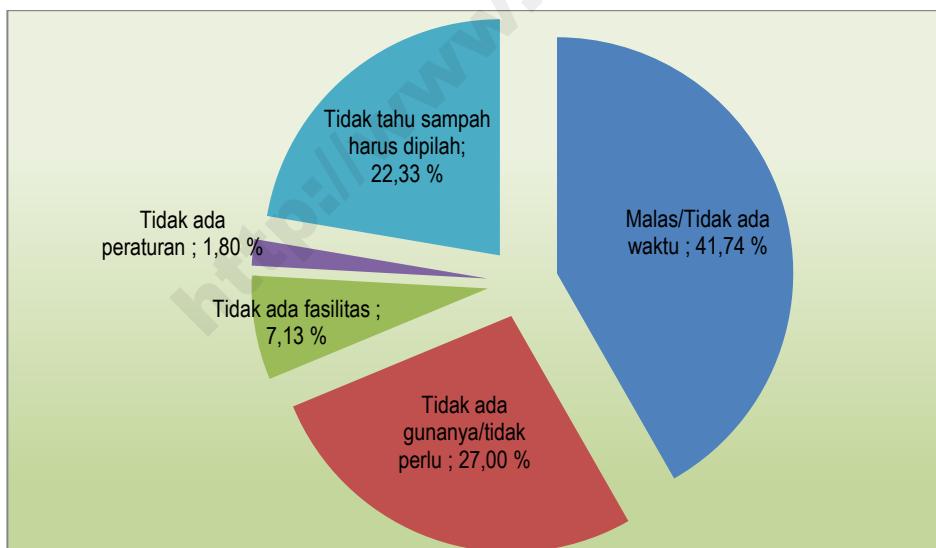
dibuang (tidak ada yang dimanfaatkan kembali) dan sebesar 8,75 persen rumah tangga sudah melakukan pemilahan sampah dan sebagian yang dipilah dimanfaatkan kembali seperti dibuat kompos, diberikan kepada pihak lain, dijual, didaur ulang dan dijadikan makanan ternak. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah yaitu mencapai 31,89 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Utara (28,49 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,82 persen).

Grafik 6.2 Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi



Rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah mudah membusuk dan tidak mudah membusuk tentunya memiliki alasan tertentu mengapa mereka tidak melakukan hal tersebut. Grafik 6.3 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (41,74 persen) menyatakan malas untuk melakukan pemilahan sampah. Hal ini dimungkinkan karena rumah tangga merasa capek atau tidak ada waktu untuk melakukan pemilahan sampah. Alasan lain rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah yang cukup besar yaitu alasan karena tidak ada gunanya atau tidak perlu melakukan pemilahan sampah (27 persen) dan alasan karena tidak mengetahui bahwa sampah harus dipilah sebelum dibuang (22,23 persen). Sementara rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah karena alasan tidak ada fasilitas, dan tidak ada peraturan berturut-turut sebesar 7,13 persen dan 1,80 persen. Masih cukup banyaknya rumah tangga yang tidak mengetahui bahwa sampah harus dipilah sebelum dibuang, hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengedukasi dan memberikan dukungan baik dari sisi infrastruktur dan perangkat hukum agar rumah tangga terbiasa melakukan pemilahan sampah.

Grafik 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah



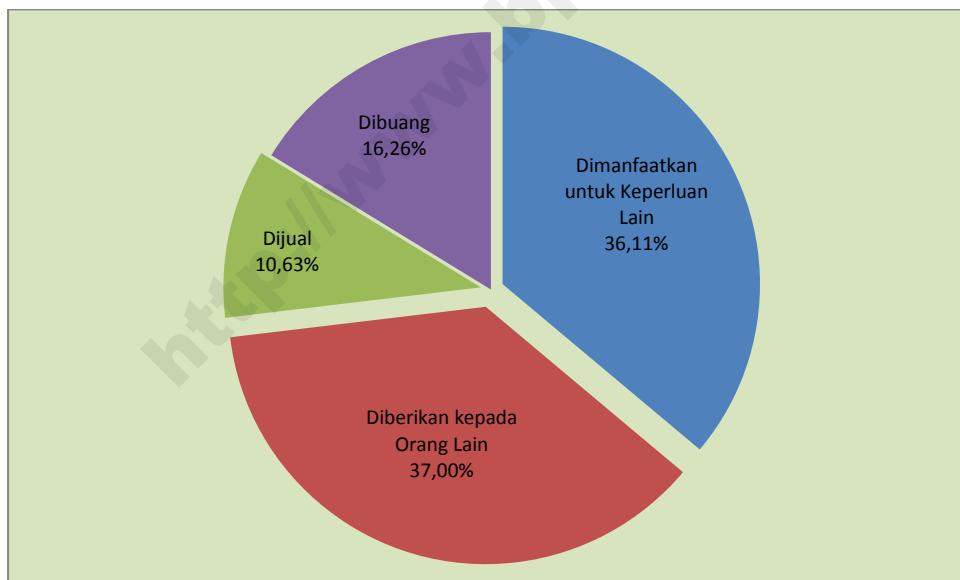
Dilihat menurut provinsi, sebagian besar rumah tangga di setiap provinsi menyatakan malas sebagai alasan utama mengapa tidak melakukan pemilahan sampah, dengan persentase tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu mencapai 68,85 persen, diikuti Kalimantan Timur (54,54 persen) dan DKI Jakarta (51,95 persen). Sementara untuk Provinsi

Nusa Tenggara Timur, sebagian besar rumah tangganya menyatakan tidak mengetahui kalau sampah harus dipilah sebelum dibuang yaitu mencapai 44,33 persen (Tabel 6.4).

6.3 Perlakuan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai

Barang bekas layak pakai seperti baju bekas, sepatu bekas, perkakas, dll bagi sebagian orang dianggap sebagai sampah dan hanya dibuang tanpa dimanfaatkan kembali. Bagi sebagian yang lain, barang bekas layak pakai tersebut dianggap sebagai barang yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, bahkan dijual. Grafik 6.4 menunjukkan sebagian besar rumah tangga memperlakukan barang bekas layak pakai untuk diberikan kepada orang lain (37,00 persen) dan dimanfaatkan untuk keperluan lain (36,11 persen). Sedangkan rumah tangga yang tidak memanfaatkan barang bekas layak pakai dan hanya membuangnya tercatat sebesar 16,26 persen, dan sisanya sebesar 10,63 persen rumah tangga menjual barang bekas layak pakainya.

Grafik 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai



Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan Terhadap Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun / Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,03	1,31	9,37	45,80	14,47	7,48	68,04	6,71	20,57
Sumatera Utara	1,23	3,68	7,45	43,56	11,45	10,14	62,28	5,94	7,32
Sumatera Barat	1,06	1,22	4,81	45,43	9,33	9,61	57,43	11,28	12,68
Riau	2,21	3,59	6,08	52,38	15,26	8,82	63,76	3,74	8,36
Jambi	0,43	2,14	4,13	53,57	7,02	11,69	54,50	13,06	12,74
Sumatera Selatan	0,87	2,21	8,35	60,64	16,77	8,56	45,09	12,86	13,97
Bengkulu	0,81	0,36	8,34	60,30	12,95	6,03	56,42	5,51	7,40
Lampung	0,38	1,59	2,55	47,89	7,37	7,55	59,88	1,36	4,05
Kep. Bangka Belitung		4,61	19,17	44,58	16,83	13,65	73,62	2,87	13,14
Kepulauan Riau	0,17	1,08	2,64	80,83	17,36	4,05	29,57	8,72	3,05
DKI Jakarta	1,12	1,19	1,38	92,94	14,32	1,04	6,20	1,81	3,32
Jawa Barat	1,19	3,78	8,16	47,20	17,44	12,00	56,20	10,15	14,89
Jawa Tengah	1,19	3,48	7,19	34,55	21,97	16,11	63,00	7,56	14,85
DI Yogyakarta	0,84	7,22	13,87	49,54	36,58	14,94	54,05	2,43	5,47
Jawa Timur	2,09	2,04	5,83	43,65	22,58	16,64	54,64	7,32	8,18
Banten	0,78	1,41	8,35	56,79	18,42	8,78	46,39	4,41	18,12
Bali	0,79	2,51	5,69	62,04	24,17	5,56	36,25	2,21	12,34
Nusa Tenggara Barat	0,53	0,07	3,79	26,27	12,52	13,24	55,16	37,52	25,68
Nusa Tenggara Timur	0,96	7,15	35,27	25,51	19,15	10,72	78,61	7,83	17,77
Kalimantan Barat	1,61	4,80	10,38	51,29	21,90	6,25	65,05	7,60	9,39
Kalimantan Tengah	2,14	2,09	13,10	69,16	9,15	5,22	49,73	9,50	6,63
Kalimantan Selatan	1,42	2,35	15,37	68,10	17,48	8,48	48,54	12,40	15,10
Kalimantan Timur	1,51	3,49	8,36	80,91	18,33	7,59	26,26	9,28	6,48
Sulawesi Utara	0,15	0,98	14,58	62,68	1,25	6,52	53,44	7,21	6,60
Sulawesi Tengah		1,01	10,38	42,49	5,09	6,62	64,29	11,87	14,22
Sulawesi Selatan	1,19	1,32	18,64	55,92	18,98	6,72	47,81	8,41	15,47
Sulawesi Tenggara	1,25	1,72	19,88	66,01	12,71	5,06	45,99	16,08	15,50
Gorontalo	-		10,76	32,14	7,22	5,19	72,58	5,04	13,63
Sulawesi Barat	1,52	1,52	27,07	34,42	10,14	8,36	46,96	27,32	24,78
Maluku	0,14	0,50	27,95	53,91	7,64	11,16	53,76	23,13	10,70
Maluku Utara	0,21	-	5,89	52,35	1,80	11,62	41,22	26,90	28,90
Papua Barat	1,63	1,65	12,22	71,82	6,65	5,85	55,66	15,46	3,02
Papua	0,72	4,01	15,98	63,95	5,60	6,42	57,57	13,94	20,34
Indonesia	1,23	2,77	7,77	51,56	17,97	11,06	51,08	8,10	11,90

Lanjutan Tabel 6.1

Provinsi	Pedesaan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun / Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	0,59	1,46	10,05	3,97	9,58	23,75	94,12	14,06	28,60
Sumatera Utara	0,91	9,24	14,91	3,60	10,90	19,30	91,66	11,88	32,61
Sumatera Barat	0,66	1,89	6,01	3,70	7,02	20,61	87,82	14,23	23,80
Riau	1,04	2,25	8,52	7,80	8,43	19,38	90,24	9,57	17,72
Jambi	0,80	1,96	7,43	4,96	10,44	25,66	87,19	23,75	32,14
Sumatera Selatan	1,08	2,42	6,34	7,78	12,04	22,34	83,30	21,35	33,91
Bengkulu	1,46	2,91	7,00	6,41	9,66	18,91	78,88	12,08	32,94
Lampung	1,32	2,77	5,37	2,66	10,60	26,39	93,42	2,60	18,21
Kep. Bangka Belitung	0,84	1,27	31,51	16,49	15,22	19,47	87,36	7,79	47,56
Kepulauan Riau	2,08	4,70	13,46	11,66	9,38	15,26	82,54	35,74	11,02
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,01	4,51	16,78	2,15	16,33	26,81	89,95	18,54	30,48
Jawa Tengah	1,05	8,21	10,65	2,65	18,84	29,94	90,06	10,95	24,16
DI Yogyakarta	0,39	8,43	20,93	1,99	29,82	31,96	97,55	0,98	15,96
Jawa Timur	0,76	6,09	10,09	2,00	18,89	29,94	92,61	8,17	23,06
Banten	0,55	1,58	5,09	1,18	9,55	11,82	83,87	13,53	62,07
Bali	1,09	6,31	16,27	5,26	23,30	17,47	81,03	4,84	55,44
Nusa Tenggara Barat	0,31	0,63	6,47	3,78	9,29	25,43	77,44	24,36	52,76
Nusa Tenggara Timur	0,42	4,62	34,82	1,67	3,96	20,68	91,18	7,74	54,38
Kalimantan Barat	0,18	1,58	9,84	3,68	6,35	23,42	88,95	20,28	41,72
Kalimantan Tengah	0,76	3,58	18,77	6,35	8,60	22,96	83,39	36,01	24,64
Kalimantan Selatan	0,59	1,72	19,73	6,48	9,91	31,12	84,32	25,72	39,28
Kalimantan Timur	1,68	4,21	12,56	19,39	1,55	25,84	77,54	35,95	27,34
Sulawesi Utara	0,28	0,50	20,45	8,33	4,52	20,42	88,12	15,86	18,84
Sulawesi Tengah	1,16	0,82	18,91	2,33	3,90	18,04	85,31	23,46	32,62
Sulawesi Selatan	0,72	1,22	31,30	3,13	11,93	14,17	85,16	20,98	42,16
Sulawesi Tenggara	0,25	1,88	22,84	3,88	4,39	18,68	87,27	16,21	43,41
Gorontalo	0,22	0,66	14,26	1,28	3,76	7,57	91,86	12,41	27,46
Sulawesi Barat	0,19	2,77	27,23	1,96	8,88	16,88	75,54	29,87	49,28
Maluku	0,08	3,28	15,32	2,75	5,76	19,79	72,06	50,39	36,27
Maluku Utara	1,19	0,26	14,40	8,82	2,94	25,84	69,34	57,52	44,97
Papua Barat	0,15	1,09	14,66	7,58	2,99	22,01	84,15	28,21	41,04
Papua	0,36	8,38	32,40	5,17	1,18	33,40	72,09	32,29	67,69
Indonesia	0,84	4,64	13,59	3,59	13,38	25,03	88,55	14,90	31,31

Lanjutan Tabel 6.1

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun / Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
	(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Aceh	0,71	1,42	9,86	15,63	10,94	19,21	86,85	12,01	26,36
Sumatera Utara	1,07	6,54	11,29	23,00	11,17	14,85	77,40	9,00	20,34
Sumatera Barat	0,81	1,63	5,55	19,70	7,91	16,39	76,17	13,10	19,54
Riau	1,49	2,77	7,58	24,96	11,06	15,31	80,05	7,32	14,12
Jambi	0,69	2,01	6,46	19,26	9,44	21,55	77,58	20,61	26,44
Sumatera Selatan	1,01	2,35	7,03	25,88	13,66	17,62	70,21	18,44	27,08
Bengkulu	1,26	2,13	7,41	22,99	10,67	14,95	71,97	10,06	25,08
Lampung	1,09	2,48	4,68	13,79	9,81	21,75	85,17	2,30	14,73
Kep. Bangka Belitung	0,42	2,94	25,35	30,53	16,03	16,56	80,49	5,33	30,36
Kepulauan Riau	0,47	1,64	4,30	70,21	16,13	5,77	37,70	12,86	4,28
DKI Jakarta	1,12	1,19	1,38	92,94	14,32	1,04	6,20	1,81	3,32
Jawa Barat	1,13	4,04	11,20	31,32	17,04	17,22	68,09	13,11	20,38
Jawa Tengah	1,11	6,10	9,10	16,92	20,24	23,75	77,96	9,44	20,00
DI Yogyakarta	0,70	7,61	16,12	34,38	34,42	20,36	67,92	1,97	8,81
Jawa Timur	1,38	4,21	8,11	21,35	20,61	23,76	74,97	7,77	16,15
Banten	0,71	1,46	7,36	40,01	15,74	9,69	57,70	7,16	31,39
Bali	0,90	3,96	9,73	40,39	23,84	10,10	53,33	3,21	28,78
Nusa Tenggara Barat	0,40	0,39	5,35	13,20	10,65	20,33	68,11	29,87	41,42
Nusa Tenggara Timur	0,53	5,11	34,91	6,34	6,93	18,73	88,72	7,76	47,21
Kalimantan Barat	0,61	2,53	10,00	17,76	10,95	18,34	81,88	16,53	32,16
Kalimantan Tengah	1,23	3,08	16,86	27,50	8,78	16,98	72,06	27,08	18,58
Kalimantan Selatan	0,94	1,98	17,91	32,20	13,07	21,67	69,38	20,16	29,18
Kalimantan Timur	1,58	3,77	9,96	57,42	11,93	14,56	45,84	19,46	14,44
Sulawesi Utara	0,22	0,72	17,79	32,93	3,04	14,13	72,42	11,95	13,30
Sulawesi Tengah	0,88	0,86	16,84	12,07	4,19	15,27	80,21	20,65	28,15
Sulawesi Selatan	0,89	1,25	26,72	22,24	14,48	11,47	71,65	16,43	32,50
Sulawesi Tenggara	0,53	1,84	22,01	21,40	6,73	14,84	75,64	16,17	35,54
Gorontalo	0,14	0,43	13,05	11,94	4,96	6,75	85,20	9,87	22,68
Sulawesi Barat	0,49	2,49	27,20	9,09	9,15	15,01	69,26	29,31	43,90
Maluku	0,10	2,16	20,45	23,50	6,52	16,29	64,63	39,33	25,90
Maluku Utara	0,92	0,19	12,04	20,92	2,62	21,89	61,53	49,01	40,51
Papua Barat	0,59	1,26	13,94	26,70	4,08	17,20	75,68	24,41	29,73
Papua	0,45	7,29	28,31	19,82	2,28	26,68	68,47	27,71	55,89
Indonesia	1,04	3,71	10,69	27,49	15,67	18,07	69,88	11,51	21,64

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan Terhadap Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan								
	Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun / Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,41	0,30	0,30	37,00	0,17	0,52	49,31	3,33	8,49
Sumatera Utara	0,35	0,86	0,86	40,25	0,36	1,69	50,03	3,18	3,10
Sumatera Barat	-	0,19	0,19	43,09	0,03	3,43	44,88	3,44	4,45
Riau	-	-	-	45,60	1,18	1,17	47,65	1,58	2,82
Jambi	-	0,32	0,32	46,55	-	1,89	40,79	5,88	4,35
Sumatera Selatan	-	0,06	0,06	58,87	0,05	-	26,29	9,12	5,60
Bengkulu	-	-	-	51,21	-	0,61	42,28	2,79	3,11
Lampung	0,25	0,29	0,29	43,73	0,14	0,16	52,32	0,69	2,42
Kep. Bangka Belitung	-	0,24	0,24	40,54	0,24	0,24	51,70	0,69	5,94
Kepulauan Riau	-	0,12	0,12	78,68	-	-	13,17	6,62	0,83
DKI Jakarta	0,44	0,19	0,19	91,46	1,19	0,12	3,16	1,14	2,08
Jawa Barat	0,24	0,24	0,24	43,63	0,53	1,41	43,87	4,25	5,68
Jawa Tengah	0,25	0,61	0,61	32,96	0,48	4,60	50,82	3,96	6,25
DI Yogyakarta	0,07	1,27	1,27	47,91	0,52	4,33	43,21	1,08	1,42
Jawa Timur	0,47	0,36	0,36	41,06	1,53	4,27	44,77	4,24	3,08
Banten	0,11	0,10	0,10	53,92	0,81	1,26	34,61	2,53	6,55
Bali	-	0,20	0,20	60,31	0,20	0,81	28,15	1,78	8,38
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	24,93	0,34	3,58	38,41	24,71	8,03
Nusa Tenggara Timur	-	0,45	0,45	21,21	-	1,73	63,03	5,93	6,87
Kalimantan Barat	0,32	-	-	42,89	0,33	0,96	48,68	4,43	2,39
Kalimantan Tengah	0,31	-	-	62,03	0,98	0,68	26,23	5,63	3,33
Kalimantan Selatan	0,20	0,14	0,14	63,34	-	0,86	25,48	6,47	3,28
Kalimantan Timur	0,05	0,96	0,96	76,33	0,24	2,11	12,28	6,06	1,90
Sulawesi Utara	-	-	-	55,76	-	0,43	35,38	3,18	4,01
Sulawesi Tengah	-	-	-	36,80	-	1,53	46,53	7,36	7,37
Sulawesi Selatan	0,05	015	015	52,79	1,38	1,31	32,66	4,80	6,04
Sulawesi Tenggara	0,33	0,52	0,52	62,96	-	0,45	19,79	8,03	6,62
Gorontalo	-	-	-	29,32	-	1,27	60,37	3,81	4,80
Sulawesi Barat	-	-	-	32,28	-	0,76	28,29	22,91	15,76
Maluku	-	0,07	0,07	50,70	-	0,74	28,82	15,47	3,16
Maluku Utara	-	-	-	49,97	-	2,71	16,55	15,31	15,04
Papua Barat	-	-	-	60,78	-	0,41	25,97	10,13	1,02
Papua	0,13	0,42	0,42	52,63	0,69	0,95	27,91	3,61	12,65
Indonesia	0,24	0,34	0,34	48,45	0,69	2,16	38,93	4,26	4,73

Lanjutan Tabel 6.2

Provinsi	Pedesaan								
	Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun/ Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	0,08	0,09	0,09	1,66	0,19	3,28	80,68	4,18	9,47
Sumatera Utara	0,24	1,57	1,57	1,63	0,31	2,41	75,65	2,88	15,17
Sumatera Barat	0,28	0,12	0,12	1,89	0,33	3,42	74,95	5,96	12,29
Riau	-	0,21	0,21	5,32	0,29	3,86	78,58	4,59	7,07
Jambi	0,21	0,11	0,11	2,90	0,17	2,95	70,29	12,42	10,95
Sumatera Selatan	0,33	0,17	0,17	4,77	0,07	5,33	61,98	12,09	15,25
Bengkulu	-	0,29	0,29	5,68	0,08	5,52	62,90	6,47	18,93
Lampung	-	0,28	0,28	2,21	0,09	3,15	87,25	0,46	6,48
Kep. Bangka Belitung	0,17	-	-	13,21	-	1,76	58,78	2,27	23,81
Kepulauan Riau	-	1,66	1,66	8,76	-	1,33	57,03	28,02	3,20
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,37	0,74	0,74	1,71	0,47	4,99	73,19	7,89	10,25
Jawa Tengah	0,06	1,75	1,75	2,24	0,22	7,55	72,36	5,68	9,95
DI Yogyakarta	-	0,77	0,77	0,80	0,97	4,30	86,91	0,25	6,01
Jawa Timur	0,06	0,84	0,84	1,12	0,65	6,42	77,74	3,72	9,15
Banten	0,20	0,39	0,39	0,59	0,49	0,57	49,43	4,37	43,96
Bali	-	0,45	0,45	4,98	0,75	5,39	45,41	4,18	38,84
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2,33	0,46	7,91	49,40	12,95	26,86
Nusa Tenggara Timur	0,06	0,73	0,73	0,83	0,05	3,50	67,63	1,84	24,43
Kalimantan Barat	-	0,11	0,11	2,64	0,24	2,87	68,76	4,55	20,53
Kalimantan Tengah	0,08	1,41	1,41	4,79	-	3,14	63,53	17,80	8,96
Kalimantan Selatan	0,29	0,12	0,12	4,55	-	6,17	58,73	14,64	15,24
Kalimantan Timur	0,51	0,29	0,29	13,58	-	4,89	50,63	22,53	7,40
Sulawesi Utara	-	0,05	0,05	6,08	0,25	4,60	73,03	8,39	7,53
Sulawesi Tengah	-	0,05	0,05	1,14	0,09	1,91	68,48	11,85	16,05
Sulawesi Selatan	-	0,07	0,07	2,25	0,09	3,58	64,00	11,80	18,03
Sulawesi Tenggara	-	0,88	0,88	3,52	0,06	2,74	65,14	8,49	19,04
Gorontalo	-	-	-	0,87	-	0,63	84,71	7,40	6,39
Sulawesi Barat	-	0,17	0,17	1,33	-	3,06	52,38	14,97	27,33
Maluku	-	-	-	2,08	-	3,15	50,28	29,51	13,32
Maluku Utara	-	-	-	6,59	-	5,11	32,24	34,97	21,08
Papua Barat	-	0,26	0,26	5,51	0,14	5,32	53,22	11,57	22,91
Papua	0,13	0,13	0,13	0,62	-	8,91	30,54	5,19	50,91
Indonesia	0,13	0,72	0,72	2,41	0,32	5,00	70,26	6,82	14,01

Lanjutan Tabel 6.2

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan								
	Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan								
	Didaur Ulang	Dibuat Kompos/ Pupuk	Dijadikan Makanan Hewan	Diangkut Petugas/ Dibuang ke TPA	Dijual/ Diberikan kepada Orang Lain	Ditimbun/ Dikubur	Dibakar	Dibuang ke Laut/ Sungai/ Got	Dibuang Sembarangan
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
Aceh	0,17	0,15	0,40	11,51	0,19	2,51	71,94	3,94	9,19
Sumatera Utara	0,29	1,23	0,16	20,37	0,33	2,06	63,21	3,02	9,32
Sumatera Barat	0,17	0,15	0,65	17,69	0,21	3,42	63,42	4,99	9,28
Riau	-	0,13	0,06	20,82	0,63	2,83	66,68	3,43	5,43
Jambi	0,15	0,17	0,06	15,74	0,12	2,64	61,62	10,50	9,01
Sumatera Selatan	0,22	0,13	-	23,30	0,06	3,50	49,76	11,08	11,94
Bengkulu	-	0,20	0,09	19,69	0,05	4,01	56,56	5,34	14,06
Lampung	0,06	0,28	0,07	12,43	0,10	2,41	78,65	0,52	5,48
Kep. Bangka Belitung	0,09	0,12	0,21	26,86	0,12	1,00	55,24	1,48	14,88
Kepulauan Riau	-	0,36	0,49	67,95	-	0,20	19,91	9,90	1,19
DKI Jakarta	0,44	0,19	0,20	91,46	1,19	0,12	3,16	1,14	2,08
Jawa Barat	0,29	0,42	0,24	28,86	0,51	2,67	54,20	5,53	7,29
Jawa Tengah	0,15	1,24	0,14	15,98	0,34	6,23	62,73	4,91	8,29
DI Yogyakarta	0,05	1,11	0,13	32,90	0,66	4,32	57,14	0,82	2,88
Jawa Timur	0,25	0,62	0,26	19,68	1,06	5,42	62,42	3,96	6,33
Banten	0,13	0,19	0,08	37,83	0,71	1,05	39,08	3,08	17,84
Bali	-	0,29	0,11	39,22	0,41	2,56	34,73	2,70	19,99
Nusa Tenggara Barat	-	-	0,06	11,79	0,41	6,09	44,80	17,87	18,97
Nusa Tenggara Timur	0,05	0,67	0,90	4,82	0,04	3,15	66,73	2,64	20,99
Kalimantan Barat	0,09	0,08	0,21	14,55	0,27	2,30	62,82	4,52	15,16
Kalimantan Tengah	0,16	0,93	0,46	24,07	0,33	2,31	50,97	13,70	7,07
Kalimantan Selatan	0,25	0,13	0,25	29,08	-	3,96	44,85	11,23	10,25
Kalimantan Timur	0,23	0,71	0,11	52,37	0,15	3,17	26,92	12,34	4,00
Sulawesi Utara	-	0,03	0,60	28,57	0,14	2,71	55,99	6,03	5,94
Sulawesi Tengah	-	0,04	0,42	9,79	0,07	1,81	63,16	10,76	13,95
Sulawesi Selatan	0,02	0,10	0,40	20,55	0,56	2,76	52,66	9,27	13,69
Sulawesi Tenggara	0,09	0,78	0,46	20,27	0,04	2,09	52,36	8,36	15,54
Gorontalo	-	-	0,15	10,70	-	0,86	76,30	6,16	5,84
Sulawesi Barat	-	0,13	0,60	8,13	-	2,55	47,09	16,72	24,79
Maluku	-	0,03	1,41	21,80	-	2,17	41,58	23,82	9,20
Maluku Utara	-	-	0,12	18,64	-	4,44	27,88	29,51	19,41
Papua Barat	-	0,18	1,25	21,95	0,10	3,86	45,11	11,14	16,40
Papua	0,13	0,21	2,94	13,58	0,17	6,92	29,88	4,79	41,38
Indonesia	0,19	0,53	0,26	25,35	0,50	3,58	54,65	5,54	9,39

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan		
	Dipilah dan sebagian dimanfaatkan	Dipilah kemudian dibuang	Tidak dipilah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,05	8,07	87,88
Sumatera Utara	7,35	7,05	85,60
Sumatera Barat	4,29	8,66	87,05
Riau	7,31	11,62	81,07
Jambi	1,85	9,98	88,17
Sumatera Selatan	4,47	8,79	86,74
Bengkulu	3,26	10,35	86,39
Lampung	2,73	14,27	83,00
Kep. Bangka Belitung	6,17	11,72	82,10
Kepulauan Riau	3,11	12,15	84,74
DKI Jakarta	3,39	7,95	88,65
Jawa Barat	9,77	12,53	77,70
Jawa Tengah	10,41	8,02	81,57
DI Yogyakarta	15,84	12,32	71,84
Jawa Timur	8,34	7,43	84,22
Banten	9,93	8,69	81,38
Bali	13,69	7,92	78,39
Nusa Tenggara Barat	7,00	4,21	88,79
Nusa Tenggara Timur	25,21	16,22	58,56
Kalimantan Barat	9,37	13,56	77,07
Kalimantan Tengah	5,53	17,86	76,60
Kalimantan Selatan	3,49	13,76	82,75
Kalimantan Timur	6,97	14,85	78,18
Sulawesi Utara	5,40	25,51	69,08
Sulawesi Tengah	3,98	23,80	72,22
Sulawesi Selatan	7,68	26,95	65,37
Sulawesi Tenggara	4,65	28,34	67,01
Gorontalo	7,61	13,82	78,57
Sulawesi Barat	3,84	13,72	82,44
Maluku	2,71	16,33	80,95
Maluku Utara	,97	2,61	96,41
Papua Barat	9,55	24,26	66,19
Papua	7,89	27,89	64,23
Indonesia	8,30	10,66	81,04

Lanjutan Tabel 6.3

Provinsi	Pedesaan		
	Ya, dipilah dan sebagian dimanfaatkan	Ya, dipilah kemudian dibuang	Tidak dipilah
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,56	10,65	80,80
Sumatera Utara	7,95	7,65	84,40
Sumatera Barat	5,12	7,99	86,89
Riau	4,93	9,31	85,77
Jambi	3,85	7,01	89,14
Sumatera Selatan	2,36	9,44	88,20
Bengkulu	3,29	6,21	90,50
Lampung	8,24	6,52	85,24
Kep, Bangka Belitung	1,86	7,41	90,73
Kepulauan Riau	8,15	10,47	81,38
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	14,04	9,20	76,75
Jawa Tengah	11,38	13,57	75,04
DI Yogyakarta	16,83	9,57	73,60
Jawa Timur	8,44	6,80	84,76
Banten	8,95	5,33	85,73
Bali	17,57	14,67	67,76
Nusa Tenggara Barat	8,05	4,02	87,93
Nusa Tenggara Timur	19,20	5,31	75,49
Kalimantan Barat	4,00	7,71	88,30
Kalimantan Tengah	8,64	15,86	75,50
Kalimantan Selatan	4,30	11,96	83,75
Kalimantan Timur	3,44	12,48	84,08
Sulawesi Utara	4,07	22,41	73,52
Sulawesi Tengah	5,67	11,99	82,34
Sulawesi Selatan	14,12	16,22	69,67
Sulawesi Tenggara	6,01	12,02	81,97
Gorontalo	1,29	9,36	89,35
Sulawesi Barat	2,42	10,86	86,72
Maluku	5,21	6,46	88,33
Maluku Utara	2,18	7,78	90,05
Papua Barat	2,95	19,60	77,45
Papua	6,48	5,75	87,77
Indonesia	9,19	9,52	81,28

Lanjutan Tabel 6.3

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan		
	Ya, dipilah dan sebagian dimanfaatkan	Ya, dipilah kemudian dibuang	Tidak dipilah
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,30	9,93	82,77
Sumatera Utara	7,66	7,36	84,98
Sumatera Barat	4,80	8,25	86,95
Riau	5,84	10,20	83,96
Jambi	3,26	7,88	88,85
Sumatera Selatan	3,08	9,22	87,70
Bengkulu	3,28	7,48	89,24
Lampung	6,88	8,43	84,69
Kep. Bangka Belitung	4,02	9,56	86,42
Kepulauan Riau	3,88	11,89	84,23
DKI Jakarta	3,39	7,95	88,65
Jawa Barat	11,28	11,36	77,36
Jawa Tengah	10,95	11,09	77,96
DI Yogyakarta	16,15	11,45	72,40
Jawa Timur	8,39	7,10	84,51
Banten	9,63	7,68	82,69
Bali	15,17	10,49	74,33
Nusa Tenggara Barat	7,61	4,10	88,29
Nusa Tenggara Timur	20,37	7,45	72,18
Kalimantan Barat	5,59	9,44	84,98
Kalimantan Tengah	7,59	16,53	75,87
Kalimantan Selatan	3,96	12,71	83,33
Kalimantan Timur	5,62	13,94	80,43
Sulawesi Utara	4,68	23,81	71,51
Sulawesi Tengah	5,26	14,86	79,88
Sulawesi Selatan	11,78	20,10	68,11
Sulawesi Tenggara	5,63	16,62	77,75
Gorontalo	3,48	10,90	85,62
Sulawesi Barat	2,73	11,49	85,78
Maluku	4,20	10,46	85,34
Maluku Utara	1,84	6,34	91,82
Papua Barat	4,92	20,98	74,10
Papua	6,83	11,27	81,90
Indonesia	8,75	10,09	81,16

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk dengan Alasan Utama Tidak Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan				
	Malas/ Tidak Ada Waktu	Tidak Ada Gunanya/ Tidak Perlu	Tidak Ada Fasilitas	Tidak Ada Peraturan	Tidak Mengetahui Sampah Harus Dipilah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	47,23	27,98	9,57	2,49	12,73
Sumatera Utara	55,94	21,69	7,79	0,74	13,84
Sumatera Barat	46,98	29,21	3,17	4,72	15,92
Riau	48,92	26,59	10,96	0,97	12,56
Jambi	43,92	30,62	9,31	3,28	12,87
Sumatera Selatan	45,30	32,89	3,62	3,17	15,02
Bengkulu	45,07	36,24	8,57	0,64	9,48
Lampung	42,90	33,56	6,05	3,14	14,35
Kep, Bangka Belitung	51,24	35,49	0,83	0,49	11,95
Kepulauan Riau	51,80	27,14	10,44	5,88	4,73
DKI Jakarta	51,95	15,98	16,56	3,06	12,45
Jawa Barat	50,00	15,79	12,08	2,13	20,00
Jawa Tengah	49,97	23,95	5,53	1,22	19,33
DI Yogyakarta	53,39	26,13	11,28	0,70	8,50
Jawa Timur	39,64	31,06	8,54	3,61	17,15
Banten	54,38	16,82	12,13	2,18	14,49
Bali	69,36	16,18	8,49	0,56	5,41
Nusa Tenggara Barat	43,04	22,95	8,22	1,22	24,58
Nusa Tenggara Timur	34,92	35,29	6,16	0,65	22,98
Kalimantan Barat	48,31	26,98	7,13	0,49	17,08
Kalimantan Tengah	51,88	30,05	8,04	0,51	9,52
Kalimantan Selatan	39,06	29,80	6,01	3,84	21,29
Kalimantan Timur	61,97	17,57	7,31	1,12	12,02
Sulawesi Utara	46,89	22,65	8,32	1,56	20,58
Sulawesi Tengah	40,05	39,19	6,77	1,04	12,95
Sulawesi Selatan	44,52	22,60	14,03	1,27	17,58
Sulawesi Tenggara	45,13	28,55	5,79	3,75	16,78
Gorontalo	42,87	29,18	11,67	2,70	13,57
Sulawesi Barat	19,62	62,67	4,61	-	13,11
Maluku	37,97	40,41	3,78	4,05	13,78
Maluku Utara	31,00	38,48	13,89	0,66	15,96
Papua Barat	39,47	38,97	12,91	2,56	6,10
Papua	49,62	34,83	4,98	1,20	9,37
Indonesia	48,68	22,91	9,73	2,25	16,43

Lanjutan Tabel 6.4

Provinsi	Pedesaan				
	Malas/ Tidak Ada Waktu	Tidak Ada Gunanya/ Tidak Perlu	Tidak Ada Fasilitas	Tidak Ada Peraturan	Tidak Mengetahui Sampah Harus Dipilah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	27,55	36,40	5,86	2,25	27,94
Sumatera Utara	35,98	30,17	4,76	1,54	27,54
Sumatera Barat	34,15	34,61	4,87	1,19	25,18
Riau	38,17	34,49	6,11	2,35	18,87
Jambi	29,43	33,91	8,27	1,29	27,11
Sumatera Selatan	33,20	38,33	3,09	1,46	23,93
Bengkulu	43,56	35,56	3,79	2,11	14,98
Lampung	42,75	27,68	4,25	2,06	23,26
Kep. Bangka Belitung	43,99	36,27	4,06	0,51	15,16
Kepulauan Riau	49,45	15,28	8,16	2,68	24,44
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	36,43	22,72	8,20	1,61	31,05
Jawa Tengah	43,25	28,93	2,94	0,75	24,13
DI Yogyakarta	35,77	30,67	10,79	1,65	21,12
Jawa Timur	30,28	35,51	3,31	0,74	30,16
Banten	30,71	21,86	1,86	2,08	43,48
Bali	67,89	19,14	1,56	-	11,42
Nusa Tenggara Barat	29,63	29,51	1,84	2,00	37,03
Nusa Tenggara Timur	16,04	32,12	2,55	0,93	48,36
Kalimantan Barat	38,24	28,25	4,82	1,92	26,77
Kalimantan Tengah	30,94	27,00	6,89	1,08	34,09
Kalimantan Selatan	32,01	30,82	5,53	2,48	29,15
Kalimantan Timur	43,36	24,99	6,98	3,70	20,98
Sulawesi Utara	31,85	35,49	4,33	2,26	26,07
Sulawesi Tengah	32,44	29,27	3,22	1,51	33,55
Sulawesi Selatan	33,92	34,90	5,38	0,51	25,30
Sulawesi Tenggara	26,82	47,53	2,59	0,18	22,88
Gorontalo	39,76	28,67	2,97	0,45	28,15
Sulawesi Barat	36,59	36,30	3,94	2,14	21,04
Maluku	27,73	36,29	5,54	2,17	28,28
Maluku Utara	24,11	43,73	8,66	1,56	21,95
Papua Barat	35,01	34,76	4,27	2,92	23,03
Papua	16,23	37,67	4,22	1,39	40,49
Indonesia	34,87	31,05	4,55	1,35	28,17

Lanjutan Tabel 6.4

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan				
	Malas/ Tidak Ada Waktu	Tidak Ada Gunanya/ Tidak Perlu	Tidak Ada Fasilitas	Tidak Ada Peraturan	Tidak Mengetahui Sampah Harus Dipilah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	33,37	33,91	6,96	2,32	23,44
Sumatera Utara	45,74	26,03	6,24	1,15	20,85
Sumatera Barat	39,07	32,54	4,22	2,55	21,63
Riau	42,17	31,55	7,91	1,84	16,53
Jambi	33,66	32,95	8,57	1,87	22,95
Sumatera Selatan	37,29	36,48	3,27	2,04	20,91
Bengkulu	44,01	35,76	5,21	1,67	13,34
Lampung	42,79	29,10	4,69	2,32	21,11
Kep. Bangka Belitung	47,43	35,90	2,53	0,50	13,64
Kepulauan Riau	51,45	25,38	10,10	5,41	7,65
DKI Jakarta	51,95	15,98	16,56	3,06	12,45
Jawa Barat	45,26	18,21	10,72	1,95	23,86
Jawa Tengah	46,39	26,60	4,15	0,97	21,88
DI Yogyakarta	47,68	27,60	11,12	1,01	12,59
Jawa Timur	34,61	33,45	5,73	2,07	24,13
Banten	46,97	18,39	8,92	2,15	23,56
Bali	68,85	17,21	6,08	0,36	7,50
Nusa Tenggara Barat	35,28	26,74	4,52	1,67	31,78
Nusa Tenggara Timur	19,04	32,63	3,12	0,88	44,33
Kalimantan Barat	40,94	27,91	5,44	1,54	24,17
Kalimantan Tengah	38,06	28,04	7,28	0,89	25,74
Kalimantan Selatan	34,93	30,40	5,73	3,04	25,89
Kalimantan Timur	54,54	20,53	7,18	2,15	15,60
Sulawesi Utara	38,42	29,88	6,07	1,95	23,67
Sulawesi Tengah	34,11	31,45	4,00	1,41	29,03
Sulawesi Selatan	37,60	30,62	8,39	0,77	22,61
Sulawesi Tenggara	31,27	42,92	3,37	1,05	21,40
Gorontalo	40,75	28,83	5,73	1,16	23,53
Sulawesi Barat	33,00	41,86	4,08	1,69	19,37
Maluku	31,67	37,87	4,86	2,89	22,70
Maluku Utara	26,12	42,20	10,18	1,29	20,20
Papua Barat	36,19	35,88	6,57	2,83	18,53
Papua	22,76	37,11	4,37	1,35	34,41
Indonesia	41,74	27,00	7,13	1,80	22,33

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan yang Paling Sering Dilakukan Terhadap Barang Bekas Layak Pakai Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan			
	Dimanfaatkan untuk Keperluan Lain	Diberikan kepada Orang Lain	Dijual	Dibuang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	46,26	44,52	3,42	5,80
Sumatera Utara	36,86	34,67	9,64	18,83
Sumatera Barat	35,34	47,49	7,42	9,74
Riau	42,12	41,93	7,89	8,06
Jambi	44,72	36,49	5,51	13,29
Sumatera Selatan	31,10	55,56	4,72	8,62
Bengkulu	40,25	38,67	7,80	13,28
Lampung	32,71	47,41	7,08	12,80
Kep. Bangka Belitung	38,10	49,02	2,91	9,97
Kepulauan Riau	23,70	52,58	5,46	18,27
DKI Jakarta	13,93	58,88	11,74	15,45
Jawa Barat	23,30	54,55	9,86	12,29
Jawa Tengah	29,09	36,20	19,10	15,61
DI Yogyakarta	17,80	48,94	19,26	13,99
Jawa Timur	20,56	48,74	17,34	13,36
Banten	20,98	56,96	9,92	12,14
Bali	32,93	49,37	1,42	16,28
Nusa Tenggara Barat	41,45	43,38	3,35	11,82
Nusa Tenggara Timur	29,02	61,78	0,26	8,94
Kalimantan Barat	25,90	51,86	7,92	14,33
Kalimantan Tengah	33,68	47,01	7,21	12,09
Kalimantan Selatan	24,90	62,62	1,54	10,94
Kalimantan Timur	28,49	55,55	2,94	13,02
Sulawesi Utara	25,32	63,26	1,29	10,13
Sulawesi Tengah	34,26	57,90	1,96	5,87
Sulawesi Selatan	31,41	53,75	4,10	10,74
Sulawesi Tenggara	41,02	42,35	2,20	14,43
Gorontalo	30,05	61,28	3,05	5,62
Sulawesi Barat	47,21	48,02	4,56	0,22
Maluku	39,90	49,78	1,07	9,25
Maluku Utara	71,27	16,04	-	12,69
Papua Barat	27,73	59,61	-	12,66
Papua	34,09	50,07	0,57	15,26
Indonesia	25,99	49,71	11,04	13,26

Lanjutan Tabel 6.5

Provinsi	Pedesaan			
	Dimanfaatkan untuk Keperluan Lain	Diberikan kepada Orang Lain	Dijual	Dibuang
	(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	64,44	19,71	5,47	10,38
Sumatera Utara	48,91	18,51	9,60	22,99
Sumatera Barat	61,06	17,57	6,21	15,16
Riau	61,89	20,81	5,66	11,64
Jambi	53,99	21,39	7,13	17,50
Sumatera Selatan	43,06	27,67	8,51	20,76
Bengkulu	53,09	20,74	8,62	17,55
Lampung	48,21	20,69	10,00	21,10
Kep. Bangka Belitung	59,48	25,68	1,35	13,49
Kepulauan Riau	50,92	25,31	2,77	21,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	46,04	30,18	10,35	13,42
Jawa Tengah	35,35	19,08	19,58	25,98
DI Yogyakarta	30,33	22,82	27,43	19,41
Jawa Timur	37,44	26,02	16,00	20,54
Banten	46,45	28,37	10,33	14,85
Bali	36,82	23,08	5,23	34,87
Nusa Tenggara Barat	56,50	23,61	4,46	15,42
Nusa Tenggara Timur	48,47	19,05	0,88	31,60
Kalimantan Barat	52,45	23,96	2,46	21,13
Kalimantan Tengah	52,49	26,23	4,21	17,07
Kalimantan Selatan	43,93	37,83	1,49	16,74
Kalimantan Timur	49,13	28,38	1,15	21,35
Sulawesi Utara	39,02	43,95	1,63	15,41
Sulawesi Tengah	61,90	25,59	2,00	10,51
Sulawesi Selatan	58,93	31,49	1,23	8,35
Sulawesi Tenggara	64,53	19,91	1,19	14,36
Gorontalo	54,59	32,92	1,69	10,80
Sulawesi Barat	62,99	21,73	3,58	11,70
Maluku	57,47	24,15	0,69	17,69
Maluku Utara	61,99	14,96	0,07	22,98
Papua Barat	56,53	17,44	1,01	25,02
Papua	49,44	20,36	0,14	30,06
Indonesia	46,17	24,37	10,22	19,24

Lanjutan Tabel 6.5

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan			
	Dimanfaatkan untuk Keperluan Lain	Diberikan kepada Orang Lain	Dijual	Dibuang
		(10)	(11)	(12)
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	59,37	26,63	4,90	9,10
Sumatera Utara	43,06	26,35	9,62	20,97
Sumatera Barat	51,20	29,04	6,68	13,09
Riau	54,28	28,94	6,52	10,26
Jambi	51,26	25,83	6,65	16,26
Sumatera Selatan	38,96	37,22	7,21	16,60
Bengkulu	49,14	26,25	8,37	16,24
Lampung	44,39	27,26	9,28	19,06
Kep. Bangka Belitung	48,80	37,34	2,13	11,73
Kepulauan Riau	27,88	48,40	5,04	18,68
DKI Jakarta	13,93	58,88	11,74	15,45
Jawa Barat	31,32	45,96	10,03	12,69
Jawa Tengah	32,55	26,74	19,37	21,34
DI Yogyakarta	21,80	40,62	21,87	15,72
Jawa Timur	29,59	36,58	16,62	17,21
Banten	28,66	48,34	10,04	12,96
Bali	34,41	39,35	2,87	23,37
Nusa Tenggara Barat	50,20	31,89	4,00	13,91
Nusa Tenggara Timur	44,66	27,41	0,76	27,16
Kalimantan Barat	44,60	32,21	4,07	19,12
Kalimantan Tengah	46,16	33,22	5,22	15,39
Kalimantan Selatan	35,99	48,18	1,51	14,32
Kalimantan Timur	36,37	45,18	2,26	16,20
Sulawesi Utara	32,82	52,69	1,47	13,02
Sulawesi Tengah	55,19	33,43	1,99	9,39
Sulawesi Selatan	48,97	39,55	2,27	9,21
Sulawesi Tenggara	57,90	26,24	1,48	14,38
Gorontalo	46,11	42,72	2,16	9,01
Sulawesi Barat	59,52	27,51	3,79	9,17
Maluku	50,34	34,55	0,85	14,27
Maluku Utara	64,57	15,26	0,05	20,12
Papua Barat	47,96	29,99	0,71	21,34
Papua	45,62	27,77	0,24	26,37
Indonesia	36,11	37,00	10,63	16,26

7

PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR



BAB VII

PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR

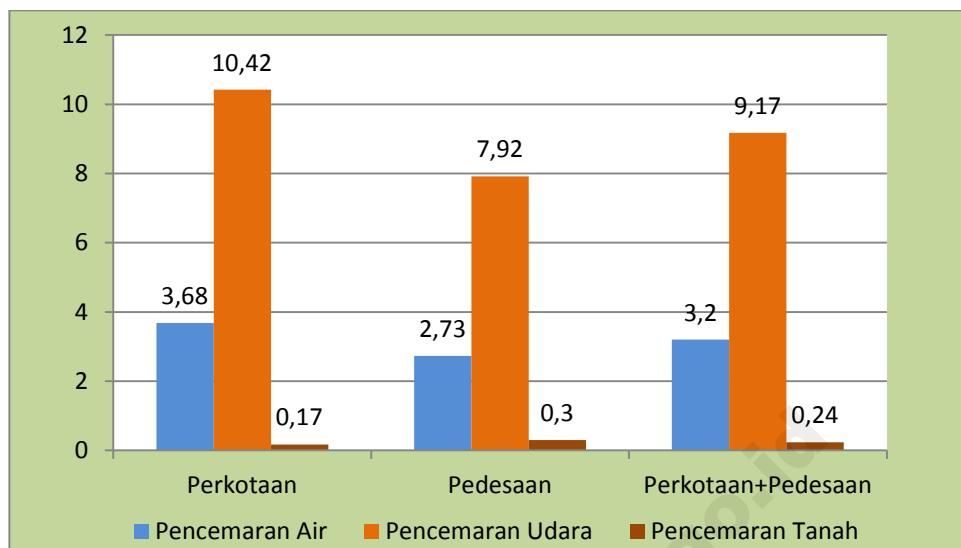
Perilaku peduli lingkungan hidup ditunjukkan salah satunya dengan kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Perilaku yang ditanyakan dalam Susenas Modul Hansos 2014 terkait pengalaman rumah tangga dalam menilai kondisi atau kualitas lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan upaya rumah tangga ketika terjadi gangguan atau pencemaran di lingkungan sekitar rumahnya.

7.1. Gangguan/Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan yang dimaksud dalam survei ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Berdasarkan hasil Susenas Modul Hansos 2014, sebanyak 84,97 persen rumah tangga menyatakan tidak merasa terganggu dengan kondisi/kualitas air, udara, dan tanah, dengan kata lain rumah tangga tersebut tidak merasakan adanya pencemaran di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pencemaran udara adalah jenis gangguan yang paling banyak dirasakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 9,17 persen (Grafik7.1). Persentase tertinggi rumah tangga yang mengalami gangguan atau pencemaran udara terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu mencapai 70,30 persen, diikuti Provinsi Riau sebesar 58,82 persen. Tingginya pencemaran udara yang dirasakan oleh rumah tangga di Provinsi DI Yogyakarta dimungkinkan karena adanya debu abu vulkanik akibat meletusnya Gunung Kelud. Sedangkan pencemaran udara yang terjadi di Provinsi Riau dimungkinkan karena sering terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di provinsi tersebut.

Grafik 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan /Pencemaran Lingkungan Menurut Jenis Gangguan /Pencemaran dan Daerah Tempat Tinggal



Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi maupun komponen lainnya baik berupa makhluk hidup maupun benda mati ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Penurunan kualitas air dapat terjadi pada air danau, sungai, laut dan air tanah. Gangguan kondisi/kualitas air (pencemaran air) dirasakan oleh sekitar 3,20 persen rumah tangga. Pencemaran air yang terbanyak dirasakan oleh rumah tangga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yaitu masing-masing sebesar 8,74 persen dan 8,18 persen (Tabel 7.1). Adapun untuk pencemaran tanah, jarang dirasakan oleh rumah tangga, yaitu hanya 0,24 persen rumah tangga yang menyatakan mengalami gangguan pencemaran tanah.

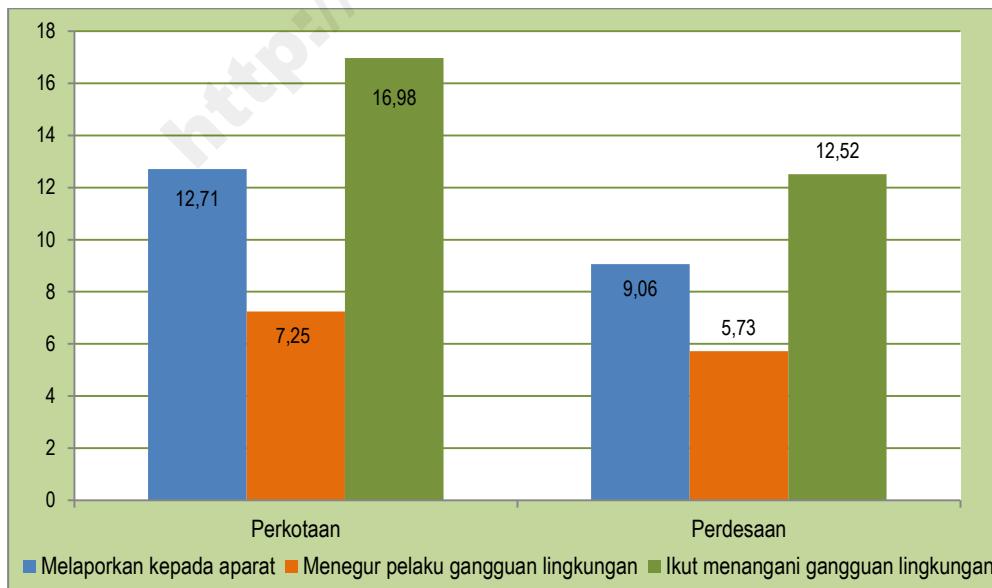
Jika dilihat menurut tempat tinggalnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persentase pencemaran udara, air maupun tanah yang terjadi di perkotaan maupun di perdesaan. Namun jika dilihat menurut jenis pencemarannya perbedaan yang signifikan terjadi antara pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pada Grafik 7.1 ditunjukkan pencemaran udara baik di perkotaan maupun di perdesaan selalu memiliki persentase yang lebih tinggi dibanding pencemaran tanah. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, pencemaran yang paling banyak dirasakan adalah pencemaran udara, selanjutnya adalah pencemaran air dan paling sedikit dirasakan adalah pencemaran tanah. Rumah tangga di perkotaan yang mengalami gangguan pencemaran udara sebesar 10,42 persen, sementara di perdesaan sebesar 7,92 persen. Berikutnya pencemaran air sebesar 3,68 persen di perkotaan dan 2,73 persen di perdesaan, dan rumah tangga yang mengalami pencemaran tanah di perkotaan sebesar 0,17 persen di perdesaan sebesar 0,3 persen.

7.2. Upaya Penanggulangan Gangguan/Pencemaran Lingkungan

Tekanan terhadap lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, maupun tanah, perlu segera ditanggulangi. Sebagai bentuk kedulian terhadap lingkungannya, semestinya rumah tangga yang mengeluh akan kondisi/kualitas lingkungan sekitar tempat tinggalnya, akan melakukan upaya atau respon untuk mengatasi pencemaran yang terjadi. Upaya tersebut dapat berupa laporan atau pengaduan ke aparat setempat, menegur pelaku gangguan lingkungan, atau ikut menangani gangguan lingkungan.

Dari rumah tangga yang mengalami gangguan pencemaran, sebanyak 15,08 persen rumah tangga ikut menangani gangguan lingkungan yang terjadi (Tabel 7.2). Sementara rumah tangga yang melakukan upaya melaporkan/mengadu kepada aparat setempat tercatat sebesar 11,16 persen, dan rumah tangga yang menegur pelaku pencemaran lingkungan tercatat sebesar 6,60 persen. Jika dilihat menurut provinsi, persentase rumah tangga di Provinsi Papua paling aktif melakukan penanggulangan pencemaran yang terjadi, yaitu tercatat sebesar 26,32 persen rumah tangga melaporkan atau mengadukan ke aparat setempat, sebesar 29,23 persen rumah tangga menegur pelaku gangguan lingkungan, dan sekitar 30,47 persen rumah tangga ikut menangani gangguan lingkungan.

Grafik 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan/Pencemaran Lingkungan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Pencemaran Lingkungan dan Daerah Tempat Tinggal



Berdasarkan Grafik 7.2, jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun di perdesaan ternyata upaya ikut menangani gangguan lingkungan lebih banyak dilakukan oleh rumah tangga daripada hanya sekedar menegur pelaku atau melaporkan pelaku gangguan pencemaran lingkungan ke aparat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam mengatasi masalah gangguan pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggalnya sudah lebih baik. Kemandirian mereka terlihat dengan ikut terlibatnya mereka secara langsung dalam menangani gangguan lingkungan.

Sebesar 16,98 persen rumah tangga di perkotaan ikut menangani gangguan lingkungan, sedangkan di perdesaan ada sebesar 12,52 persen. Rumah tangga yang melaporkan pelaku ke aparat lebih kecil persentasenya dibanding yang ikut menangani gangguan lingkungan, di perkotaan sebesar 12,71 persen dan di perdesaan sebesar 9,06 persen. Sementara yang menegur pelaku gangguan lingkungan persentasenya lebih kecil baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu sebesar 7,25 persen di perkotaan dan 5,23 persen di perdesaan.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Kejadian Gangguan Kondisi/Kualitas Lingkungan

Provinsi	Perkotaan			
	Tidak Ada Pencemaran	Pencemaran Air	Pencemaran Udara	Pencemaran Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	88,56	5,49	1,62	0,00
Sumatera Utara	80,67	5,77	9,94	0,25
Sumatera Barat	68,77	2,93	26,69	0,00
Riau	26,12	1,21	66,87	0,51
Jambi	82,23	3,27	11,59	0,21
Sumatera Selatan	77,06	2,89	16,31	0,15
Bengkulu	93,40	3,01	1,05	0,00
Lampung	86,88	2,15	8,71	0,00
Kep. Bangka Belitung	95,22	1,45	2,63	0,00
Kepulauan Riau	88,43	4,71	5,83	0,00
DKI Jakarta	87,11	4,20	5,92	0,10
Jawa Barat	85,97	3,40	7,14	0,19
Jawa Tengah	84,11	3,82	9,81	0,04
DI Yogyakarta	29,98	0,55	66,04	0,07
Jawa Timur	84,76	2,66	8,77	0,25
Banten	83,71	6,27	6,62	0,28
Bali	91,47	2,65	4,49	0,23
Nusa Tenggara Barat	92,12	2,00	5,27	0,06
Nusa Tenggara Timur	85,09	3,17	7,97	0,59
Kalimantan Barat	72,21	8,34	6,62	0,00
Kalimantan Tengah	66,83	5,31	19,91	0,11
Kalimantan Selatan	81,34	5,03	10,46	0,00
Kalimantan Timur	85,36	4,17	6,72	0,14
Sulawesi Utara	92,98	1,65	4,40	0,08
Sulawesi Tengah	88,40	7,30	1,99	2,04
Sulawesi Selatan	92,64	3,36	3,05	0,00
Sulawesi Tenggara	79,92	4,16	12,08	0,00
Gorontalo	80,70	7,56	8,83	0,00
Sulawesi Barat	95,73	1,32	2,73	0,00
Maluku	86,11	5,21	3,91	0,82
Maluku Utara	92,40	2,68	3,90	0,21
Papua Barat	89,40	2,16	6,53	0,35
Papua	88,68	7,61	3,50	0,00
Indonesia	82,69	3,68	10,42	0,17

Lanjutan Tabel 7.1

Provinsi	Pedesaan			
	Tidak Ada Pencemaran	Pencemaran Air	Pencemaran Udara	Pencemaran Tanah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	89,23	5,18	3,04	0,53
Sumatera Utara	81,78	2,34	12,85	0,40
Sumatera Barat	62,48	3,39	30,68	0,07
Riau	35,50	3,36	53,78	0,30
Jambi	79,61	4,42	8,49	0,11
Sumatera Selatan	85,23	4,73	6,51	0,72
Bengkulu	92,33	3,74	2,78	0,05
Lampung	93,14	1,10	4,48	0,54
Kep. Bangka Belitung	93,85	1,56	2,56	0,23
Kepulauan Riau	85,73	3,01	1,38	0,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	96,23	2,14	1,26	0,00
Jawa Tengah	89,94	1,78	6,99	0,34
DI Yogyakarta	17,60	-	79,42	0,00
Jawa Timur	93,25	0,95	5,14	0,08
Banten	93,27	2,51	3,05	0,00
Bali	91,10	3,94	2,84	0,00
Nusa Tenggara Barat	92,50	2,77	4,23	0,06
Nusa Tenggara Timur	89,00	4,32	4,40	0,80
Kalimantan Barat	76,28	8,11	7,61	0,81
Kalimantan Tengah	70,23	10,49	10,29	1,30
Kalimantan Selatan	84,13	4,62	7,60	0,99
Kalimantan Timur	76,51	11,20	5,19	0,54
Sulawesi Utara	88,63	4,39	5,32	0,62
Sulawesi Tengah	93,05	3,19	1,99	0,41
Sulawesi Selatan	92,09	2,24	3,79	0,36
Sulawesi Tenggara	88,02	1,74	9,52	0,69
Gorontalo	85,97	5,65	6,56	0,41
Sulawesi Barat	87,88	5,25	2,90	0,00
Maluku	84,47	6,37	5,76	0,18
Maluku Utara	90,86	4,40	0,97	1,74
Papua Barat	93,30	3,46	1,50	0,17
Papua	95,92	1,24	0,36	0,13
Indonesia	87,23	2,73	7,92	0,30

Lanjutan Tabel 7.1

Provinsi	Perkotaan + Pedesaan			
	Tidak Ada Pencemaran	Pencemaran Air	Pencemaran Udara	Pencemaran Tanah
	(1)	(10)	(11)	(12)
Aceh	89,04	5,26	2,65	0,38
Sumatera Utara	81,24	4,01	11,44	0,33
Sumatera Barat	64,89	3,21	29,15	0,05
Riau	31,89	2,53	58,82	0,38
Jambi	80,38	4,08	9,40	0,14
Sumatera Selatan	82,43	4,10	9,87	0,53
Bengkulu	92,66	3,52	2,25	0,04
Lampung	91,60	1,36	5,52	0,40
Kep. Bangka Belitung	94,54	1,51	2,60	0,12
Kepulauan Riau	88,02	4,45	5,14	0,00
DKI Jakarta	87,11	4,20	5,92	0,10
Jawa Barat	89,58	2,96	5,07	0,12
Jawa Tengah	87,33	2,69	8,25	0,21
DI Yogyakarta	26,03	0,38	70,30	0,05
Jawa Timur	89,31	1,74	6,83	0,16
Banten	86,59	5,14	5,54	0,19
Bali	91,33	3,14	3,86	0,14
Nusa Tenggara Barat	92,34	2,45	4,67	0,06
Nusa Tenggara Timur	88,23	4,10	5,10	0,76
Kalimantan Barat	75,08	8,18	7,32	0,57
Kalimantan Tengah	69,09	8,74	13,53	0,90
Kalimantan Selatan	82,96	4,79	8,79	0,58
Kalimantan Timur	81,98	6,86	6,14	0,29
Sulawesi Utara	90,60	3,15	4,90	0,37
Sulawesi Tengah	91,92	4,18	1,99	0,80
Sulawesi Selatan	92,29	2,65	3,52	0,23
Sulawesi Tenggara	85,74	2,42	10,24	0,49
Gorontalo	84,15	6,31	7,34	0,27
Sulawesi Barat	89,61	4,39	2,86	0,00
Maluku	85,13	5,90	5,01	0,44
Maluku Utara	91,29	3,92	1,79	1,32
Papua Barat	92,14	3,07	3,00	0,22
Papua	94,12	2,83	1,14	0,10
Indonesia	84,97	3,20	9,17	0,24

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Upaya Menanggulangi Gangguan Kondisi/ Kualitas Lingkungan

Provinsi	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Melaporkan Kepada Aparat	Meneguri Pelaku Gangguan Lingkungan	Ikut Menangani Gangguan Lingkungan	Melaporkan Kepada Aparat	Meneguri Pelaku Gangguan Lingkungan	Ikut Menangani Gangguan Lingkungan	Melaporkan kepada Aparat	Meneguri Pelaku Gangguan Lingkungan	Ikut Menangani Gangguan Lingkungan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18,64	6,65	18,68	31,49	7,52	22,90	27,75	7,27	21,67
Sumatera Utara	15,73	4,40	8,29	3,78	6,79	8,30	9,76	5,59	8,30
Sumatera Barat	7,66	3,48	5,92	4,52	1,49	3,94	5,59	2,17	4,62
Riau	0,79	0,33	1,20	3,76	2,20	4,05	2,52	1,42	2,86
Jambi	11,80	16,87	14,81	6,29	1,86	12,69	7,76	5,86	13,25
Sumatera Selatan	8,31	4,34	3,41	12,44	4,27	5,09	10,59	4,30	4,34
Bengkulu	13,51	10,68	8,91	11,60	9,56	15,28	12,13	9,87	13,52
Lampung	21,24	22,56	4,76	3,39	4,44	9,52	10,25	11,40	7,69
Kep. Bangka Belitung	20,27	25,34	25,34	10,80	10,80	10,80	14,94	17,15	17,15
Kepulauan Riau	9,08	4,87	9,79	27,08	6,58	13,16	12,37	5,19	10,41
DKI Jakarta	21,75	6,48	12,74	-	-	-	21,75	6,48	12,74
Jawa Barat	18,74	12,13	14,34	19,56	11,99	17,93	18,85	12,11	14,80
Jawa Tengah	13,14	7,22	20,31	5,51	3,10	12,39	9,79	5,41	16,83
DI Yogyakarta	0,93	0,77	66,14	2,18	0,32	46,36	1,37	0,61	59,12
Jawa Timur	13,99	5,76	10,11	9,36	6,53	7,22	12,43	6,02	9,13
Banten	15,27	12,36	10,48	17,56	2,84	14,55	15,62	10,91	11,10
Bali	13,55	13,70	12,75	12,35	9,91	4,49	13,08	12,22	9,51
Nusa Tenggara Barat	8,67	4,83	26,24	9,98	6,96	9,45	9,41	6,04	16,69
Nusa Tenggara Timur	17,02	13,36	40,71	25,25	8,46	15,63	23,21	9,68	21,85
Kalimantan Barat	6,66	3,07	7,02	12,94	15,44	8,86	10,87	11,36	8,25
Kalimantan Tengah	8,05	8,58	13,96	10,08	7,07	10,27	9,34	7,62	11,60
Kalimantan Selatan	2,63	1,78	3,72	2,89	1,63	4,03	2,77	1,70	3,89
Kalimantan Timur	16,14	8,96	13,62	26,81	6,77	25,04	21,45	7,87	19,30
Sulawesi Utara	22,36	11,87	14,12	15,02	8,70	9,92	17,50	9,77	11,34
Sulawesi Tengah	30,80	9,19	6,32	13,81	27,87	22,50	19,73	21,36	16,86
Sulawesi Selatan	8,49	8,06	11,17	12,39	7,21	10,10	11,04	7,50	10,47
Sulawesi Tenggara	14,72	9,94	8,57	6,66	15,01	12,43	9,86	13,00	10,90
Gorontalo	25,94	24,03	34,93	11,93	11,77	12,08	17,83	16,93	21,69
Sulawesi Barat	5,04	5,04	10,08	18,84	7,14	10,70	17,60	6,95	10,64
Maluku	25,70	28,42	41,00	5,35	8,23	22,89	13,06	15,88	29,75
Maluku Utara	6,43	16,97	11,70	18,17	28,64	38,32	15,33	25,81	31,87
Papua Barat	11,26	22,64	9,48	16,53	10,63	29,71	14,42	15,45	21,59
Papua	2,76	8,22	9,39	48,04	48,61	49,90	26,32	29,23	30,47
Indonesia	12,71	7,25	16,98	9,06	5,73	12,52	11,16	6,60	15,08

8

MITIGASI BENCANA ALAM



BAB VIII

MITIGASI BENCANA ALAM

Bencana berarti suatu kejadian yang menimbulkan kerusakan, penderitaan, kerugian bahkan kematian pada manusia ataupun lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun manusia. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan siklus waktunya, penanganan bencana terdiri atas 4 tahapan sebagai berikut:

1. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
2. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana.
3. Respons merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana.
4. Pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

8.1 Rumah Tangga yang Mengalami Bencana Alam

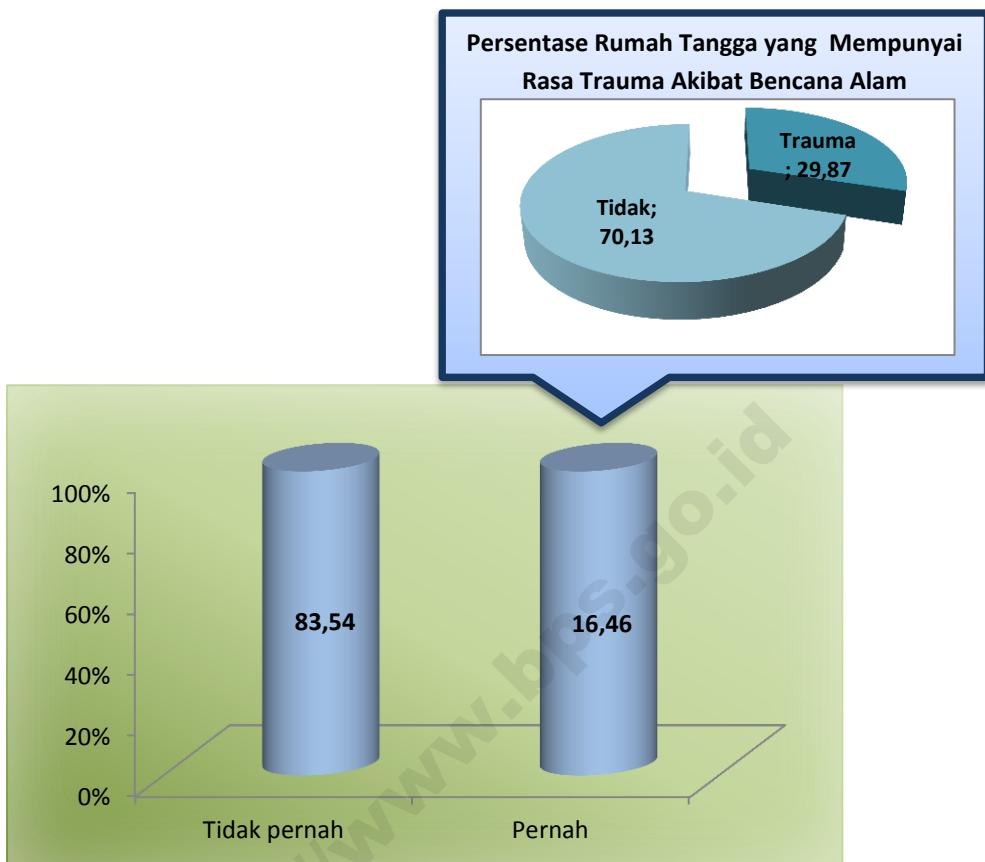
Bencana alam menimbulkan masalah yang berat dan serius yang harus ditanggung tidak hanya oleh individu namun juga masyarakat dan negara. Belajar dari kenyataan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam dan juga belajar bahwa penanganan situasi pasca bencana adalah suatu hal yang berat dan rumit, maka penanganan bencana perlu dipersiapkan sejak dini.

Kejadian bencana alam memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia dan lingkungan. Dengan berbagai kejadian bencana yang dialami masyarakat ditengarai menimbulkan trauma. Pada dasarnya manusia akan berespon terhadap peristiwa-peristiwa sulit yang dialami seperti bencana alam. Beberapa mungkin dapat melaluinya dengan baik, namun yang lainnya mungkin mengalami hambatan. Namun sangatlah wajar, apabila seseorang baru saja mengalami sesuatu peristiwa yang luar biasa, seperti gempa bumi yang meluluh lantakkan tempat tinggalnya, seseorang mengalami stres dan trauma.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial (Hansos) 2014 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa kurang dari seperlima rumah tangga di Indonesia pernah mengalami bencana dalam setahun terakhir yaitu mencapai 16,46 persen. Kejadian ini bisa disebabkan karena memang dari keadaan alamnya dimana tempat tinggalnya termasuk wilayah rawan bencana atau karena ulah manusianya sendiri sehingga menyebabkan terjadi bencana alam. Rumah tangga yang tidak pernah mengalami kejadian bencana alam sebesar 83,54 persen. Bencana alam yang pernah dialami rumah tangga sebesar 16,46 persen, telah meninggalkan trauma pada 29,87 persen rumah tangga. Sisanya sebesar 70,13 persen rumah tangga tidak mempunyai rasa trauma akibat kejadian bencana yang dialami (Grafik 8.1).

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang pernah mengalami bencana alam di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan masing-masing tercatat sebesar 16,87 persen dan 16,05 persen. Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang pernah mengalami bencana alam dalam setahun terakhir terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (78,77 persen), diikuti oleh Provinsi Gorontalo (38,27 persen) dan Sulawesi Tengah (36,69 persen) (Tabel 8.1).

Grafik 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam dalam Setahun Terakhir

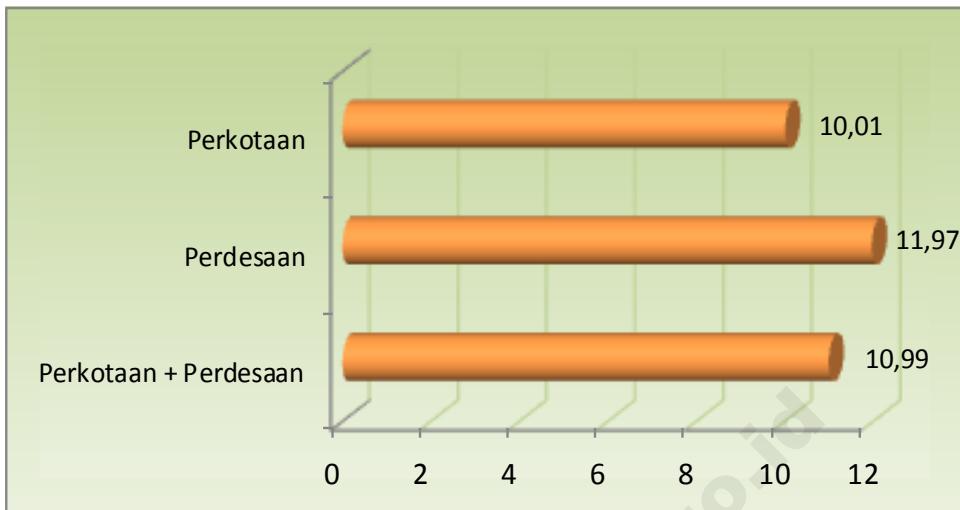


8.2 Desa Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan menanggulangi dampak buruk baha tertentu.

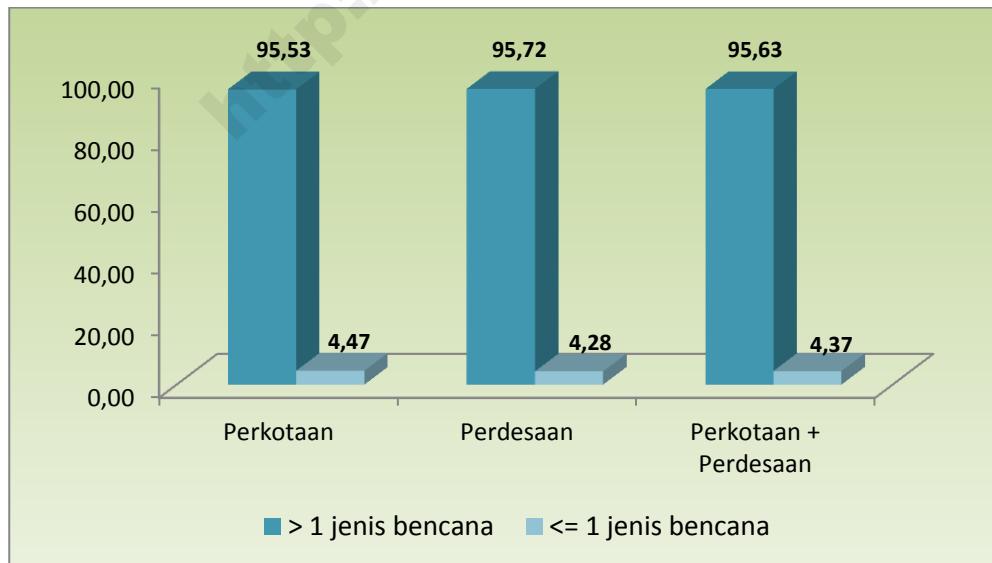
Hasil Susenas Modul Hansos 2014 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang manganggap bahwa desa tempat tinggalnya termasuk desa yang rawan bencana di Indonesia sebanyak 10,99 persen. Daerah pedesaan lebih rawan bencana dibandingkan daerah perkotaan, yaitu 11,97 persen untuk pedesaan, sedangkan diperkotaan 10,01 persen (Grafik 8.2).

Grafik 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Desa Tempat Tinggalnya Termasuk Desa yang Rawan Bencana Menurut Daerah Tempat Tinggal



Persentase tertinggi rumah tangga yang wilayahnya termasuk desa rawan bencana adalah Provinsi Bengkulu sebesar 29,04 persen. Hal ini dimungkinkan karena wilayahnya terdapat banyak desa yang rawan bencana gempa. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan desa rawan bencana yang paling sedikit yaitu sebesar 3,72 persen (Tabel 8.3).

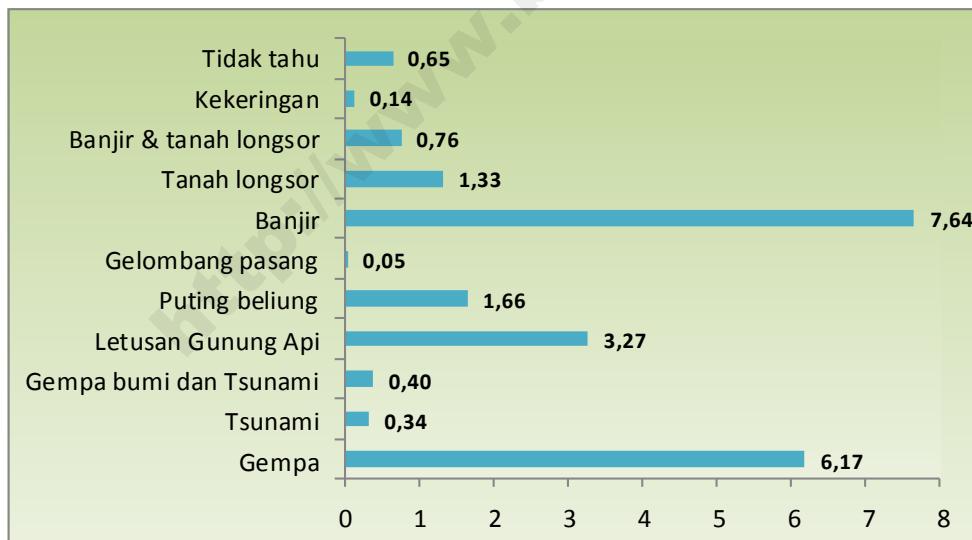
Grafik 8.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Ragam Jenis Bencana yang Pernah Terjadi di Desanya dan Daerah Tempat Tinggal



Jika dilihat menurut jenis bencana alam yang pernah terjadi di desanya, sekitar 96 persen rumah tangga pernah mengalami kejadian lebih dari satu jenis bencana alam, sedangkan sisanya 4 persen rumah tangga hanya pernah mengalami satu jenis bencana alam atau bahkan tidak pernah mengalami bencana alam. Keadaan ini tidak berbeda antara wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Berdasarkan data tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih banyak wilayah rawan bencana alam di Indonesia dimana sebagian besar rumah tangga pernah mengalami lebih dari satu jenis bencana alam yang terjadi di desa tempat tinggalnya.

Rumah tangga yang pernah mengalami kejadian bencana alam, apalagi jika desa tempat tinggalnya termasuk desa rawan bencana, maka pasti ada kekhawatiran bencana alam tersebut akan terjadi lagi. Persentase tertinggi rumah tangga yang paling mengkhawatirkan bencana banjir akan terjadi di desa tempat tinggalnya sebesar 7,64 persen, diikuti bencana gempa sebesar 6,17 persen dan bencana letusan gunung api sebesar 3,27 persen (Grafik 8.4)

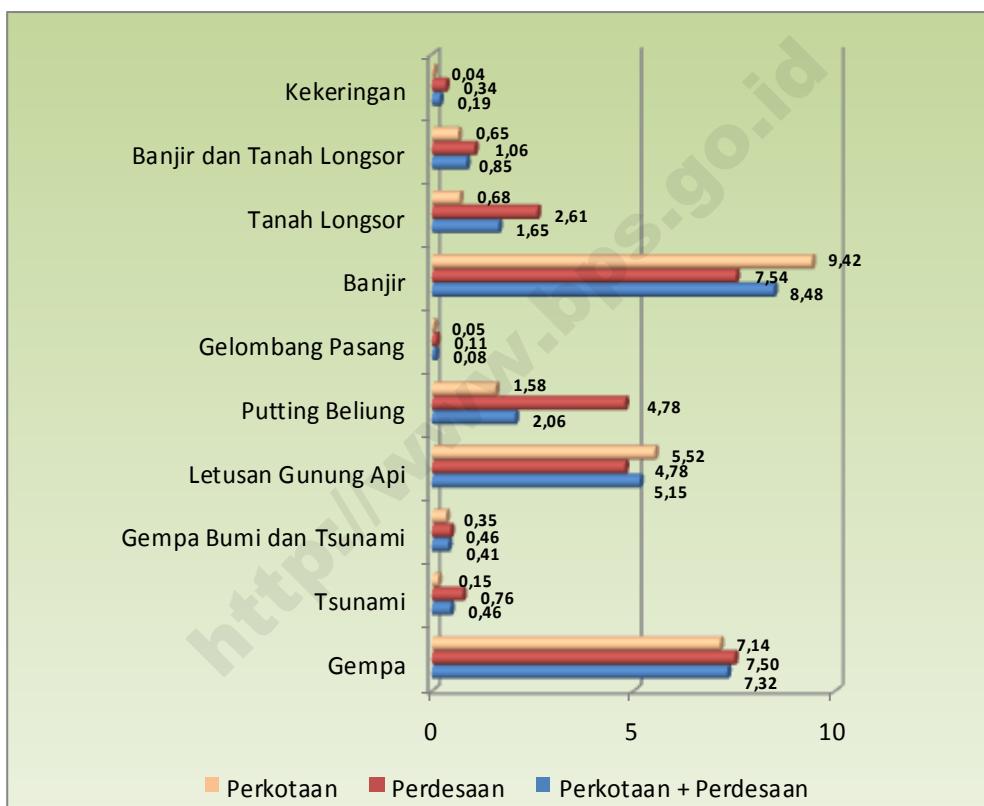
Grafik 8.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bencana yang Paling Dikhawatirkan Terjadi di Desanya



Berdasarkan jenis bencana alam, bencana alam yang paling sering terjadi dan dialami oleh rumah tangga dalam setahun terakhir adalah bencana banjir dan gempa yaitu sebesar 8,48 persen dan 7,32 persen. Sedangkan bencana alam yang paling sedikit terjadi dalam setahun terakhir pada bencana gelombang pasang dan kekeringan yaitu sebesar 0,08 dan 0,19 persen Demikian pula kejadian bencana alam di daerah perkotaan dan perdesaan,

paling sering terjadi pada bencana banjir dan gempa. Bencana banjir di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu sebesar 9,42 di perkotaan dan 7,54 persen di perdesaan. Keadaan tersebut terjadi karena diperkotaan kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu penyebab bencana banjir lebih tinggi di perkotaan disebabkan karena perilaku membuang sampah yang tidak tepat atau sembarangan, sehingga menimbulkan dampak negatif antara lain menimbulkan penyumbatan pada saluran drainase dan saluran air hujan sehingga mengakibatkan banjir (Grafik 8.5).

Grafik 8.5. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Gempa



8.3 Pengetahuan Tanggap Darurat Bencana

Kejadian bencana tidak bisa kita prediksi kapan datangnya dan seberapa besar kekuatannya. Namun yang pasti, ketika bencana datang, dampaknya sangat besar pada kehidupan orang banyak baik dari segi materi maupun non materi. Kita tidak bisa mencegah

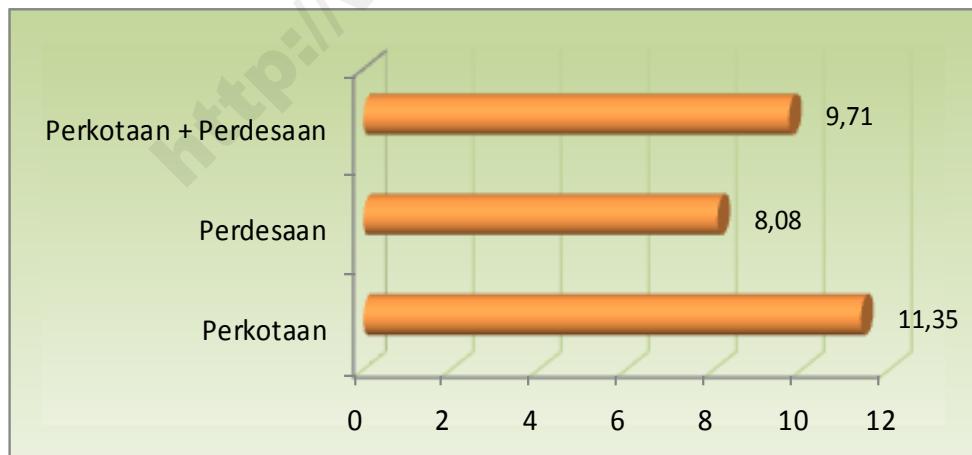
bencana alam terjadi, tapi setidaknya kita bisa siap siaga dalam menghadapi bencana. Kebanyakan dampak besar yang ditimbulkan bencana itu karena kurangnya kesiapsiagaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana.

Upaya untuk meringankan bencana secara efektif memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. Penilaian bahaya; diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu yang nantinya akan menghasilkan peta potensi bencana.

Peringatan, diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Persiapan, kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur meringankan sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman

Grafik 8.6. Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Adanya Tanda-tanda atau Peringatan untuk Mengatasi Bencana Alam di Lingkungan Tempat Tinggal



Berdasarkan Grafik 8.6 tercatat hanya sekitar 9,71 persen rumah tangga yang mengetahui adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi bencana alam di lingkungan tempat tinggalnya. Keadaan ini sedikit berbeda untuk rumah tangga yang tinggal

di daerah perdesaan dan perkotaan. Hal ini mengindikasikan masih sangat kurangnya upaya antisipasi atau mitigasi bencana alam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data hasil PODES 2014, dimana jumlah desa yang sudah ada upaya antisipasi/mitigasi bencana alam masih sedikit. Persentase desa yang ada sistem peringatan dini bencana alam (7,23 persen), jalur evakuasi (5,98 persen), dan sistem peringatan dini khusus tsunami (0,68 persen).

Peacock (2003), meneliti mengenai status mitigasi untuk bencana topan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitigasi pada pemilik rumah dengan keluarga tunggal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yang signifikan antara lain adalah pengetahuan dan pengalaman topan sebelumnya, banyaknya tetangga yang punya ruang perlindungan, lokasi tempat tinggal di pinggir pantai atau di kota, pendapatan, etnis atau ras. Sehubungan dengan penelitian tersebut, maka dalam hal ini pengetahuan atau pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana maupun kondisi tanggap darurat bencana berpengaruh terhadap mitigasi bencana.

Pelatihan atau simulasi bencana sangat penting dan diperlukan, mengingat kondisi geografis di Indonesia yang wilayahnya termasuk rawan bencana dan berpotensi terjadinya bencana. Tujuan pelatihan atau simulasi bencana diantaranya untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat kejadian bencana alam.

Persentase rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir masih sangat sedikit yaitu hanya 1,2 persen. Keadaan ini menandakan bahwa kepedulian berbagai pihak dalam upaya penyelamatan bencana masih kurang. Jika dilihat berdasarkan provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang mengikuti pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana dalam tiga tahun terakhir yaitu Provinsi DI Yogyakarta (6,49 persen), sedangkan yang terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,3 persen rumah tangga (Grafik 8.7).

Kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat, LSM, Akademik dalam penanganan bencana merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam menghadapi bencana. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam kerjasama itu antara lain: pentingnya pendataan daerah rawan bencana, pembuatan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana. Melalui kerjasama ini pemerintah diharapkan bukan lagi sekedar sebagai ‘pemadam kebakaran’ jika terjadi bencana, tetapi dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan pengelolaan bencana.

Grafik 8.7. Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Pernah Mengikuti Pelatihan Simulasi Penyelamatan Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Provinsi



Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam Dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,17	20,28	18,57
Sumatera Utara	10,03	13,98	12,06
Sumatera Barat	35,16	22,64	27,44
Riau	14,39	11,66	12,71
Jambi	10,99	10,14	10,39
Sumatera Selatan	5,40	9,22	7,91
Bengkulu	27,61	33,99	32,03
Lampung	2,74	2,09	2,25
Kep. Bangka Belitung	2,14	0,47	1,30
Kepulauan Riau	4,87	4,44	4,80
DKI Jakarta	22,87	-	22,87
Jawa Barat	9,90	11,64	10,51
Jawa Tengah	21,34	15,97	18,37
DI Yogyakarta	77,86	80,72	78,77
Jawa Timur	27,57	24,79	26,08
Banten	4,30	6,92	5,09
Bali	12,39	12,84	12,56
Nusa Tenggara Barat	9,10	9,52	9,35
Nusa Tenggara Timur	12,45	9,31	9,92
Kalimantan Barat	4,76	5,86	5,53
Kalimantan Tengah	6,76	15,75	12,72
Kalimantan Selatan	6,07	7,07	6,65
Kalimantan Timur	6,65	14,97	9,83
Sulawesi Utara	24,04	14,79	18,97
Sulawesi Tengah	38,21	36,20	36,69
Sulawesi Selatan	12,19	14,90	13,92
Sulawesi Tenggara	7,00	6,89	6,92
Gorontalo	28,48	43,44	38,27
Sulawesi Barat	12,05	18,91	17,40
Maluku	18,35	15,98	16,94
Maluku Utara	19,89	32,22	28,79
Papua Barat	12,23	9,70	10,46
Papua	10,03	15,39	14,06
Indonesia	16,87	16,05	16,46

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rasa Trauma Akibat Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,97	53,38	56,48
Sumatera Utara	29,98	53,95	44,27
Sumatera Barat	46,38	44,80	45,58
Riau	21,22	15,58	18,03
Jambi	6,86	29,59	22,52
Sumatera Selatan	27,64	39,59	36,79
Bengkulu	29,24	41,60	38,32
Lampung	7,31	31,91	24,53
Kep. Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	11,77	36,16	15,23
DKI Jakarta	30,80	0,00	30,80
Jawa Barat	30,56	45,32	36,32
Jawa Tengah	24,47	31,95	28,06
DI Yogyakarta	40,40	50,57	43,72
Jawa Timur	10,00	14,05	12,06
Banten	11,61	86,82	42,47
Bali	22,09	23,28	22,55
Nusa Tenggara Barat	30,66	39,75	36,04
Nusa Tenggara Timur	34,46	46,60	43,62
Kalimantan Barat	37,65	39,32	38,89
Kalimantan Tengah	19,29	20,10	19,95
Kalimantan Selatan	10,61	20,78	16,91
Kalimantan Timur	32,00	48,24	41,45
Sulawesi Utara	56,24	57,92	56,96
Sulawesi Tengah	31,07	30,10	30,35
Sulawesi Selatan	33,44	47,34	42,93
Sulawesi Tenggara	15,26	45,77	37,07
Gorontalo	37,13	31,40	32,87
Sulawesi Barat	10,62	36,13	32,25
Maluku	38,05	40,59	39,48
Maluku Utara	5,45	44,52	37,02
Papua Barat	18,76	50,40	39,39
Papua	61,54	79,78	76,54
Indonesia	25,75	34,18	29,87

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Desa Tempat Tinggalnya termasuk Desa Rawan Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	20,07	26,41	24,64
Sumatera Utara	6,79	8,01	7,42
Sumatera Barat	27,70	23,86	25,33
Riau	10,81	10,01	10,32
Jambi	15,19	13,79	14,20
Sumatera Selatan	4,63	3,25	3,72
Bengkulu	23,54	31,48	29,04
Lampung	4,03	3,48	3,61
Kep. Bangka Belitung	6,32	3,32	4,82
Kepulauan Riau	3,51	1,89	3,26
DKI Jakarta	18,44	0,00	18,44
Jawa Barat	9,00	14,37	10,89
Jawa Tengah	8,57	11,15	9,99
DI Yogyakarta	29,09	24,42	27,60
Jawa Timur	5,93	7,90	6,98
Banten	4,76	8,37	5,85
Bali	8,26	11,75	9,59
Nusa Tenggara Barat	5,93	7,62	6,91
Nusa Tenggara Timur	12,18	18,71	17,43
Kalimantan Barat	10,17	10,23	10,21
Kalimantan Tengah	7,15	8,44	8,00
Kalimantan Selatan	5,76	11,19	8,92
Kalimantan Timur	12,74	19,15	15,19
Sulawesi Utara	21,21	23,18	22,29
Sulawesi Tengah	22,08	21,59	21,71
Sulawesi Selatan	13,37	16,49	15,36
Sulawesi Tenggara	5,91	5,56	5,65
Gorontalo	20,59	22,58	21,89
Sulawesi Barat	15,69	22,27	20,82
Maluku	28,17	13,66	19,55
Maluku Utara	13,44	24,24	21,24
Papua Barat	24,93	17,13	19,45
Papua	9,63	14,32	13,15
Indonesia	10,01	11,97	10,99

Tabel 8.4 **Percentase Rumah Tangga dengan Ragam Jenis Bencana yang Pernah Terjadi di Desanya Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal**

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+Pedesaan	
	> 1 jenis bencana	≤ 1 jenis bencana	> 1 jenis bencana	≤ 1 jenis bencana	> 1 jenis bencana	≤ 1 jenis bencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	92,63	7,37	91,48	8,52	91,80	8,20
Sumatera Utara	97,31	2,69	96,27	3,73	96,78	3,22
Sumatera Barat	85,74	14,26	87,70	12,30	86,95	13,05
Riau	98,51	1,49	99,53	0,47	99,13	0,87
Jambi	96,88	3,12	96,08	3,92	96,31	3,69
Sumatera Selatan	76,94	23,06	99,41	0,59	91,72	8,28
Bengkulu	97,67	2,33	89,40	10,60	91,95	8,05
Lampung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kepulauan Riau	99,80	0,20	99,55	0,45	99,76	0,24
DKI Jakarta	97,70	2,30	0,00	0,00	97,70	2,30
Jawa Barat	98,68	1,32	94,88	5,12	97,34	2,66
Jawa Tengah	97,27	2,73	97,33	2,67	97,30	2,70
DI Yogyakarta	31,31	68,69	58,38	41,62	39,94	60,06
Jawa Timur	95,69	4,31	95,69	4,31	95,69	4,31
Banten	99,41	0,59	100,00	0,00	99,59	0,41
Bali	95,64	4,36	87,70	12,30	92,61	7,39
Nusa Tenggara Barat	98,04	1,96	97,47	2,53	97,71	2,29
Nusa Tenggara Timur	98,91	1,09	96,51	3,49	96,98	3,02
Kalimantan Barat	100,00	0,00	97,19	2,81	98,02	1,98
Kalimantan Tengah	100,00	0,00	98,89	1,11	99,27	0,73
Kalimantan Selatan	98,31	1,69	99,22	0,78	98,84	1,16
Kalimantan Timur	95,74	4,26	98,73	1,27	96,86	3,14
Sulawesi Utara	97,61	2,39	92,24	7,76	94,67	5,33
Sulawesi Tengah	98,96	1,04	90,37	9,63	92,46	7,54
Sulawesi Selatan	99,26	0,74	95,60	4,40	96,92	3,08
Sulawesi Tenggara	95,91	4,09	99,10	0,90	98,20	1,80
Gorontalo	92,61	7,39	94,89	5,11	94,10	5,90
Sulawesi Barat	97,44	2,56	88,13	11,87	90,17	9,83
Maluku	98,14	1,86	96,90	3,10	97,40	2,60
Maluku Utara	74,04	25,96	90,00	10,00	85,57	14,43
Papua Barat	96,11	3,89	99,33	0,67	98,37	1,63
Papua	99,57	0,43	96,17	3,83	97,02	2,98
Indonesia	95,53	4,47	95,72	4,28	95,63	4,37

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Bagaimana Cara Menyelamatkan Diri Dari Bencana Alam Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	28,32	27,57	27,78
Sumatera Utara	11,40	10,92	11,15
Sumatera Barat	49,05	27,34	35,66
Riau	15,78	15,13	15,38
Jambi	10,02	13,16	12,24
Sumatera Selatan	7,61	6,81	7,08
Bengkulu	38,37	49,84	46,31
Lampung	3,51	3,54	3,53
Kep. Bangka Belitung	4,97	3,25	4,11
Kepulauan Riau	5,35	3,00	4,99
DKI Jakarta	21,11	0,00	21,11
Jawa Barat	10,53	12,23	11,13
Jawa Tengah	18,92	16,32	17,48
DI Yogyakarta	87,16	78,28	84,33
Jawa Timur	14,32	16,03	15,24
Banten	6,51	7,25	6,73
Bali	15,07	30,26	20,86
Nusa Tenggara Barat	8,86	6,71	7,61
Nusa Tenggara Timur	12,91	14,12	13,88
Kalimantan Barat	8,25	11,87	10,80
Kalimantan Tengah	11,13	12,42	11,98
Kalimantan Selatan	6,38	10,95	9,04
Kalimantan Timur	11,76	15,29	13,11
Sulawesi Utara	21,72	21,75	21,74
Sulawesi Tengah	35,28	28,45	30,11
Sulawesi Selatan	15,60	17,36	16,73
Sulawesi Tenggara	7,22	11,47	10,27
Gorontalo	19,15	27,81	24,82
Sulawesi Barat	15,93	21,54	20,31
Maluku	26,31	16,29	20,35
Maluku Utara	44,21	29,96	33,92
Papua Barat	28,92	14,49	18,78
Papua	11,68	11,25	11,35
Indonesia	15,81	15,50	15,66

Tabel 8.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui tentang Adanya Tanda-tanda atau Peringatan Tanggap Darurat Bencana Alam di Lingkungan Tempat Tinggal Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,35	14,03	18,85
Sumatera Utara	8,55	4,94	6,70
Sumatera Barat	35,70	16,63	23,94
Riau	5,32	4,07	4,55
Jambi	10,45	3,02	5,20
Sumatera Selatan	2,32	3,56	3,14
Bengkulu	41,60	21,14	27,44
Lampung	2,92	4,43	4,06
Kep. Bangka Belitung	4,17	0,22	2,19
Kepulauan Riau	3,84	6,25	4,21
DKI Jakarta	18,86	0,00	18,86
Jawa Barat	9,47	8,98	9,30
Jawa Tengah	12,02	11,31	11,62
DI Yogyakarta	32,96	24,82	30,37
Jawa Timur	8,98	7,24	8,05
Banten	6,65	4,87	6,11
Bali	35,84	45,12	39,38
Nusa Tenggara Barat	4,28	3,50	3,83
Nusa Tenggara Timur	6,88	3,47	4,14
Kalimantan Barat	2,50	2,41	2,44
Kalimantan Tengah	13,60	6,54	8,92
Kalimantan Selatan	5,27	4,93	5,07
Kalimantan Timur	9,35	10,66	9,85
Sulawesi Utara	13,56	12,72	13,10
Sulawesi Tengah	8,62	4,99	5,87
Sulawesi Selatan	4,16	2,53	3,12
Sulawesi Tenggara	2,55	1,79	2,01
Gorontalo	5,43	5,91	5,74
Sulawesi Barat	0,76	4,12	3,38
Maluku	18,37	10,15	13,49
Maluku Utara	8,35	6,56	7,06
Papua Barat	6,08	11,58	9,94
Papua	9,61	6,50	7,27
Indonesia	11,35	8,08	9,71

Tabel 8.7 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Pernah Mengikuti Pelatihan atau Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,89	1,03	1,55
Sumatera Utara	0,89	0,51	0,69
Sumatera Barat	8,12	1,83	4,24
Riau	1,02	0,53	0,72
Jambi	3,57	0,11	1,12
Sumatera Selatan	0,97	0,07	0,38
Bengkulu	2,60	1,55	1,87
Lampung	0,94	0,13	0,33
Kep. Bangka Belitung	0,60	0,00	0,30
Kepulauan Riau	1,13	0,00	0,95
DKI Jakarta	2,30	0,00	2,30
Jawa Barat	1,72	0,29	1,22
Jawa Tengah	1,42	0,87	1,12
DI Yogyakarta	8,31	2,59	6,49
Jawa Timur	1,31	0,19	0,71
Banten	1,29	0,19	0,96
Bali	4,22	1,51	3,19
Nusa Tenggara Barat	1,01	0,26	0,57
Nusa Tenggara Timur	1,54	1,04	1,14
Kalimantan Barat	1,15	0,00	0,34
Kalimantan Tengah	2,77	0,37	1,18
Kalimantan Selatan	1,60	0,74	1,10
Kalimantan Timur	2,39	0,42	1,64
Sulawesi Utara	2,69	1,35	1,96
Sulawesi Tengah	4,31	0,55	1,46
Sulawesi Selatan	1,71	0,21	0,75
Sulawesi Tenggara	2,03	0,21	0,73
Gorontalo	1,63	0,63	0,98
Sulawesi Barat	2,28	0,44	0,84
Maluku	2,97	0,20	1,32
Maluku Utara	0,42	2,02	1,57
Papua Barat	0,00	2,24	1,57
Papua	0,58	0,22	0,31
Indonesia	1,89	0,51	1,20

Tabel 8.8 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Status Hubungan dengan KRT

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+Pedesaan	
	KRT + Istri/suami	Selain KRT dan Pasangannya	KRT + Istri/suami	Selain KRT dan Pasangannya	KRT + Istri/suami	Selain KRT dan Pasangannya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	89,36	10,64	81,43	18,57	97,98	2,02
Sumatera Utara	95,40	4,60	92,63	7,37	100,00	0,00
Sumatera Barat	64,43	35,57	54,45	45,55	91,95	8,05
Riau	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Jambi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Sumatera Selatan	96,26	3,74	100,00	0,00	70,79	29,21
Bengkulu	91,66	8,34	80,51	19,49	100,00	0,00
Lampung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	83,20	16,80	83,20	16,80	0,00	0,00
Jawa Barat	90,64	9,36	89,77	10,23	100,00	0,00
Jawa Tengah	79,49	20,51	80,62	19,38	77,99	22,01
DI Yogyakarta	84,96	15,04	85,11	14,89	83,94	16,06
Jawa Timur	77,96	22,04	77,08	22,92	83,35	16,65
Banten	94,63	5,37	94,29	5,71	100,00	0,00
Bali	74,57	25,43	80,74	19,26	46,66	53,34
Nusa Tenggara Barat	67,11	32,89	64,24	35,76	75,01	24,99
Nusa Tenggara Timur	96,44	3,56	86,56	13,44	100,00	0,00
Kalimantan Barat	75,73	24,27	75,73	24,27	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Kalimantan Selatan	79,43	20,57	81,08	18,92	76,88	23,12
Kalimantan Timur	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Sulawesi Utara	79,83	20,17	81,49	18,51	77,09	22,91
Sulawesi Tengah	68,20	31,80	79,78	20,22	39,17	60,83
Sulawesi Selatan	83,10	16,90	91,77	8,23	42,30	57,70
Sulawesi Tenggara	93,42	6,58	91,65	8,35	100,00	0,00
Gorontalo	87,61	12,39	78,45	21,55	100,00	0,00
Sulawesi Barat	60,29	39,71	33,33	66,67	100,00	0,00
Maluku	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Maluku Utara	67,01	32,99	100,00	0,00	64,40	35,60
Papua Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Papua	87,40	12,60	77,91	22,09	100,00	0,00
Indonesia	84,31	15,69	84,05	15,95	85,26	14,74

Tabel 8.9 Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Memerlukan Pertolongan Jika Terjadi Bencana Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27,23	27,71	27,58
Sumatera Utara	19,55	25,05	22,38
Sumatera Barat	19,04	27,08	24,00
Riau	21,57	22,51	22,15
Jambi	23,17	16,78	18,66
Sumatera Selatan	16,84	25,51	22,54
Bengkulu	16,99	24,58	22,25
Lampung	28,23	22,86	24,18
Kep. Bangka Belitung	26,36	28,97	27,67
Kepulauan Riau	18,35	19,60	18,54
DKI Jakarta	18,49	0,00	18,49
Jawa Barat	20,89	22,79	21,56
Jawa Tengah	24,58	22,85	23,62
DI Yogyakarta	19,62	27,36	22,09
Jawa Timur	20,59	22,63	21,68
Banten	16,64	25,75	19,39
Bali	21,74	33,48	26,22
Nusa Tenggara Barat	22,56	32,89	28,56
Nusa Tenggara Timur	26,17	34,37	32,77
Kalimantan Barat	23,95	23,02	23,29
Kalimantan Tengah	29,05	24,63	26,12
Kalimantan Selatan	20,01	24,77	22,79
Kalimantan Timur	17,34	19,56	18,18
Sulawesi Utara	22,60	27,57	25,32
Sulawesi Tengah	31,64	29,87	30,30
Sulawesi Selatan	23,25	30,23	27,70
Sulawesi Tenggara	24,00	29,88	28,23
Gorontalo	21,56	25,88	24,38
Sulawesi Barat	24,06	30,21	28,86
Maluku	23,89	28,49	26,63
Maluku Utara	26,97	27,97	27,69
Papua Barat	15,82	20,89	19,38
Papua	18,92	22,15	21,34
Indonesia	21,06	24,63	22,85

LAMPIRAN

RELATIVE STANDARD ERROR (RSE)

Penggunaan teknik *sampling* dalam Susenas Modul Hansos 2015, menyebabkan hasil estimasi tidak terlepas dari *sampling error*. *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Oleh karena itu, setiap estimasi perlu dilihat tingkat presisi atau keakuratannya, yaitu dengan melihat besarnya *sampling error*.

Secara teori statistik, besarnya *sampling error* ditunjukkan dengan besarnya angka *standard error*. *Standard error* juga dapat disajikan dalam bentuk persentase angka *standard error* terhadap nilai estimasinya. Penyajian *standard error* dalam bentuk persentase inilah yang disebut sebagai *Relative Standard Error (RSE)*. Suatu estimasi dikatakan presisi atau akurat jika nilai RSE < 25%. Estimasi juga dikatakan terandal jika nilainya terletak pada selang kepercayaan yang memiliki batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Berikut disajikan hasil RSE dan selang kepercayaan beberapa indikator perilaku peduli lingkungan hidup 2014.

Tabel 1 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bekas Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,84	0,98	11,93	15,76	7,06
Sumatera Utara	22,52	1,06	20,44	24,61	4,72
Sumatera Barat	10,08	0,74	8,62	11,54	7,39
Riau	15,44	1,02	13,44	17,44	6,61
Jambi	12,47	1,06	10,40	14,55	8,49
Sumatera Selatan	21,19	1,04	19,15	23,23	4,90
Bengkulu	11,06	0,99	9,13	12,99	8,91
Lampung	22,43	0,94	20,58	24,28	4,21
Kep. Bangka Belitung	27,83	1,48	24,93	30,73	5,32
Kepulauan Riau	16,77	1,91	13,04	20,50	11,36
DKI Jakarta	20,49	1,27	18,00	22,98	6,20
Jawa Barat	22,28	0,65	21,01	23,54	2,90
Jawa Tengah	20,31	0,55	19,22	21,39	2,72
DI Yogyakarta	32,15	1,27	29,66	34,65	3,96
Jawa Timur	19,88	0,60	18,71	21,04	3,00
Banten	24,68	1,19	22,34	27,02	4,84
Bali	37,23	1,69	33,93	40,54	4,53
Nusa Tenggara Barat	23,24	1,35	20,59	25,88	5,81
Nusa Tenggara Timur	58,30	1,39	55,57	61,03	2,39
Kalimantan Barat	15,33	0,90	13,56	17,10	5,88
Kalimantan Tengah	11,96	0,84	10,30	13,61	7,06
Kalimantan Selatan	16,13	1,06	14,05	18,20	6,56
Kalimantan Timur	21,23	1,20	18,88	23,58	5,66
Sulawesi Utara	19,95	1,24	17,53	22,38	6,20
Sulawesi Tengah	15,66	1,01	13,67	17,65	6,47
Sulawesi Selatan	20,47	0,88	18,74	22,20	4,32
Sulawesi Tenggara	12,93	1,09	10,79	15,07	8,45
Gorontalo	11,50	1,09	9,37	13,63	9,45
Sulawesi Barat	9,09	1,15	6,83	11,35	12,68
Maluku	27,23	1,52	24,25	30,21	5,58
Maluku Utara	25,17	1,62	22,00	28,35	6,44
Papua Barat	15,28	1,28	12,78	17,78	8,35
Papua	18,75	1,16	16,48	21,02	6,17
Indonesia	21,23	0,22	20,80	21,66	1,04

Tabel 2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tanaman Keras/Tahunan yang langsung Ditanam di Tanah Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,83	1,31	52,25	57,40	2,39
Sumatera Utara	37,72	1,23	35,31	40,13	3,25
Sumatera Barat	48,59	1,25	46,15	51,04	2,57
Riau	56,76	1,58	53,67	59,85	2,78
Jambi	48,26	1,51	45,30	51,22	3,13
Sumatera Selatan	42,14	1,38	39,44	44,84	3,27
Bengkulu	54,34	1,78	50,86	57,82	3,27
Lampung	60,58	2,15	56,37	64,80	3,55
Kep. Bangka Belitung	55,68	2,10	51,56	59,80	3,77
Kepulauan Riau	33,46	1,89	29,75	37,17	5,65
DKI Jakarta	13,54	1,26	11,07	16,02	9,33
Jawa Barat	35,00	0,82	33,40	36,60	2,34
Jawa Tengah	55,91	0,79	54,37	57,45	1,41
DI Yogyakarta	59,54	2,45	54,73	64,34	4,11
Jawa Timur	53,51	0,93	51,68	55,33	1,74
Banten	30,92	1,56	27,86	33,98	5,05
Bali	54,87	2,08	50,79	58,95	3,79
Nusa Tenggara Barat	46,87	1,49	43,94	49,79	3,18
Nusa Tenggara Timur	64,98	1,34	62,35	67,61	2,06
Kalimantan Barat	52,98	1,45	50,14	55,82	2,73
Kalimantan Tengah	52,59	1,57	49,51	55,66	2,98
Kalimantan Selatan	47,41	1,45	44,57	50,25	3,06
Kalimantan Timur	35,75	1,42	32,97	38,53	3,97
Sulawesi Utara	50,37	1,74	46,96	53,77	3,45
Sulawesi Tengah	47,49	1,35	44,83	50,14	2,85
Sulawesi Selatan	51,83	1,38	49,13	54,54	2,66
Sulawesi Tenggara	53,03	1,80	49,51	56,55	3,39
Gorontalo	46,45	2,02	42,50	50,41	4,34
Sulawesi Barat	46,76	1,78	43,28	50,24	3,80
Maluku	42,73	1,48	39,82	45,64	3,47
Maluku Utara	39,92	1,71	36,57	43,27	4,28
Papua Barat	49,97	1,98	46,08	53,86	3,97
Papua	43,89	1,66	40,63	47,15	3,79
Indonesia	45,98	0,33	45,33	46,64	0,73

Tabel 3 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Taman/Tanah Berumput Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	43,01	1,54	39,99	46,04	3,59
Sumatera Utara	25,38	0,83	23,75	27,01	3,28
Sumatera Barat	41,43	1,24	39,01	43,86	2,99
Riau	44,79	1,38	42,09	47,49	3,08
Jambi	40,05	1,58	36,96	43,14	3,94
Sumatera Selatan	28,58	1,41	25,82	31,34	4,92
Bengkulu	46,71	1,66	43,47	49,96	3,54
Lampung	39,85	1,40	37,11	42,60	3,51
Kep. Bangka Belitung	38,18	2,03	34,20	42,15	5,31
Kepulauan Riau	25,45	1,94	21,65	29,25	7,62
DKI Jakarta	10,05	1,09	7,90	12,19	10,89
Jawa Barat	21,53	0,66	20,23	22,82	3,07
Jawa Tengah	24,51	0,76	23,02	25,99	3,09
DI Yogyakarta	16,68	1,59	13,57	19,80	9,51
Jawa Timur	17,78	0,58	16,65	18,92	3,25
Banten	15,93	0,98	14,00	17,85	6,16
Bali	31,02	1,64	27,80	34,24	5,30
Nusa Tenggara Barat	48,23	1,51	45,27	51,18	3,12
Nusa Tenggara Timur	21,67	1,08	19,54	23,79	5,01
Kalimantan Barat	52,54	1,64	49,33	55,76	3,12
Kalimantan Tengah	44,36	1,47	41,47	47,24	3,32
Kalimantan Selatan	25,16	1,29	22,64	27,68	5,11
Kalimantan Timur	31,56	1,35	28,92	34,20	4,27
Sulawesi Utara	32,19	1,39	29,47	34,91	4,31
Sulawesi Tengah	41,88	1,55	38,84	44,91	3,70
Sulawesi Selatan	29,31	1,13	27,10	31,52	3,85
Sulawesi Tenggara	40,43	1,56	37,37	43,50	3,86
Gorontalo	45,63	2,38	40,98	50,29	5,20
Sulawesi Barat	33,96	1,96	30,12	37,80	5,77
Maluku	28,96	1,71	25,61	32,31	5,90
Maluku Utara	31,02	1,55	27,98	34,06	5,00
Papua Barat	51,66	2,12	47,50	55,82	4,11
Papua	46,77	1,68	43,48	50,05	3,58
Indonesia	25,47	0,25	25,81	26,80	0,96

Tabel 4 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Penerangan di Siang Hari Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,34	0,39	95,58	97,10	0,40
Sumatera Utara	93,46	0,45	92,57	94,34	0,48
Sumatera Barat	96,21	0,51	95,20	97,22	0,54
Riau	96,69	0,41	95,88	97,49	0,43
Jambi	95,73	0,51	94,73	96,74	0,53
Sumatera Selatan	95,86	0,44	94,99	96,72	0,46
Bengkulu	97,42	0,58	96,29	98,54	0,59
Lampung	96,26	0,45	95,37	97,15	0,47
Kep. Bangka Belitung	95,83	0,68	94,50	97,17	0,71
Kepulauan Riau	90,99	1,45	88,16	93,82	1,59
DKI Jakarta	82,76	1,48	79,85	85,66	1,79
Jawa Barat	94,03	0,33	93,37	94,68	0,36
Jawa Tengah	96,85	0,23	96,40	97,30	0,24
DI Yogyakarta	96,80	0,59	95,64	97,96	0,61
Jawa Timur	94,44	0,34	93,77	95,11	0,36
Banten	92,39	0,70	91,02	93,77	0,76
Bali	91,67	0,99	89,74	93,61	1,08
Nusa Tenggara Barat	96,36	0,51	95,36	97,36	0,53
Nusa Tenggara Timur	96,06	0,41	95,27	96,86	0,42
Kalimantan Barat	96,95	0,41	96,14	97,76	0,43
Kalimantan Tengah	97,94	0,35	97,24	98,63	0,36
Kalimantan Selatan	97,59	0,36	96,89	98,29	0,37
Kalimantan Timur	93,50	0,76	92,01	95,00	0,81
Sulawesi Utara	97,67	0,47	96,76	98,59	0,48
Sulawesi Tengah	94,76	0,62	93,55	95,98	0,65
Sulawesi Selatan	95,54	0,39	94,78	96,30	0,41
Sulawesi Tenggara	96,66	0,47	95,73	97,59	0,49
Gorontalo	98,93	0,36	98,23	99,64	0,36
Sulawesi Barat	94,44	0,88	92,72	96,17	0,93
Maluku	91,76	0,96	89,88	93,64	1,04
Maluku Utara	95,45	0,65	94,18	96,72	0,68
Papua Barat	93,81	0,84	92,17	95,45	0,89
Papua	82,49	1,59	79,38	85,61	1,93
Indonesia	94,45	0,13	94,20	94,71	0,14

Tabel 5 Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Alternatif Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,55	0,32	1,93	3,17	12,37
Sumatera Utara	3,10	0,34	2,45	3,76	10,81
Sumatera Barat	3,14	0,40	2,35	3,93	12,85
Riau	4,86	0,51	3,86	5,86	10,51
Jambi	2,13	0,37	1,40	2,86	17,42
Sumatera Selatan	4,74	0,52	3,73	5,75	10,87
Bengkulu	3,62	0,60	2,44	4,81	16,69
Lampung	3,55	0,40	2,77	4,34	11,21
Kep. Bangka Belitung	2,07	0,46	1,16	2,97	22,33
Kepulauan Riau	6,40	0,98	4,49	8,31	15,24
DKI Jakarta	8,14	0,88	6,42	9,85	10,78
Jawa Barat	2,97	0,23	2,51	3,43	7,89
Jawa Tengah	2,63	0,21	2,22	3,04	7,99
DI Yogyakarta	1,88	0,44	1,02	2,75	23,49
Jawa Timur	2,74	0,22	2,31	3,17	7,99
Banten	5,06	0,53	4,02	6,10	10,45
Bali	1,54	0,35	0,87	2,22	22,44
Nusa Tenggara Barat	4,49	0,57	3,38	5,60	12,65
Nusa Tenggara Timur	11,52	0,75	10,04	13,00	6,55
Kalimantan Barat	4,76	0,49	3,80	5,72	10,32
Kalimantan Tengah	5,86	0,62	4,64	7,08	10,64
Kalimantan Selatan	3,87	0,47	2,95	4,78	12,07
Kalimantan Timur	4,61	0,61	3,41	5,80	13,23
Sulawesi Utara	4,61	0,53	3,56	5,66	11,58
Sulawesi Tengah	4,83	0,61	3,64	6,02	12,57
Sulawesi Selatan	4,55	0,37	3,82	5,29	8,24
Sulawesi Tenggara	6,40	0,70	5,03	7,78	10,94
Gorontalo	7,48	0,80	5,90	9,05	10,76
Sulawesi Barat	8,99	1,94	5,19	12,78	21,56
Maluku	3,53	0,57	2,40	4,65	16,28
Maluku Utara	7,32	0,77	5,82	8,83	10,51
Papua Barat	2,71	0,58	1,58	3,85	21,26
Papua	7,36	0,67	6,05	8,67	9,08
Indonesia	3,77	0,09	3,59	3,95	2,41

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Lampu Hemat Energi Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,37	0,70	90,99	93,75	0,76
Sumatera Utara	88,20	0,87	86,50	89,90	0,98
Sumatera Barat	88,48	0,65	87,19	89,76	0,74
Riau	94,38	0,65	93,11	95,65	0,69
Jambi	89,21	1,13	87,00	91,42	1,26
Sumatera Selatan	87,93	0,91	86,15	89,70	1,03
Bengkulu	89,44	0,96	87,56	91,32	1,07
Lampung	88,94	0,76	87,45	90,43	0,85
Kep. Bangka Belitung	89,43	1,06	87,34	91,51	1,19
Kepulauan Riau	92,57	1,52	89,59	95,55	1,64
DKI Jakarta	82,65	0,80	81,08	84,22	0,97
Jawa Barat	77,21	0,78	75,68	78,74	1,01
Jawa Tengah	88,84	0,45	87,95	89,73	0,51
DI Yogyakarta	92,67	1,02	90,67	94,67	1,10
Jawa Timur	87,43	0,47	86,50	88,35	0,54
Banten	83,82	0,96	81,94	85,69	1,14
Bali	90,05	0,79	88,50	91,61	0,88
Nusa Tenggara Barat	89,01	0,87	87,30	90,72	0,98
Nusa Tenggara Timur	87,46	0,71	86,08	88,85	0,81
Kalimantan Barat	91,87	0,82	90,26	93,48	0,89
Kalimantan Tengah	92,29	0,81	90,71	93,87	0,87
Kalimantan Selatan	93,14	0,75	91,67	94,61	0,80
Kalimantan Timur	86,80	1,06	84,73	88,87	1,22
Sulawesi Utara	87,25	0,94	85,41	89,09	1,08
Sulawesi Tengah	92,23	0,83	90,60	93,86	0,90
Sulawesi Selatan	91,07	0,55	89,99	92,15	0,61
Sulawesi Tenggara	92,35	0,81	90,77	93,94	0,88
Gorontalo	92,23	0,84	90,57	93,89	0,92
Sulawesi Barat	84,10	1,86	80,45	87,76	2,22
Maluku	82,61	1,50	79,68	85,55	1,81
Maluku Utara	87,19	1,51	84,23	90,15	1,73
Papua Barat	95,59	0,68	94,25	96,92	0,71
Papua	80,55	1,98	76,68	84,43	2,46
Indonesia	86,26	0,22	85,82	86,69	0,26

Tabel 7 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Sepeda Motor Secara Berbocengan Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,15	1,29	55,61	60,68	2,23
Sumatera Utara	48,88	1,19	46,55	51,21	2,43
Sumatera Barat	48,15	1,48	45,25	51,05	3,08
Riau	53,81	1,55	50,77	56,85	2,88
Jambi	57,90	1,41	55,14	60,67	2,44
Sumatera Selatan	53,35	1,53	50,36	56,35	2,86
Bengkulu	48,49	1,70	45,17	51,82	3,50
Lampung	57,30	1,24	54,87	59,73	2,17
Kep. Bangka Belitung	42,59	1,73	39,21	45,98	4,06
Kepulauan Riau	37,62	3,25	31,25	43,99	8,64
DKI Jakarta	40,51	1,63	37,31	43,71	4,03
Jawa Barat	41,62	0,93	39,81	43,44	2,23
Jawa Tengah	45,06	0,74	43,61	46,52	1,65
DI Yogyakarta	40,36	2,07	36,30	44,42	5,13
Jawa Timur	49,30	0,78	47,78	50,83	1,58
Banten	44,96	1,56	41,90	48,03	3,48
Bali	33,92	1,46	31,06	36,78	4,30
Nusa Tenggara Barat	43,15	2,05	39,14	47,16	4,74
Nusa Tenggara Timur	59,77	1,76	56,32	63,22	2,94
Kalimantan Barat	50,88	1,40	48,13	53,63	2,76
Kalimantan Tengah	55,29	1,55	52,25	58,32	2,80
Kalimantan Selatan	48,47	1,47	45,60	51,35	3,02
Kalimantan Timur	46,29	1,59	43,17	49,42	3,44
Sulawesi Utara	58,61	2,13	54,43	62,80	3,64
Sulawesi Tengah	56,05	1,87	52,39	59,71	3,33
Sulawesi Selatan	53,67	1,19	51,34	55,99	2,21
Sulawesi Tenggara	59,87	1,68	56,57	63,18	2,81
Gorontalo	56,39	2,59	51,32	61,45	4,58
Sulawesi Barat	44,35	2,40	39,64	49,05	5,41
Maluku	62,96	2,57	57,91	68,00	4,09
Maluku Utara	63,48	2,81	57,97	68,99	4,43
Papua Barat	59,02	2,69	53,76	64,29	4,55
Papua	59,87	1,95	56,05	63,69	3,25
Indonesia	47,47	0,30	46,87	48,06	0,64

Tabel 8 Persentase Rumah Tangga dengan Cara Penggunaan Mobil Secara Bersama Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,92	3,53	55,99	69,85	5,62
Sumatera Utara	71,57	2,88	65,92	77,22	4,03
Sumatera Barat	65,49	3,37	58,89	72,09	5,14
Riau	70,71	3,50	63,85	77,57	4,95
Jambi	71,13	4,06	63,18	79,09	5,70
Sumatera Selatan	65,82	4,04	57,89	73,75	6,14
Bengkulu	65,70	4,93	56,03	75,36	7,50
Lampung	74,68	3,41	67,98	81,37	4,57
Kep. Bangka Belitung	65,97	4,24	57,66	74,29	6,43
Kepulauan Riau	63,77	5,25	53,48	74,05	8,23
DKI Jakarta	61,82	3,75	54,47	69,17	6,07
Jawa Barat	66,59	2,37	61,95	71,24	3,56
Jawa Tengah	73,26	2,14	69,06	77,46	2,93
DI Yogyakarta	80,34	4,85	70,84	89,85	6,04
Jawa Timur	74,99	2,06	70,96	79,03	2,74
Banten	66,17	3,64	59,02	73,31	5,51
Bali	71,80	3,00	65,91	77,69	4,18
Nusa Tenggara Barat	71,05	5,72	59,84	82,26	8,05
Nusa Tenggara Timur	79,53	4,19	71,32	87,75	5,27
Kalimantan Barat	63,25	5,18	53,09	73,42	8,20
Kalimantan Tengah	59,80	4,98	50,04	69,56	8,32
Kalimantan Selatan	70,86	4,17	62,68	79,04	5,89
Kalimantan Timur	73,99	3,66	66,81	81,16	4,95
Sulawesi Utara	63,30	4,61	54,26	72,34	7,28
Sulawesi Tengah	67,70	5,56	56,81	78,60	8,21
Sulawesi Selatan	74,89	2,33	70,32	79,45	3,11
Sulawesi Tenggara	61,72	5,51	50,92	72,51	8,92
Gorontalo	73,18	6,99	59,47	86,89	9,55
Sulawesi Barat	72,43	7,53	57,65	87,20	10,40
Maluku	59,17	8,58	42,35	75,99	14,50
Maluku Utara	62,58	9,42	44,11	81,05	15,05
Papua Barat	74,08	8,20	57,99	90,16	11,08
Papua	55,58	6,28	43,28	67,88	11,29
Indonesia	69,57	0,78	68,03	71,10	1,13

Tabel 9 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Perawatan Mesin Secara Rutin Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	63,61	1,34	60,99	66,24	2,11
Sumatera Utara	67,20	1,23	64,80	69,61	1,83
Sumatera Barat	62,82	1,52	59,84	65,80	2,42
Riau	70,98	1,54	67,96	74,00	2,17
Jambi	62,89	1,49	59,97	65,82	2,37
Sumatera Selatan	59,54	1,37	56,86	62,21	2,29
Bengkulu	53,82	1,91	50,07	57,57	3,55
Lampung	61,01	1,54	57,99	64,03	2,53
Kep. Bangka Belitung	69,12	1,53	66,12	72,13	2,22
Kepulauan Riau	78,49	2,10	74,37	82,62	2,68
DKI Jakarta	83,32	1,35	80,66	85,97	1,62
Jawa Barat	76,54	0,80	74,98	78,11	1,04
Jawa Tengah	70,08	0,75	68,61	71,56	1,07
DI Yogyakarta	68,67	1,93	64,89	72,44	2,80
Jawa Timur	67,00	0,77	65,49	68,51	1,15
Banten	72,86	1,48	69,97	75,76	2,03
Bali	76,49	1,33	73,88	79,09	1,74
Nusa Tenggara Barat	70,80	2,06	66,75	74,84	2,91
Nusa Tenggara Timur	63,95	1,91	60,21	67,69	2,99
Kalimantan Barat	71,56	1,39	68,84	74,28	1,94
Kalimantan Tengah	70,54	1,51	67,58	73,51	2,15
Kalimantan Selatan	60,36	1,56	57,29	63,42	2,59
Kalimantan Timur	72,49	1,33	69,88	75,10	1,83
Sulawesi Utara	73,06	1,77	69,59	76,53	2,42
Sulawesi Tengah	61,27	1,86	57,62	64,92	3,04
Sulawesi Selatan	62,18	1,51	59,22	65,14	2,43
Sulawesi Tenggara	61,04	1,80	57,50	64,58	2,96
Gorontalo	56,13	2,84	50,57	61,69	5,05
Sulawesi Barat	55,75	2,44	50,97	60,52	4,37
Maluku	51,17	2,60	46,08	56,26	5,07
Maluku Utara	42,62	3,04	36,66	48,58	7,14
Papua Barat	54,66	2,27	50,22	59,10	4,14
Papua	77,32	2,06	73,29	81,35	2,66
Indonesia	69,51	0,29	68,93	70,08	0,42

Tabel 10 Persentase Rumah Tangga yang Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,63	0,90	11,86	15,40	6,62
Sumatera Utara	11,98	0,71	10,59	13,38	5,94
Sumatera Barat	11,33	0,82	9,72	12,93	7,24
Riau	13,84	1,02	11,84	15,84	7,38
Jambi	8,97	0,89	7,23	10,70	9,88
Sumatera Selatan	9,33	0,71	7,95	10,72	7,56
Bengkulu	12,37	1,12	10,18	14,56	9,05
Lampung	8,36	0,71	6,96	9,76	8,54
Kep. Bangka Belitung	9,11	0,93	7,28	10,94	10,23
Kepulauan Riau	8,43	1,60	5,30	11,56	18,93
DKI Jakarta	10,05	1,10	7,89	12,20	10,92
Jawa Barat	14,80	0,72	13,39	16,20	4,84
Jawa Tengah	15,15	0,55	14,08	16,22	3,61
DI Yogyakarta	11,99	1,22	9,60	14,38	10,18
Jawa Timur	13,19	0,51	12,19	14,19	3,87
Banten	11,93	1,02	9,94	13,92	8,52
Bali	9,81	0,93	7,98	11,64	9,51
Nusa Tenggara Barat	15,43	1,64	12,21	18,65	10,63
Nusa Tenggara Timur	20,71	1,45	17,87	23,55	7,00
Kalimantan Barat	8,91	0,82	7,31	10,52	9,19
Kalimantan Tengah	12,74	0,97	10,83	14,64	7,63
Kalimantan Selatan	11,74	1,00	9,78	13,71	8,54
Kalimantan Timur	9,62	0,78	8,08	11,16	8,15
Sulawesi Utara	18,85	1,68	15,55	22,15	8,93
Sulawesi Tengah	12,96	1,11	10,79	15,13	8,55
Sulawesi Selatan	16,30	0,95	14,44	18,17	5,83
Sulawesi Tenggara	15,20	1,18	12,88	17,51	7,77
Gorontalo	19,92	2,11	15,78	24,06	10,60
Sulawesi Barat	13,37	1,44	10,56	16,19	10,74
Maluku	14,03	1,76	10,58	17,49	12,55
Maluku Utara	6,95	1,25	4,50	9,41	18,01
Papua Barat	14,08	1,62	10,90	17,25	11,52
Papua	9,39	1,32	6,80	11,98	14,07
Indonesia	12,98	0,20	12,58	13,37	1,57

Tabel 11 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	17,23	0,92	15,43	19,03	5,33
Sumatera Utara	15,02	0,66	13,73	16,30	4,37
Sumatera Barat	13,05	0,83	11,43	14,67	6,33
Riau	16,04	0,96	14,15	17,93	6,01
Jambi	11,15	0,87	9,43	12,86	7,84
Sumatera Selatan	12,30	0,92	10,49	14,11	7,50
Bengkulu	10,76	0,95	8,91	12,62	8,79
Lampung	15,31	0,86	13,62	17,01	5,64
Kep. Bangka Belitung	13,58	1,15	11,33	15,84	8,47
Kepulauan Riau	15,77	1,70	12,43	19,11	10,80
DKI Jakarta	11,35	1,01	9,37	13,32	8,89
Jawa Barat	22,64	0,69	21,27	24,00	3,07
Jawa Tengah	22,04	0,68	20,70	23,38	3,10
DI Yogyakarta	27,60	1,70	24,26	30,93	6,16
Jawa Timur	15,49	0,53	14,44	16,54	3,45
Banten	17,31	0,78	15,77	18,85	4,53
Bali	25,67	1,40	22,92	28,42	5,47
Nusa Tenggara Barat	11,71	0,87	10,00	13,41	7,43
Nusa Tenggara Timur	27,82	1,47	24,95	30,70	5,27
Kalimantan Barat	15,02	0,89	13,28	16,77	5,91
Kalimantan Tengah	24,13	1,19	21,79	26,46	4,94
Kalimantan Selatan	16,67	0,93	14,84	18,50	5,59
Kalimantan Timur	19,57	1,34	16,93	22,20	6,87
Sulawesi Utara	28,49	1,55	25,45	31,53	5,44
Sulawesi Tengah	20,12	1,14	17,88	22,36	5,68
Sulawesi Selatan	31,89	1,17	29,58	34,19	3,68
Sulawesi Tenggara	22,25	1,47	19,37	25,12	6,60
Gorontalo	14,38	1,40	11,64	17,12	9,72
Sulawesi Barat	14,22	1,30	11,67	16,77	9,15
Maluku	14,66	1,27	12,17	17,16	8,68
Maluku Utara	8,18	0,92	6,37	9,99	11,28
Papua Barat	25,90	1,66	22,65	29,15	6,40
Papua	18,10	1,02	16,11	20,09	5,61
Indonesia	18,84	0,22	18,40	19,27	1,18

Tabel 12 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Gangguan/Pencemaran Lingkungan Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,96	0,71	9,57	12,35	6,47
Sumatera Utara	18,76	0,88	17,04	20,48	4,69
Sumatera Barat	35,11	2,08	31,04	39,18	5,91
Riau	68,11	1,74	64,69	71,53	2,56
Jambi	19,62	0,95	17,76	21,47	4,83
Sumatera Selatan	17,57	1,30	15,01	20,12	7,42
Bengkulu	7,34	0,80	5,77	8,92	10,94
Lampung	8,40	0,78	6,88	9,93	9,25
Kep. Bangka Belitung	5,46	0,66	4,17	6,76	12,13
Kepulauan Riau	11,98	1,39	9,26	14,70	11,58
DKI Jakarta	12,89	1,11	10,71	15,07	8,64
Jawa Barat	10,42	0,52	9,39	11,44	5,02
Jawa Tengah	12,67	0,56	11,57	13,76	4,40
DI Yogyakarta	73,97	2,82	68,44	79,49	3,81
Jawa Timur	10,69	0,53	9,64	11,74	5,00
Banten	13,41	1,24	10,98	15,83	9,23
Bali	8,67	0,85	7,01	10,33	9,76
Nusa Tenggara Barat	7,66	0,88	5,93	9,39	11,55
Nusa Tenggara Timur	11,77	0,73	10,34	13,20	6,20
Kalimantan Barat	24,92	1,21	22,55	27,29	4,84
Kalimantan Tengah	30,91	1,55	27,87	33,96	5,02
Kalimantan Selatan	17,04	1,08	14,92	19,15	6,34
Kalimantan Timur	18,02	1,30	15,47	20,56	7,20
Sulawesi Utara	9,40	0,86	7,71	11,09	9,19
Sulawesi Tengah	8,08	0,68	6,76	9,41	8,36
Sulawesi Selatan	7,71	0,53	6,66	8,76	6,94
Sulawesi Tenggara	14,26	1,02	12,27	16,26	7,13
Gorontalo	15,85	1,41	13,10	18,61	8,87
Sulawesi Barat	10,39	1,62	7,22	13,57	15,59
Maluku	14,87	0,88	13,14	16,60	5,93
Maluku Utara	8,71	1,08	6,59	10,83	12,43
Papua Barat	7,86	0,98	5,94	9,78	12,44
Papua	5,88	0,62	4,67	7,10	10,52
Indonesia	15,03	0,22	14,59	15,47	1,48

Tabel 13 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Bencana Alam dalam Setahun Terakhir Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,57	0,94	16,72	20,43	5,08
Sumatera Utara	12,06	0,76	10,56	13,56	6,34
Sumatera Barat	27,44	1,62	24,26	30,62	5,91
Riau	12,71	0,94	10,87	14,55	7,39
Jambi	10,39	0,82	8,79	12,00	7,89
Sumatera Selatan	7,91	0,66	6,61	9,21	8,38
Bengkulu	32,03	1,92	28,27	35,79	5,99
Lampung	2,25	0,33	1,61	2,89	14,46
Kep. Bangka Belitung	1,30	0,39	0,54	2,06	29,78
Kepulauan Riau	4,80	0,89	3,05	6,56	18,62
DKI Jakarta	22,87	2,85	17,28	28,46	12,47
Jawa Barat	10,51	0,52	9,50	11,53	4,92
Jawa Tengah	18,37	0,88	16,64	20,10	4,80
DI Yogyakarta	78,77	1,74	75,35	82,19	2,21
Jawa Timur	26,08	1,13	23,86	28,30	4,35
Banten	5,09	0,54	4,02	6,15	10,68
Bali	12,56	1,05	10,51	14,62	8,35
Nusa Tenggara Barat	9,35	0,99	7,40	11,29	10,60
Nusa Tenggara Timur	9,92	0,64	8,67	11,18	6,46
Kalimantan Barat	5,53	0,58	4,40	6,67	10,45
Kalimantan Tengah	12,72	1,26	10,25	15,19	9,89
Kalimantan Selatan	6,65	0,76	5,17	8,13	11,35
Kalimantan Timur	9,83	1,00	7,86	11,79	10,20
Sulawesi Utara	18,97	1,39	16,25	21,70	7,32
Sulawesi Tengah	36,69	1,60	33,55	39,82	4,36
Sulawesi Selatan	13,92	0,84	12,28	15,56	6,00
Sulawesi Tenggara	6,92	0,69	5,57	8,26	9,92
Gorontalo	38,27	2,00	34,35	42,19	5,23
Sulawesi Barat	17,40	1,82	13,83	20,98	10,47
Maluku	16,94	0,89	15,21	18,68	5,22
Maluku Utara	28,79	2,26	24,36	33,23	7,86
Papua Barat	10,46	1,26	7,99	12,92	12,02
Papua	14,06	1,14	11,81	16,30	8,14
Indonesia	16,46	0,31	15,85	17,07	1,88

Tabel 14 Persentase Rumah Tangga yang Desa Tempat Tinggalnya termasuk Desa Rawan Bencana Alam Menurut Provinsi

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24,64	1,10	22,48	26,80	4,48
Sumatera Utara	7,42	0,47	6,50	8,34	6,31
Sumatera Barat	25,33	1,40	22,59	28,07	5,51
Riau	10,32	0,81	8,73	11,91	7,86
Jambi	14,20	1,02	12,20	16,21	7,20
Sumatera Selatan	3,72	0,42	2,91	4,54	11,21
Bengkulu	29,04	1,80	25,50	32,58	6,22
Lampung	3,61	0,45	2,72	4,50	12,57
Kep. Bangka Belitung	4,82	0,82	3,21	6,42	16,98
Kepulauan Riau	3,26	0,68	1,93	4,59	20,79
DKI Jakarta	18,44	2,35	13,83	23,05	12,75
Jawa Barat	10,89	0,55	9,82	11,97	5,03
Jawa Tengah	9,99	0,46	9,09	10,89	4,59
DI Yogyakarta	27,60	3,17	21,39	33,81	11,47
Jawa Timur	6,98	0,37	6,26	7,71	5,29
Banten	5,85	0,53	4,82	6,88	8,99
Bali	9,59	0,69	8,24	10,94	7,19
Nusa Tenggara Barat	6,91	0,85	5,24	8,59	12,36
Nusa Tenggara Timur	17,43	1,22	15,04	19,83	7,02
Kalimantan Barat	10,21	1,18	7,90	12,53	11,56
Kalimantan Tengah	8,00	0,88	6,28	9,73	10,97
Kalimantan Selatan	8,92	0,96	7,04	10,80	10,77
Kalimantan Timur	15,19	0,98	13,28	17,10	6,43
Sulawesi Utara	22,29	1,31	19,72	24,85	5,87
Sulawesi Tengah	21,71	1,33	19,10	24,31	6,12
Sulawesi Selatan	15,36	0,78	13,84	16,88	5,05
Sulawesi Tenggara	5,65	0,67	4,34	6,97	11,85
Gorontalo	21,89	1,86	18,25	25,54	8,49
Sulawesi Barat	20,82	1,76	17,38	24,27	8,44
Maluku	19,55	1,82	15,97	23,12	9,32
Maluku Utara	21,24	1,42	18,45	24,03	6,69
Papua Barat	19,45	2,03	15,46	23,44	10,46
Papua	13,15	1,05	11,09	15,20	7,98
Indonesia	10,99	0,2	10,6	11,38	1,82



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

VSEN14.HANSOS



SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2014

MODUL KETAHANAN SOSIAL

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT (SALIN DARI VSEN14.K BLOK I)			
101	Provinsi	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
102	Kabupaten/Kota *)	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
103	Kecamatan	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
104	Desa/Kelurahan*)	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	: 1. Perkotaan 2. Perdesaan	<input type="checkbox"/>
106	Nomor Blok Sensus	:	
107	Nomor Kode Sampel (NKS)	:	<input type="checkbox"/>
108	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga	:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
109	Nama Kepala Rumah Tangga	:	
110	Status Pencacahan	: 1. Berhasil 2. Menolak 3. Responden tidak dapat diwawancara 4. Rumah tangga tidak dapat ditemukan	} STOP <input type="checkbox"/>
II. KETERANGAN RESPONDEN (RESPONDEN ADALAH KRT ATAU PASANGANNYA)			
No.	Uraian	Responden	
201	Nama (SALIN DARI VSEN14.K BLOK IV.A KOLOM 2)		
202	No. Urut ART (SALIN DARI VSEN14.K BLOK IVA KOLOM 1)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
III. KETERANGAN PETUGAS			
Uraian		Pencacah	Pengawas
301	Nama		
302	Jabatan	1. Staf BPS Provinsi 2. Staf BPS Kab/Kota	3. KSK 4. Mitra <input type="checkbox"/>
303	Tanggal Pencacahan/ Pengawasan	Tanggal <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tanggal <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
304	Tanda Tangan		

*) Coret yang tidak sesuai

PERHATIAN:
"KALIMAT DENGAN HURUF KAPITAL, JANGAN DIBACAKAN"

IV. PENGELOLAAN AIR

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
401	Apakah di rumah Anda ada fasilitas air (seperti: sumur, leding, dll) untuk minum/memasak/mandi/cuci?	1. Ada → P.403 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
402	a. Berapa jarak ke fasilitas/sumber air yang terdekat ? km	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
	b. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh air dengan berjalan kaki (pergi dan pulang)? menit → P.405	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
403	a. Apakah instalasi air di rumah Anda menggunakan pipa/selang untuk mengalirkan air?	1. Ya 2. Tidak → P.405	<input type="checkbox"/>
	b. Seberapa sering dalam sebulan terakhir rumah tangga Anda membiarkan air mengalir tanpa digunakan?	1. Tidak pernah 2. Kadang-kadang 3. Sering	<input type="checkbox"/>
404	a. Bagaimana penggunaan air untuk mencuci alat makan/minum, apakah menggunakan air mengalir atau air ditampung?	1. AIR MENGALIR 2. AIR DITAMPUNG	<input type="checkbox"/>
	b. Bagaimana penggunaan air untuk mencuci sayuran dan buah, apakah menggunakan air mengalir atau ditampung?	1. AIR MENGALIR 2. AIR DITAMPUNG	<input type="checkbox"/>
405	a. Apakah rumah tangga ini menggunakan mesin cuci untuk membilas pakaian?	1. Ya → P.405.b 2. Tidak → P.405.c 3. Tidak mencuci pakaian di rumah (di sungai, laundry) → P.406	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah jenis mesin cuci yang digunakan rumah tangga ini ?	1. Mesin cuci satu tabung bukaan depan 2. Mesin cuci satu/dua tabung bukaan atas } → P.406	<input type="checkbox"/>
	c. JIKA P.405 a = 2, bagaimana penggunaan air untuk membilas cucian pakaian?	1. Air ditampung ≤ 2 kali bilas 2. Air ditampung > 2 kali bilas 3. Air mengalir	<input type="checkbox"/>
406	Dalam seminggu terakhir, seberapa sering memanfaatkan air bekas (cucian sayur/buah/beras, wudhu, dll) ?	1. Tidak Pernah 2. Kadang-kadang 3. Sering	<input type="checkbox"/>
407	a. Apakah rumah tangga ini mempunyai tanaman di rumah (termasuk di pekarangan/halaman rumah)?	1. Ada 2. Tidak → P.408	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah di antara tanaman tersebut, ada tanaman keras/tahanan yang langsung ditanam di tanah (bukan di pot/drum), seperti pohon mangga, jambu, ketapang, cemara, dll?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
408	a. Apakah Anda mengetahui/mendengar tentang sumur resapan (bukan tangki septik)?	1. Ya 2. Tidak → P.409	<input type="checkbox"/>
	b. Sebutkan manfaat sumur resapan :	1. MERESAPKAN AIR HUJAN KE TANAH 2. CADANGAN AIR TANAH 3. MENEGAH BANJIR 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
	c. Apakah di rumah Anda mempunyai sumur resapan?	1. Ya 2. Tidak 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
409	a. Apakah Anda mengetahui/mendengar tentang lubang resapan biopori?	1. Ya 2. Tidak → P.410	<input type="checkbox"/>
	b. Sebutkan manfaat lubang resapan biopori :	1. MERESAPKAN AIR HUJAN KE TANAH 2. CADANGAN AIR TANAH 3. MENCEGAH BANJIR 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
	c. Apakah di rumah Anda mempunyai lubang resapan biopori?	1. Ya 2. Tidak 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
410	Apakah terdapat taman/tanah berumput di pekarangan rumah Anda?	1. Ada 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
V. PENGELOLAAN ENERGI			
501	Pada siang hari, apakah rumah ini memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk penerangan ruangan?	1. Ya, sebagian besar ruangan 2. Ya, sebagian kecil ruangan 3. Tidak	<input type="checkbox"/>
502	Apakah rumah tangga Anda memanfaatkan energi alternatif (seperti biogas, tenaga surya, angin) untuk penerangan/memasak/pemanas air, dll?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
503	a. Apakah rumah Anda menggunakan listrik sebagai sumber penerangan?	1. Ya 2. Tidak → P.601	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah menggunakan lampu hemat energi (bukan bohlam/ lampu pijar)?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
504	a. Berapa jumlah TV yang dimiliki/dikuasai rumah tangga Anda? unit	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA MEMILIKI TV (P.504.a ≠ 0), apakah sering membiarkan TV tetap menyala meskipun tidak ditonton?	1. Tidak pernah 2. Ya, kadang-kadang 3. Ya, sering	<input type="checkbox"/>
505	a. Berapa jumlah AC yang dimiliki/dikuasai rumah tangga ? unit	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA MEMILIKI AC (P.505.a ≠ 0), apakah menyalaikan AC pada suhu di bawah 24°C selama sebulan terakhir ?	1. Tidak pernah 2. Ya, kadang-kadang 3. Ya, sering	<input type="checkbox"/>
VI. PENGGUNAAN TRANSPORTASI			
601	KEGIATAN UTAMA RESPONDEN SELAMA SEMINGGU YANG LALU? (LIHAT DARI VSEN14.K BLOK VD P.24.b dan P.25)	1. BEKERJA/SEMENTARA TIDAK BEKERJA 2. SEKOLAH 3. MENGURUS RUMAH TANGGA 4. LAINNYA 8. TIDAK ADA KEGIATAN → P.603	<input type="checkbox"/>
602	Apakah sarana angkutan utama yang biasa Anda gunakan menuju ke tempat kegiatan tersebut?	0.Tanpa kendaraan 1.Sepeda 2.Becak/dokar 3.Sepeda motor 4.Mobil 5.Kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu (seperti: angkot, bus, dll) 6.Kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu (seperti: ojek, taksi, omprengan, dll) 7.Kereta api 8.Lainnya (tuliskan)	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
603	a. Berapa unit sepeda motor yang dikuasai/digunakan rumah tangga selama sebulan terakhir ? unit	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA MENGUASAI/MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR (P.603.a ≠ 0), 1. Apa jenis bahan bakar utama yang digunakan ?	1. Premium 2. Pertamax 3. Bahan bakar nabati (biofuel)	<input type="checkbox"/>
	2. Apakah sepeda motor lebih sering digunakan sendiri atau berboncengan selama sebulan terakhir?	1. Sendiri 2. Berboncengan	<input type="checkbox"/>
604	a. Berapa unit perahu motor yang dikuasai/digunakan rumah tangga selama sebulan terakhir? unit	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA MENGUASAI/MENGGUNAKAN PERAHU MOTOR (P.604.a ≠ 0), Apa jenis bahan bakar utama yang digunakan	1. Solar 2. Premium 3. Lainnya.....(tuliskan)	<input type="checkbox"/>
605	a. Berapa unit mobil yang dikuasai/digunakan rumah tangga selama sebulan terakhir ? unit	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA MENGUASAI/MENGGUNAKAN MOBIL (P.605.a ≠ 0), 1. Apa jenis bahan bakar utama yang digunakan?	1. Solar 2. Premium 3. Pertamax 4. Bahan bakar nabati (biofuel) 5. Lainnya.....(tuliskan)	<input type="checkbox"/>
	2. Apakah mobil lebih sering digunakan sendiri atau bersama selama sebulan terakhir?	1. Sendiri 2. Bersama	<input type="checkbox"/>
JIKA MENGUASAI/MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR [P.603.a ≠ 0 atau P.604.a ≠ 0 atau P.605.a ≠ 0]			
606	a. Apakah melakukan perawatan mesin secara rutin selama setahun terakhir?	1. Ya 2. Tidak 3. Belum waktunya service 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah melakukan pemeriksaan tekanan ban selama sebulan terakhir? (selain perahu motor)	1. Ya 2. Tidak 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
607	a. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga Anda mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan rumah tangga?	1. Ya 2. Tidak → P.701	<input type="checkbox"/>
	b. JIKA (P.607.a=1), apa upaya yang dilakukan?		
	1. Menggunakan kendaraan umum bermotor dengan rute tertentu (seperti: angkot, bus, kereta, dll)	1.Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>
	2.Menggunakan kendaraan umum bermotor tanpa rute tertentu (seperti: ojek, taksi, omprengan, dll)	1.Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>
	3.Jalan kaki/menggunakan sepeda	1.Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>
	4. Menggunakan kendaraan secara bersama (carpooling)	1.Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>
	5. Lainnya.....(tuliskan)	1.Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
607	c. Apa alasan utama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan rumah tangga : (PILIHAN JAWABAN JANGAN DIBACAKAN)	1. PENGHEMATAN BIAYA 2. PEDULI LINGKUNGAN 3. AKTIVITAS BERKURANG 4. KESEHATAN 5. JARAK TEMPUH KE TEMPAT AKTIVITAS SEMAKIN DEKAT 6. SEMAKIN MUDAH MENGAKSES KENDARAAN UMUM 7. MENGHINDARI KEMACETAN 8. LAINNYA.....(SEBUTKAN)	<input type="checkbox"/>
	d. JIKA TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN UMUM BERMOTOR (P.607.b.1 = 2 ATAU P.607b.2 = 2), apa alasan tidak menggunakan kendaraan umum: 1. Tidak aman	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	2. Tidak nyaman	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	3. Membutuhkan waktu lebih lama	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	4. Ongkos lebih mahal	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	5. Lainnya.....(tuliskan)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

VII. PENGELOLAAN SAMPAH

701	a. Bagaimana perlakuan terhadap sampah/barang bekas yang biasa dilakukan oleh rumah tangga Anda? 1. Didaur ulang	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	2. Dibuat kompos/pupuk	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	3. Dijadikan makanan hewan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	4. Diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	5. Dijual/diberikan kepada orang lain	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	6. Ditimbun/dikubur	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	7. Dibakar	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	8. Dibuang ke laut/sungai/got	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	9. Dibuang sembarangan (tanah lapang, kebun, dll)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap sampah : (ISIKAN KODE 1-9 SESUAI DENGAN P.701.a YANG BERKODE 1)		<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
702	<p>a. Apakah rumah tangga Anda melakukan pemilahan sampah mudah membusuk /organik dan tidak mudah membusuk /anorganik?</p> <p>(PILIHAN JAWABAN JANGAN DIBACAKAN)</p>	<p>1. Ya, dipilah dan sebagian dimanfaatkan 2. Ya, dipilah kemudian dibuang 3. Tidak dipilah</p> <p style="text-align: right;">} → P.703</p>	<input type="checkbox"/>
		<p>1. MALAS/TIDAK ADA WAKTU 2. TIDAK ADA GUNANYA/TIDAK PERLU 3. TIDAK ADA FASILITAS 4. TIDAK ADA PERATURAN 5. TIDAK MENGETAHUI SAMPAH HARUS DIPILAH</p>	<input type="checkbox"/>
703	Bagaimana perlakuan barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu bekas, perkakas, dll) yang paling sering dilakukan di rumah tangga Anda?	<p>1. Dimanfaatkan untuk keperluan lain 2. Diberikan kepada orang lain 3. Dijual 4. Dibuang</p>	<input type="checkbox"/>
VIII. PEDULI LINGKUNGAN SEKITAR			
801	Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga Anda merasa terganggu dengan kondisi/kualitas lingkungan (air, udara, tanah):		
	a. Air	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
	b. Udara	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
	c. Tanah	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
802	JIKA MENGALAMI GANGGUAN (P.801 ADA YANG BERKODE 1), apakah rumah tangga Anda melakukan hal-hal sebagai berikut?		
	a. Melaporkan/mengadukan kepada aparat	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
	b. Menegur pelaku gangguan lingkungan	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
	c. Ikut menangani gangguan lingkungan	<p>1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>

IX. MITIGASI BENCANA ALAM			
NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
901	a. Apakah Anda pernah mengalami bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tsunami, puting beliung) dalam setahun terakhir ?	1. Ya 2. Tidak → P.902	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah ada rasa trauma akibat bencana alam tersebut?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
902	a. Apakah desa tempat tinggal Anda, termasuk desa yang rawan mengalami bencana alam?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Bencana alam apa saja yang pernah terjadi di desa ini? JIKA TIDAK ADA BENCANA ALAM, ISIKAN KODE "00"	1.(tuliskan) 2.(tuliskan) 3.(tuliskan)	Diisi oleh pengawas 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/>
	c. Dari berbagai bencana alam yang Anda sebutkan, bencana alam apa yang paling Anda khawatirkan terjadi di desa Anda? JIKA TIDAK ADA BENCANA ALAM, ISIKAN KODE "00"(tuliskan)	Diisi oleh pengawas <input type="checkbox"/>
	d. Apakah Anda tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana alam tersebut? JIKA P.902c = "00", ISIKAN KODE "9".	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
903	Apakah Anda mengetahui adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi kejadian darurat bencana alam di lingkungan tempat tinggal? (seperti area tempat kumpul, petunjuk jalur evakuasi, sirine pertanda bencana tsunami)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
904	a. Apakah di rumah tangga Anda, ada yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir?	1. Ya 2. Tidak → P.905	<input type="checkbox"/>
	b. Jika pernah, siapa saja yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam	Nama 1. 2. 3.	No Urut ART 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/>
905	Seandainya sekarang ini terjadi bencana alam, apakah ada anggota rumah tangga di rumah ini yang memerlukan pertolongan khusus karena memiliki keterbatasan mobilitas, antara lain orang lumpuh, buta, bisu/tuli, cacat mental/jiwa, ibu hamil, balita, lansia/lemah/terbaring di tempat tidur karena sakit ?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

X. SIKAP PERCAYA DAN TOLERANSI			
NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1001	Berapa lama Anda tinggal/menetap di desa ini? tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1002	Apakah Anda mengetahui nama tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal?	1. Sebagian kecil 2. Sebagian besar 3. Semuanya	<input type="checkbox"/>
1003	Selama 1 bulan terakhir, seberapa sering Anda bersosialisasi/bergaul dengan tetangga ?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Sangat sering	<input type="checkbox"/>
<p>Saya ingin bertanya mengenai tanggapan Anda terkait sikap percaya Anda kepada orang lain. Pilihan jawabannya adalah tidak percaya, kurang percaya, percaya dan sangat percaya.</p>			
1004	Seberapa percaya Anda menitipkan rumah pada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain?	1. Tidak percaya 2. Kurang percaya 3. Percaya 4. Sangat percaya	<input type="checkbox"/>
1005	Seberapa percaya Anda menitipkan anak (usia 1-12 tahun) pada tetangga jika tidak satupun ART dewasa ada di rumah?	1. Tidak percaya 2. Kurang percaya 3. Percaya 4. Sangat percaya	<input type="checkbox"/>
1006	Secara umum, apakah Anda percaya bahwa tokoh masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat berperan dalam membantu mengatasi masalah warga?	1. Tidak percaya 2. Kurang percaya 3. Percaya 4. Sangat percaya	<input type="checkbox"/>
1007	Secara umum, apakah Anda percaya bahwa tokoh agama di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat berperan sebagai panutan/penuntun moral?	1. Tidak percaya 2. Kurang percaya 3. Percaya 4. Sangat percaya 8. TIDAK ADA TOKOH AGAMA	<input type="checkbox"/>
1008	Secara umum, apakah Anda percaya bahwa perangkat desa/kelurahan telah menjalankan tugasnya dengan baik?	1. Tidak percaya 2. Kurang percaya 3. Percaya 4. Sangat percaya	<input type="checkbox"/>
<p>Sekarang, saya ingin bertanya mengenai tanggapan Anda terkait hubungan sosial dengan orang yang berbeda suku ataupun berbeda agama. Pilihan jawabannya adalah tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju</p>			
1009	a. Apakah Anda setuju jika anak Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah Anda setuju jika anak Anda menikah dengan orang dari agama lain?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
	c. Apakah ada anggota rumah tangga atau keluarga (anak, kakak, adik, suami/istri, atau orang tua) yang berbeda agama dengan Anda?	1. Ada 2. Tidak ada	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1010	a. Apakah Anda setuju jika anak Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
	b. Apakah Anda setuju jika anak Anda menikah dengan orang dari suku lain?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
	c. Apakah ada anggota rumah tangga atau keluarga (anak, kakak, adik, suami/istri, atau orang tua) yang berbeda suku dengan Anda?	1. Ada 2. Tidak ada	<input type="checkbox"/>
1011	a. Jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal, bagaimana tanggapan Anda?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
	b. Bagaimana tanggapan Anda jika ada atau akan dibangun tempat ibadah agama lain di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>
1012	Jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal, bagaimana tanggapan Anda?	1. Tidak setuju 2. Kurang setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju	<input type="checkbox"/>

XI. KELOMPOK DAN JEJARING

1101	Seberapa sering diadakan pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda?	1. Tidak pernah → P.1104 2. Seminggu sekali 3. Sebulan sekali 4. Lebih dari sebulan sekali 9. TIDAK TAHU → P.1104	<input type="checkbox"/>
1102	Apakah dalam setahun terakhir Anda pernah mengikuti pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	1. Tidak pernah → P.1104 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu	<input type="checkbox"/>
1103	Apakah Anda biasa memberikan pendapat/saran dalam pertemuan warga (rapat) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1104	Bagaimana cara pengambilan keputusan yang sering dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda? (JIKA P.1101 = 1 ATAU 9, MAKAN P.1104 ≠ 1)	1. Musyawarah 2. Pemungutan suara tanpa musyawarah 3. Keputusan tokoh masyarakat/agama 4. Lainnya.....(tuliskan) 9. TIDAK TAHU	<input type="checkbox"/>
1105	Apakah Anda menjadi anggota kelompok/organisasi (yang mempunyai kepengurusan) di lingkungan sekitar tempat tinggal? (Contoh: arisan, karang taruna)	1. Ya 2. Tidak → P.1108	<input type="checkbox"/>
1106	Jumlah kelompok/organisasi yang diikuti di lingkungan sekitar tempat tinggal? Kelompok/organisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1107	Apakah status/kedudukan Anda dalam kelompok/organisasi yang diikuti di lingkungan sekitar tempat tinggal? (JIKA ORGANISASI YANG DIIKUTI LEBIH DARI SATU, MAKAN PILIH YANG UTAMA MENURUT RESPONDEN)	1. Anggota tidak aktif 2. Anggota aktif 3. Pengurus 4. Ketua/wakil ketua	<input type="checkbox"/>
1108	a. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan bersama untuk kepentingan warga (seperti kerja bakti, siskamling, dll) di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda dalam setahun terakhir?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu 8. TIDAK ADA KEGIATAN	<input type="checkbox"/>
	b. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan bersama untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, sakit, dll) di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda dalam setahun terakhir?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu 8. TIDAK ADA KEGIATAN	<input type="checkbox"/>
1109	a. Seberapa sering Anda hadir/berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan (seperti: pengajian/perayaan keagamaan) di lingkungan sekitar tempat tinggal selama setahun terakhir?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu 8. TIDAK ADA KEGIATAN	<input type="checkbox"/>
	b. Seberapa sering Anda hadir/berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti: olahraga, kesenian, arisan) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu 8. TIDAK ADA KEGIATAN	<input type="checkbox"/>
1110	Apakah Anda bersedia membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan keuangan di lingkungan sekitar tempat tinggal? (Contoh: untuk berobat, biaya sekolah, dll)	1. Tidak bersedia 2. Tidak pasti 3. Bersedia 4. Sangat bersedia	<input type="checkbox"/>
1111	Seberapa mudah Anda mendapatkan pertolongan keuangan dari tetangga (selain kerabat) di lingkungan sekitar tempat tinggal?	1. Sulit 2. Tidak pasti 3. Mudah 4. Sangat mudah	<input type="checkbox"/>

XII. SIKAP DAN PERILAKU DALAM RUMAH TANGGA			
NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1201	Apakah Anda memiliki anak (kandung/tiri/angkat) yang berumur 1-14 tahun yang tinggal di rumah tangga ini ?	1.Ya 2.Tidak →P.1203	<input type="checkbox"/>
1202	Apakah selama sebulan terakhir, Anda menggunakan cara-cara berikut dalam mendidik anak-anak tersebut:	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	a. Menjelaskan pada anak bahwa perilakunya salah	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Menghukum anak dengan mengurangi atau melarang melakukan sesuatu yang disukai anak (misal: mengurangi uang saku/waktu bermain/ menonton TV).	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Memberikan tugas/pekerjaan kepada anak yang melakukan kesalahan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Membentak atau menakutinya	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	f. Mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	g. Mendorong/mengguncang badannya	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	h. Mencubit atau menjewer	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	i. Menampar, memukul, menjambak atau menendang	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
1203	Menurut Anda, apakah anak umur 1-14 tahun yang melakukan kesalahan harus diberi hukuman fisik? (Contoh hukuman fisik: mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
1204	Menurut Anda, apakah seorang suami pantas memarahi istri jika:	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	a. Istri pergi tanpa memberitahu suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Istri membantah suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Istri tidak mengurus anak dengan baik	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Istri diduga/dicurigai selingkuh	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	f. Istri menolak berhubungan seks dengan suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1205	Kadang-kadang seorang suami merasa kesal atau marah dengan tingkah laku istrinya. Menurut Anda, apakah seorang suami pantas memukul istrinya jika:		
	a. Istri pergi tanpa memberitahu suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Istri membantah suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Istri tidak mengurus anak dengan baik	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Istri diduga/dicurigai selingkuh	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
f. Istri menolak berhubungan seks dengan suami	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>	
XIII. POLITIK			
1301	Apakah Anda menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif 2014?	1. Ya 2. Tidak → P.1303	<input type="checkbox"/>
1302	Apakah yang Anda pilih saat Pemilu Legislatif 2014 ketika memilih: a. anggota DPR-RI	1. Partai 2. Caleg Laki-laki 3. Caleg Perempuan 7. LAINNYA	<input type="checkbox"/>
	b. anggota DPRD Provinsi	1. Partai 2. Caleg Laki-laki 3. Caleg Perempuan 7. LAINNYA } →P.1304	<input type="checkbox"/>
1303	JIKA (P.1301=2), apa alasan utama Anda tidak menggunakan hak pilih? (PILIHAN JAWABAN JANGAN DIBACAKAN)	1. TIDAK PUNYA HAK PILIH (TNI/ POLRI) 2. BEKERJA/SIBUK/BEPERGIAN 3. SAKIT 4. MALAS/TIDAK ADA GUNANYA 5. TIDAK ADA CALON SESUAI 6. TIDAK ADA YG MEMBERI IMBALAN 7. DITOLAK KPPS 8. TIDAK DAPAT UNDANGAN 9. LAINNYA.....(TULISKAN)	<input type="checkbox"/>
1304	Apakah Anda menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2014?	1. Ya → P.1306 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
1305	Apa alasan utama Anda tidak menggunakan hak pilih? (PILIHAN JAWABAN JANGAN DIBACAKAN)	1. TIDAK PUNYA HAK PILIH (TNI/ POLRI) 2. BEKERJA/SIBUK/BEPERGIAN 3. SAKIT 4. MALAS/TIDAK ADA GUNANYA 5. TIDAK ADA CALON SESUAI 6. TIDAK ADA YG MEMBERI IMBALAN 7. DITOLAK KPPS 8. TIDAK DAPAT UNDANGAN 9. LAINNYA.....(TULISKAN)	<input type="checkbox"/>
1306	Apakah Anda menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Gubernur terakhir di provinsi ini?	1. Ya → P.1308 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1307	Apa alasan utama Anda tidak menggunakan hak pilih? (PILIHAN JAWABAN JANGAN DIBACAKAN)	1. TIDAK PUNYA HAK PILIH (TNI/ POLRI) 2. BEKERJA/SIBUK/BEPERGIAN 3. SAKIT 4. MALAS/TIDAK ADA GUNANYA 5. TIDAK ADA CALON SESUAI 6. TIDAK ADA YG MEMBERI IMBALAN 7. DITOLAK KPPS 8. TIDAK DAPAT UNDANGAN 9. LAINNYA.....(TULISKAN)	<input type="checkbox"/>
1308	Menurut Anda, apakah faktor-faktor berikut, menjadi pertimbangan dalam memilih Kepala Daerah? a. Popularitas/terkenal	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Tingkat pendidikan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Kesamaan agama	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Kesamaan suku/etnis	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Kesamaan partai	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	f. Program/janji yang ditawarkan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	g. Prestasi	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	h. Status sosial (kekayaan, kebangsawanahan)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
1309	Apakah Anda pernah ditawari/diberi uang terkait pelaksanaan Pemilu/Pilpres/Pemilukada terakhir a. Legislatif	1. Ya 2. Tidak 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	b. Presiden	1. Ya 2. Tidak 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	c. Gubernur	1. Ya 2. Tidak 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
1310	Apakah Anda percaya bahwa presiden terpilih dapat memimpin negara menjadi bangsa yang sejahtera?	1. Sangat percaya 2. Percaya 3. Kurang percaya 4. Tidak percaya	<input type="checkbox"/>
1311	Apakah Anda percaya bahwa DPR dapat memperjuangkan aspirasi/keinginan rakyat?	1. Sangat percaya 2. Percaya 3. Kurang percaya 4. Tidak percaya	<input type="checkbox"/>
1312	Apakah Anda percaya bahwa gubernur dapat membangun daerah?	1. Sangat percaya 2. Percaya 3. Kurang percaya 4. Tidak percaya	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1313	Apakah Anda percaya bahwa polisi dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?	1. Sangat percaya 2. Percaya 3. Kurang percaya 4. Tidak percaya	<input type="checkbox"/>
1314	Apakah Anda percaya bahwa lembaga peradilan dapat berlaku adil dalam menyelesaikan kasus?	1. Sangat percaya 2. Percaya 3. Kurang percaya 4. Tidak percaya	<input type="checkbox"/>
1315	Apakah Anda menjadi anggota Organisasi Massa (mempunyai AD/ART)? (seperti HIPMI, PBNU, Walhi, Pemuda Pancasila, dll)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
1316	Apakah Anda menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu 2014?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
XIV. RASA AMAN			
1401	Di lingkungan tempat tinggal, apakah Anda merasa khawatir dengan keamanan Anda saat berada dalam situasi-situasi berikut dalam setahun terakhir? a. Berjalan kaki sendirian di siang hari	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	b. Berjalan kaki sendirian di malam hari	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	c. Berkendara (sepeda, sepeda motor, mobil) sendirian di malam hari	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	d. Memarkir kendaraan di luar rumah (sepeda, sepeda motor, mobil)	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
	e. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak berpenghuni	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
1402	Dalam perjalanan dari dan menuju ke tempat kerja/aktivitas, apakah Anda merasa khawatir dengan keamanan Anda dalam setahun terakhir?	1.Tidak khawatir 2. Khawatir 8. TIDAK RELEVAN	<input type="checkbox"/>
1403	Dalam setahun terakhir, apakah rumah Anda menggunakan alat/sarana keamanan berikut? a. Gembok/kunci/palang pintu yang berlapis	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Teralis	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Pagar yang tinggi (minimal 2 meter)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Kawat berduri/paku/pecahan kaca	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Alarm	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	f. Kamera CCTV	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	g. Hewan penjaga (anjing/angsa)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	h. Petugas keamanan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

NO.	PERTANYAAN DAN SARINGAN	PILIHAN JAWABAN	HASIL
1404	Dalam setahun terakhir, apakah di lingkungan Anda menggunakan sarana/cara pengamanan sebagai berikut?		
	a. Portal	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Penerangan jalan	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Hansip/satpam	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	d. Penerapan wajib lapor bagi pendatang (1x24 jam)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	e. Siskamling/ronda	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	f. Lainnya, (tuliskan)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

XV. KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN

No.	Apakah dalam setahun terakhir, Anda/ART mengalami kejadian?	Apakah mengalami? 1. Ya 2. Tidak Jika kode 2, ke barts berikutnya	Jumlah ART yang menjadi korban	Jumlah kejadian	DITANYAKAN HANYA UNTUK KEJADIAN YANG TERAKHIR						
					Dimana tempat kejadinya? (Kode)	Waktu (jam) terjadinya peristiwa kejadian?	Apakah hubungan pelaku dengan korban? (Kode)	Apa kerugian utama yang diderita? Risikopsikis: 1. Jiwa 2. Cacat 3. Luka 4. Kehormatan 5. Psikis 6. Tidak ada	Apakah peristiwa ini dilaporkan ke polisi? (Kode)	Jika tidak dilaporkan (kol11-2), Apa alasan utama tidak dilaporkan ke polisi? (Kode)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pembunuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Perkosaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Penganiayaan berat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Penganiayaan ringan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Penculikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Pencurian dengan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Pencurian kendaraan bermotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Pencurian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pengrusakan barang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Penjeuan, dll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kode kol6 : Dimana tempat kejadinya		Kode kol.8 : Hubungan Pelaku dg korban		Kode kol.10 : Kerugian utama yang menyentuh harta/barang			Kode kol.12 : Alasan utama peristiwa tidak dilaporkan ke polisi				
1. Di rumah 2. Di lingkungan sekitar rumah 3. Pasar/Mall 4. Tempat kerja 5. Tempat rekreasi 6. Terminal/stasiun 7. Kendaraan umum 8. Di pinggir jalan 9. Lainnya (termasuk penipuan lewat telpon, internet)		1. Orang yang dikenal 2. Orang yang hanya kenal muka 3. Orang yang tidak dikenal 4. Tidak tahu		1. Uang 2. Perhiasan 3. Surat berharga 4. Elektronik (termasuk HP) 5. Kendaraan bermotor 6. Temak 7. Hasil bumi 8. Lainnya 9. Tidak ada			1. Tidak punya waktu 2. Percuma melaporkan 3. Kejadian sepele/kecil 4. Khawatir merepotkan 5. Khawatir ada biaya 6. Dileseksikan secara damai 7. Lainnya				

XVI. CATATAN

http://www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Faks (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

ISBN. 978-979-064-914-9

A standard barcode representing the ISBN number 978-979-064-914-9.

9 789790 649149